



2024



LAPORAN CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PEMETAAN SASARAN STRATEGIS	1
BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	6
A. Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan.....	6
A.1. Efektivitas Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Dalam Rangka Pengarututamaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti	6
A.2. Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik	22
A.3. Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila.....	37
B. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi.....	45
B.1. Rekomendasi Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang Ditindaklanjuti.	46
B.2. Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila.....	69
C. Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP	74
C.1. Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	75
D. Diklat PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.....	97
D.1. Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan.	99
D.2. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP. ...	108
D.3. Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi	112
D.4. Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya.....	115
E. Pengendalian dan Evaluasi PIP	119
E.1. Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan.....	119
E.2. Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan.	124



F. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Pelayanan PIP yang Berkualitas	134
F.1. Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja	135
F.2. Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi	142
F.3. Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan.....	155
F.4. Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian.....	168
F.5. Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal	179
F.6. Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi.....	186
BAB III REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	197
BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN	200
BAB V PENUTUP.....	227

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPPI	3
Tabel 2. 1. Indikator Keluaran Program terjalannya hubungan antar lembaga, Kerja Sama, sosialisasi, dan jaringan, serta pembudayaan	6
Tabel 2. 2. Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	7
Tabel 2.3. Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya	12
Tabel 2. 4. Indikator Keluaran Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya	14
Tabel 2. 5. Dokumen Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya	19
Tabel 2. 6. Aktivitas Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya	20
Tabel 2. 8. Indikator Keluaran Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik	24
Tabel 2. 9. Aktivitas Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik	35
Tabel 2. 10. Daftar Komunitas / Kelompok Masyarakat yang telah melaksanakan aktualisasi	38
Tabel 2. 11. Indikator Keluaran Penyelenggaraan Jaringan dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	42
Tabel 2. 12. Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila	44
Tabel 2. 13. Indikator Keluaran Program Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	45
Tabel 2. 14. Indikator keluaran Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Serta Pengawasan Regulasi yang Dimanfaatkan	46
Tabel 2. 15. Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti	48
Tabel 2. 17. Rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti	61
Tabel 2. 18. Aktivitas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum Nasional terhadap Nilai- Nilai Pancasila	62
Tabel 2. 19. Aktivitas Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi PIP	66
Tabel 2. 20. Rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti Ditindaklanjuti	69
Tabel 2. 21. Indikator keluaran Rekomendasi atas Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang Ditindaklanjuti	71
Tabel 2. 22. Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila	72
Tabel 2. 23. Aktivitas Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila	73
Tabel 2. 24. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP	75
Tabel 2. 25. Indikator Keluaran Persentase Hasil Kajian PIP yang dimanfaatkan	75
Tabel 2. 27. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan PIP	91
Tabel 2. 28. Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP	93
Tabel 2. 29. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP	94



Tabel 2. 30. Indikator Keluaran Program Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal	98
Tabel 2. 31. Indikator Keluaran Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan	99
Tabel 2. 32. Aktivitas Penyelenggaraan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP	106
Tabel 2. 33. Indikator Keluaran Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	108
Tabel 2. 34. Aktivitas pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	111
Tabel 2.35. Indikator Keluaran Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi (ToT)	113
Tabel 2. 36. Aktivitas Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompetensinya meningkat.....	114
Tabel 2. 37. Indikator Keluaran Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	115
Tabel 2. 38. Aktivitas Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	117
Tabel 2. 39. Aktivitas Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila	117
Tabel 2. 39. Indikator Keluaran Program Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi	119
Tabel 2. 40. Indikator Keluaran Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan	120
Tabel 2. 41. Kegiatan Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan	123
Tabel 2. 42. Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan	125
Tabel 2. 43. Aktivitas Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP	129
Tabel 2. 44. Aktivitas Rekomendasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila	131
Tabel 2. 44. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPIP yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel.....	134
Tabel 2. 45. Indikator Keluaran Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja.....	135
Tabel 2. 46. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja.....	140
Tabel 2. 47. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi.....	142
Tabel 2. 48. Peraturan dan Produk Hukum Tahun 2024	147
Tabel 2. 49. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi	154
Tabel 2. 50. Capaian Target Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan	155
Tabel 2. 51. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan	167
Tabel 2. 52. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	168
Tabel 2. 53. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Fasilitas , Hubungan Masyarakat dan Administrasi	177
Tabel 2. 54. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal..	179
Tabel 2. 55. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal	185
Tabel 2. 56. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi	186
Tabel 2. 57. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi.....	195
Tabel 3. 1. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja	198



Tabel 4. 1. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya hubungan antar lembaga, Kerja Sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP	200
Tabel 4. 2. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi	205
Tabel 4. 3. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP	208
Tabel 4. 4. Kendala dan Tindak Lanjut terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal	210
Tabel 4. 5. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP	214
Tabel 4. 6. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen	217



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP	2
Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total.....	197
Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program	198

DAFTAR ISTILAH



ADKASI	: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
APIP	: Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
ARJUNA	: Akreditasi Jurnal Nasional
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BIN	: Badan Intelijen Negara
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPPI	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BTU	: Buku Teks Utama
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DKT	: Diskusi Kelompok Terpumpun
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHIP	: Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IAP	: Indeks Aktualisasi Pancasila
IDEA	: <i>Indonesian E-Commerce Association</i>
IKU	: Indikator Kinerja Utama
K3HKP	: Kepatuhan, Kinerja, Korupsi, dan Hambatan Kelancaran Pembangunan
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenPANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
Mapel	: Mata Pelajaran
Medsos	: Media Sosial
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial dan Politik
Paskbiraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
PDN	: Pusat Data Nasional
PDP	: Purnapaskibraka Duta Pancasila



LAPORAN CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2024

PEMDA	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PJK	: Pancasila Jurnal Keindonesiaan
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMPRB	: Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PN	: Prioritas Nasional
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PSP	: Pusat Studi Pancasila
PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
RAPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
Renstra	: Rencana Strategis
RO	: Rincian <i>Output</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRI	: Radio Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang–Undang
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBKU	: Standar Biaya Keluaran Umum
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SINTA	: <i>Science and Technology Index</i>
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TA	: Tahun Anggaran
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: <i>Training of Trainer</i>
TTIS/CSIRT	: Tim Tanggap Insiden Siber/ <i>Computer Security Incident Response Team</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UKPBJ	: Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNDANA	: Universitas Nusa Cendana
UNWIRA	: Universitas Katolik Widya Mandira
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Program & Kegiatan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bahwa Kepala dan Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah.

Laporan Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) terhadap penggunaan anggaran BPIP Periode Tahun 2024.

Laporan Capaian Program dan Kegiatan merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program atau kegiatan berlangsung, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPIP untuk dapat memenuhi setiap Sasaran Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya (Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja). Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, mewujudkan Pancasila sebagai leitstar atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia, juga sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam laku hidup rakyat Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2025

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

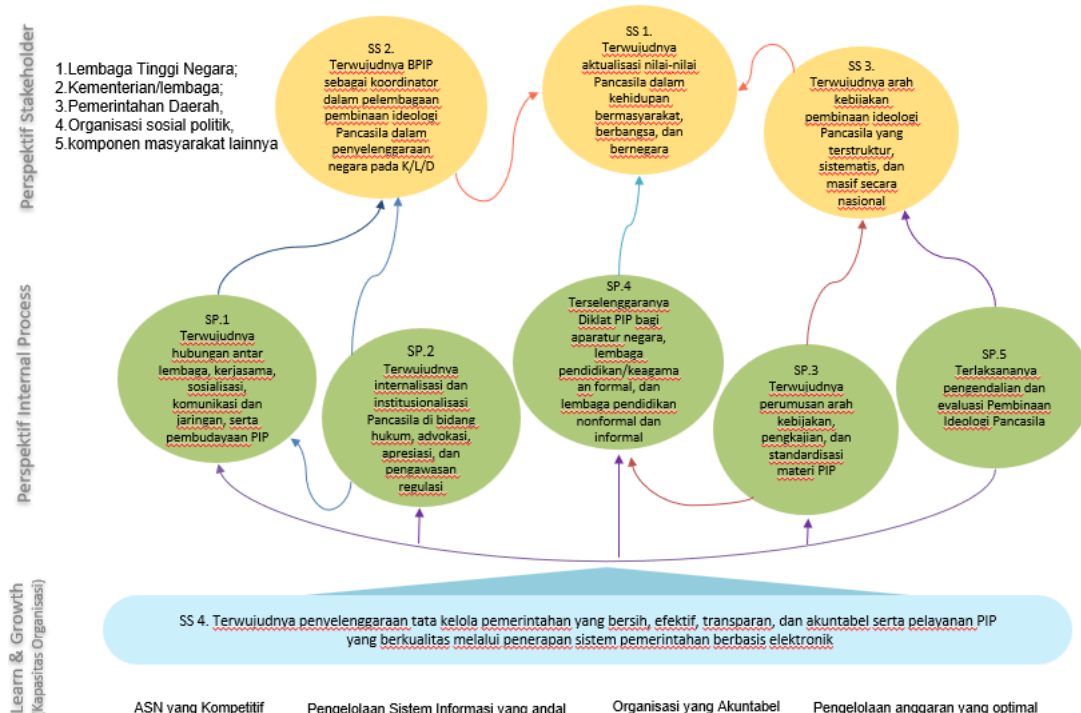
RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dimandatkan dalam Rencana Strategis BPIP 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada Kementerian/Lembaga/Daerah;
3. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Keempat sasaran strategis tersebut dapat terwujud dengan dukungan Sasaran Program Kedeputan dan Sekretariat Utama. Sasaran Program dicapai dengan berbagai kegiatan teknis. Hubungan sasaran strategis dan Sasaran Program PIP dipetakan berikut ini:

PETA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



PETA STRATEGIS BPIP

Dari Tahun 2020 sampai dengan periode saat ini berikut adalah capaian dari keempat sasaran strategis tersebut:

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2020-2024					
SASARAN STRATEGIS (INDEKS KINERJA UTAMA (IKU))	Periode				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara					
Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	Penyusunan Indikator	76,78	72,93	75,53	77,73
Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda					
Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP	20%	26%	60%	79%	114%
Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional					
Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	5 Rek	5 Rek	5 Rek	5 Rek	5 Rek
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan SPBE					
Nilai Reformasi Birokrasi	44,14	60,15	63,7	66,82	Belum Diukur
Indeks Sistem Merit	Belum dilakukan	0,61	0,63	0,75	0,83
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
Nilai Profesionalisme ASN	30	41,37	48,8	64,26	69,45
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penyusunan Indikator	79,21%	89,12%	89,12%	80,42%

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPIP

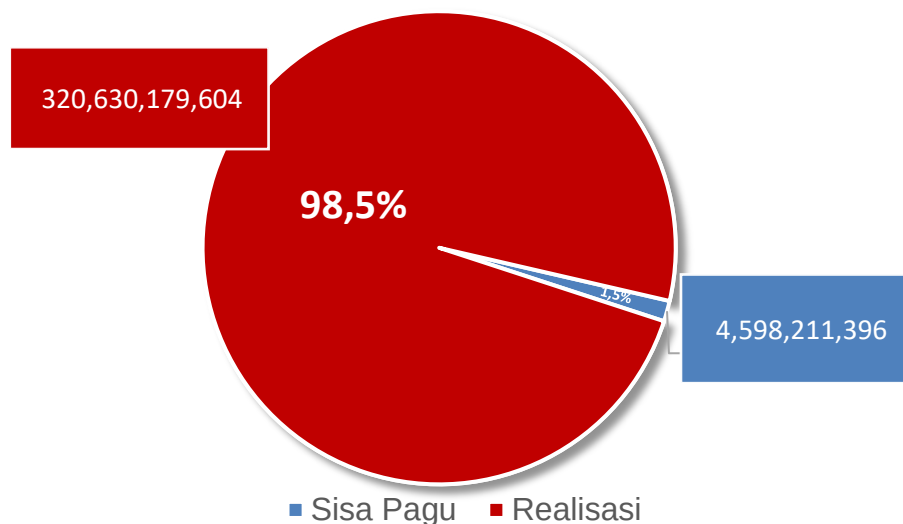
Keberhasilan capaian sasaran strategis terwujud karena dukungan capaian kinerja Sasaran Program, dimana merupakan kinerja pelaksanaan kegiatan yang melekat pada masing-masing sasaran. Capaian pelaksanaan kegiatan periode Tahun 2024 adalah:

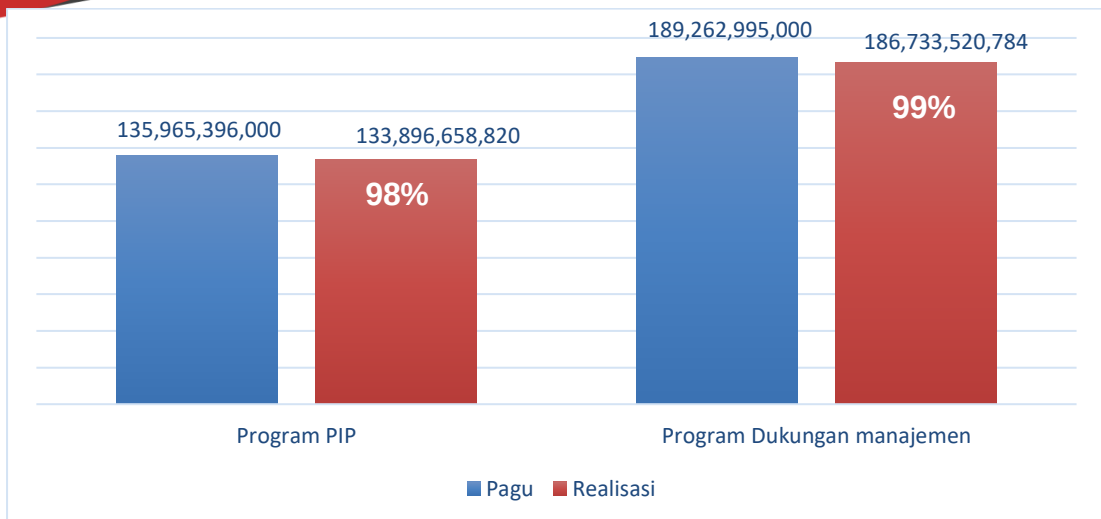
1. Terwujudnya hubungan antar lembaga, Kerja Sama, sosialisasi , komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP;
 - a. Persentase penilaian atas efektivitas Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti dengan capaian 170%;
 - b. Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik dengan capaian 125%;
 - c. Persentase penilaian atas efektivitas jaringan dan pembudayaan nilai Pancasila dengan capaian 140%.
2. Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi;

- a. Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 93,3%;
- b. Jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti dengan capaian 115%.
3. Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP berupa Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan dengan capaian 100%.
4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan atau keagamaan formal, dan lembaga pendidikan atau keagamaan nonformal dan informal;
 - a. Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 266% ;
 - b. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP dengan capaian 128,5%;
 - c. Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi dengan capaian 57,13%;
 - d. Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya dengan capaian 102,5%;
5. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP;
 - a. Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang dimanfaatkan dengan capaian 100%;
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang ditindaklanjuti dengan capaian 100%.
6. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan.
 - a. Layanan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja dengan capaian 100%;
 - b. Layanan pengawasan intern di lingkungan BPIP dengan capaian 100%;

- c. Layanan koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan dengan capaian 100%;
- d. Layanan dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli serta Hubungan Masyarakat dan Administrasi dengan capaian 100%;
- e. Layanan koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi dengan capaian 100%;
- f. Layanan pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan PIP dengan capaian 75%.

Pada periode Tahun 2024, berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2024 realisasi anggaran BPPIP adalah 98,59% atau sebesar Rp320.630.179.604,00 dari alokasi pagu DIPA TA 2024 sebesar Rp325.228.391.000,00 Berikut adalah data realisasi anggaran BPPIP periode Tahun 2024:





Realisasi Anggaran BPIP

Beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, antara lain adalah (i) Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas; (ii) mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang ada untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya; (iii) Mendorong pembentukan arah kebijakan PIP; (iv) Pembangunan sistem manajemen terintegrasi diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (v) Menyusun pedoman evaluasi PIP.

Pada Tahun 2024 optimalisasi pelaksanaan kegiatan diupayakan sesuai dengan *timeline* kegiatan, bila terdapat kendala teknis dan non teknis yang ada pada pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan perbaikan sesuai rencana aksi agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai guna terus membangun penguatan akuntabilitas kinerja, BPIP akan terus mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan dengan lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta aturan, arahan dan praktek yang tepat dalam revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.

BAB I | PEMETAAN SASARAN STRATEGIS

Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 masuk dalam Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP dengan sasaran memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Kegiatan Prioritas berupa PIP, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Cakupan kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh, yaitu:

1. PIP, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;
2. Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai perumus kebijakan umum PIP;
3. Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
4. Membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara.

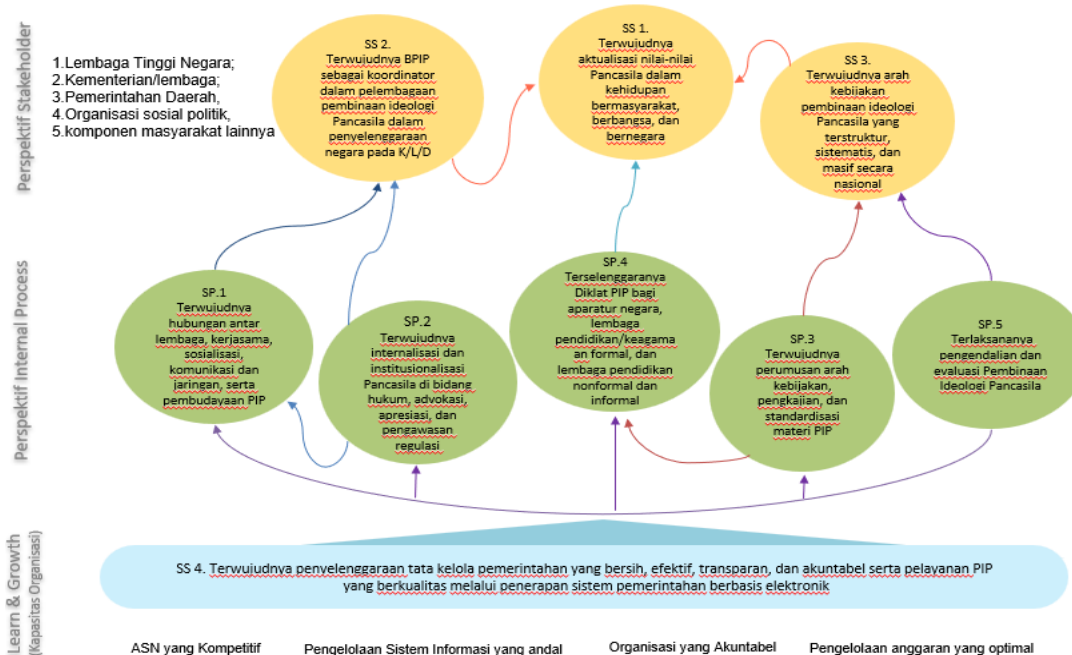
BPIP mendukung sepenuhnya pencapaian visi dan misi Presiden yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. BPIP dengan program PIP menuju pada *outcome* hingga *impact* aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara dan teraktualisasikan dalam setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Rencana strategis pelaksanaan Program PIP diarahkan mewujudkan 4 sasaran strategis BPIP, yaitu:

1. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada Kementerian/Lembaga/ Daerah;
2. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
3. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Keempat sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui dukungan Sasaran Program Kedeputian teknis dan Sekretariat Utama dukungan kapasitas organisasi. Sasaran program dicapai dengan berbagai kegiatan. Peta strategis keterkaitan sasaran-sasaran melalui pendekatan perspektif *Stakeholder*, pelaksanaan program dan kegiatan, serta dukungan kapasitas organisasi tampak pada Peta Strategis BPIP berikut ini.

PETA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP

Tujuan sasaran-sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dipetakan di atas, yaitu:

1. PIP melalui arah kebijakan penguatan PIP secara nasional;
2. BPIP sebagai koordinator PIP dalam menyelenggaraan negara pada K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara;
4. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan sasaran strategis BPIP adalah, sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Mewujudkan arah kebijakan penguatan PIP secara nasional	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional	Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	5 Rekomendasi
Mewujudkan BPIP sebagai koordinator dalam pelemagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelemagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP	100%

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Menguatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	77
Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	83
		Indeks Sistem Merit	0,81
		Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
		Nilai SAKIP	BB
		Indeks Profesionalisme ASN	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90%

Kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam Program PIP dan Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program, yaitu:

1. Terwujudnya hubungan antar lembaga, Kerja Sama, sosialisasi komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP;
2. Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi;
3. Terwujudnya perumusan perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP;



4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal;
5. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP;
6. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas.

BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

A. Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan

Sebagai Lembaga yang diberi mandat dalam PIP maka fungsi koordinasi dan sinkronisasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terjalinnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan:

Tabel 2. 1. Indikator Keluaran Program terjalinnya hubungan antar lembaga, Kerja Sama, sosialisasi, dan jaringan, serta pembudayaan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	KET
Persentase penilaian atas efektivitas HAL dan Kerja Sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100% (24K/L)	170% (41 K/L)	 170%
Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik	4 Nilai	5 Nilai	 125%
Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila	70% (100%=150 Pokmas)	100% (150 Pokmas)	 140%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

A.1. Efektivitas Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan Program:

Target Persentase penilaian atas efektivitas HAL dan Kerja Sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti pada Tahun 2024 adalah 100% (24 K/L).

Pada Tahun Anggaran 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 170% (41 K/L/Pemda/Orsospol) dilakukan optimalisasi sebesar 25 K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah serta 16 Organisasi Sosial dan Politik serta Organisasi dengan uraian capaian adalah:

- a. Optimalisasi Kerja Sama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah;

Pada Tahun 2024 setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap optimalisasi Kerja Sama pembinaan ideologi Pancasila terhadap Kesepakatan yang telah di laksanakan khusus untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terdapat sebanyak sebanyak 25 Kementerian/Lembaga/Pemda/Orsospol) termasuk pemerintah daerah yang sudah sangat aktif melaksanakan dalam bentuk kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Kementerian Dalam Negeri	a. <i>Keynote speaker</i> dalam kegiatan “Pendidikan dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan bagi ASN”, 29 Januari 2024	Sestama
2.	Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi	Undangan Kepakaran Narasumber Pengembang Kurikulum Ahli Madya pada kegiatan Rapat Koordinasi Standarisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, 6 Februari 2024	Deputi 4

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
3.	Pemerintah Kabupaten Kuningan	Gotong Royong membangun Ekonomi Pancasila melalui Festival Kuliner dan Budaya, 24 Februari 2024	Deputi 1
4.	Kementerian Hukum dan HAM	a. Penguatan PIP bagi Petugas dan Warga Binaan Lapas IIB Kayu Agung, sebagai bentuk Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, 27 Februari 2024 b. Sosialisasi Penguatan PIP bagi Petugas Lapas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Nusakambangan, Cilacap 27 Maret 2024	Deputi 1
5.	Pemerintah Kabupaten Pati	Pelaksanaan Peresmian Taman Pancasila dan Tugu Pancasila di Pati, 2 Maret 2024	Deputi 1
6.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Monitoring Materi PIP melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang SD, SMP, SMA di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat NTT, 7 Maret 2024 b. Pelaksanaan DKT Finalisasi Draf Buku Hermeneutika Karya-karya	Deputi 3

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Sukarno di Ende-Menggali Falsafah Pancasila melalui surat-surat dan Tonil, NTT, 8 Maret 2024	
7.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Pelaksanaan Seminar PIP dengan tema “Pancasila sebagai dasar Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Berbangsa dan bernegara di Kabupaten Aceh” Tamiang, 8 Maret 2024	Deputi 1
8.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Pelaksanaan Seminar Kebangsaan “Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa” Riau, 19 Maret 2024	Deputi 1
9.	KPU	Pengendalian PIP dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024, Undip (Jateng) 27 Maret 2024	Deputi 5
10.	Badan Pengawas Pemilu	Pengendalian PIP dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024, Undip (Jateng) 27 Maret 2024	Deputi 5
11.	Sulawesi Utara	Kunjungan Apresiasi Indeks Aktualisasi Pancasila, 2 April 2024	Deputi 5
12.	Pemerintah Kota Cirebon	“Ngobrol, Ngabuburit, Ngonten” <i>content creator</i> se-Jabar, 4 April 2024	Settama
13.	Pemerintah Provinsi Bali	Kajian Materi Pancasila bagi PT dalam rangka MBKM, 19 April 2024	Deputi 3

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
14.	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kirab Panji Mahkota Kemaharajaan Sunda sebagai Mutiara Pancasila, 28 April 2024	Deputi 2
15.	Pemerintah Provinsi Babel	Internalisasi dan Institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Per-UU melalui BIMTEK Penyelarasan Indikator Pancasila, 6 s.d. 7 Mei 2024	Deputi 2
16.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	a. <i>Workshop For Your Pancasila</i> se-Jatim, 7 Mei 2024 b. DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Jejaring Pendidik Pancasila dalam rangka sosialisasi Buku Teks Utama, 28 s.d. 29 Juni 2024	Settama Deputi 1
17.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila, 17 Mei 2024	Deputi 1
18.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DKT Perencanaan Pelaksanaan DIKLAT PIP di Kaltim, 21 Mei 2024	Deputi 4
19.	Arsip Nasional Republik Indonesia	Melaksanakan Penelusuran Arsip Naskah Otentik Risalah Sidang BPUPK, 19 Juni 2024	Deputi 3
20.	Pemerintah Karanganyar	Peresmian Desa Pancasila dan Intervensi <i>Stunting</i> , 20 s.d. 21 Juni 2024	Deputi 1
21.	Kementerian Agama	Kajian dan Sosialisasi BTU Pendidikan Pancasila pada	Deputi 1

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Satuan Pendidikan Kemenag Wilayah Jateng, 21 Juni 2024	
22.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rakor Pemulihan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik, 4 Juli 2024	Settama
23.	Pemerintah Kabupaten Klaten	a. Pembahasan Penyelarasan RAPERDA bersama Bagian Hukum Setda Klaten, 24 Juli 2024 b. Kolaborasi BPIP bersama Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penguatan nilai-nilai Pancasila bagi ASN dan masyarakat, 11 Agustus 2024	Deputi 2 Deputi 1
24.	Lembaga Ketahanan Nasional	Pembicara pada Kuliah Umum untuk 1.000 peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Tahun 2024, 2 Agustus 2024	Wakil Kepala
25.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Pelaksanaan Penguatan Nilai-Nilai Pancasila kepada Pemuda sebagai benteng Radikalisme dan Terorisme, 18 September 2024	Deputi 1

- b. Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya.

Hingga Tahun 2024 Jumlah total optimalisasi Kerja Sama setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kesepakatan

yang telah di laksanakan khusus untuk Universitas dan organisasi sosial politik dan masyarakat ada sebanyak 16 Universitas/Orsospolmas yang sudah aktif melaksanakan dalam bentuk kegiatannya sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan
Komponen Masyarakat Lainnya**

No.	Universitas/Orsos polmas	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Universitas Gadjah Mada	a. Monitoring Program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Penggerak Pancasila, 21 Januari 2024 b. Undangan Kepakaran Narasumber Dosen Fakultas Filsafat pada kegiatan Rapat Koordinasi Standarisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP, Yogyakarta, 6 Februari 2024 c. Sosialisasi Pancasila melalui Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia", beKerja Sama dengan PSP UGM, Yogyakarta, 19 Februari 2024	a. Deputi 1 b. Deputi 4 c. Deputi 1
2.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	a. Sosialisasi Pancasila bagi Gen Z, 22 Januari 2024 b. Sarasehan Pancasila, 2 April 2024	Deputi 1
3.	Universitas Negeri Malang	Sosialisasi Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan, 28 Januari 2024	Deputi 1
4.	Universitas Pendidikan Indonesia	a. Undangan Kepakaran Narasumber Guru Besar UPI pada kegiatan Rapat Koordinasi Standarisasi Kurikulum Diklat PIP, Yogyakarta, 6 Februari 2024 b. Sosialisasi Pancasila melalui Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia"	a. Deputi 4 b. Deputi 1

No.	Universitas/Orsos polmas	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Bandung, 19 Februari 2024	
5.	Universitas Brawijaya	Sosialisasi Pancasila melalui Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia", Malang, 26 Februari 2024	Deputi 1
6.	IAIN Langsa	Pelaksanaan Seminar Pancasila dalam perspektif lokal dan global, 9 Maret 2024	Deputi 1
7.	UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki)	Stadium General "Moderasi Beragama dan Penguatan Nilai-nilai Pancasila" Malang, 21 Maret 2024	Deputi 1
8.	Universitas Diponegoro	Pengendalian PIP dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024, 27 Maret 2024	Deputi 5
9.	PHDI (Persatuan Hindu Dharma Indonesia)	Seminar Nasional PIP dalam rangka Hari Nyepi, 31 Maret 2024	Deputi 1
10.	Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta	Ngabuburit Kebangsaan, 5 April 2024	Deputi 1
11.	Univ Mahendratta Bali	Kajian Materi Pancasila dalam rangka MBKM, 19 April 2024	Deputi 3
12.	Universitas Riau	Kepala BPIP sebagai Pembicara Kunci dan Membuka Olimpiade PPKN Tingkat Nasional, 6 Mei 2024	Deputi 1
13.	Universitas Negeri Jakarta	Seminar Nasional "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia", 14 Mei 2024	Deputi 1
14.	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Seminar Nasional "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia", 16 Mei 2024	Deputi 1
15.	Persatuan Guru Republik Indonesia	Penyusunan Standar Proses Diklat bagi Persatuan Guru Republik Indonesia, 11 Juni 2024	Deputi 4
16.	Komisi Penyiaran Indonesia	Kolaborasi BPIP dan KPID Jawa Barat: Sinergi untuk membumikan Pancasila. September 2024	Deputi 1

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 4. Indikator Keluaran Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi Kerja Sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas yang ditindaklanjuti	Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan dengan lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah bidang prioritas	20	44	220% (Kesepakatan)
	Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan dengan organisasi sosial, politik, serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas	25	24	88% (Kesepakatan)
Persentase rekomendasi Kerja Sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang non prioritas yang ditindaklanjuti	Kesepakatan pengembangan hubungan kemitraan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya (non prioritas)	4	16	400% (Kesepakatan)
	Kesepakatan dengan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang non-prioritas	3	4	133% (Kesepakatan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2024 yaitu:

Tahun ini dokumen Kerja Sama yang harus dipenuhi sebanyak 24 dokumen kesepakatan yang terdiri dari dokumen kesepakatan Kementerian/Lembaga/Provinsi yang menjadi Prioritas Nasional

sebanyak 20 Dokumen, sedangkan yang tidak menjadi Prioritas Nasional sebanyak 4 Dokumen.

Untuk dokumen Kesepakatan dengan Organisasi Masyarakat yang menjadi Prioritas Nasional sebanyak 25 Dokumen dan sedangkan yang tidak menjadi Prioritas Nasional sebanyak 3 Dokumen.

Pada Periode Tahun 2024 ini Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama jika dilihat berdasarkan skala prioritas untuk Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan dengan lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah bidang prioritas sebesar 44 kesepakatan dari target 20 kesepakatan atau sebesar 220%, dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian kesepakatan}}{20 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= \frac{44 \text{ kesepakatan}}{20 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= 220\%$$

Berikut adalah Ringkasan Capaian Tersebut

NO	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi HAL Bidang Prioritas (44 Kesepakatan)
1.	Tanda tangan (TTD) Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kuningan
2.	TTD Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Pati
3.	Kolaborasi Kerja Sama dalam bidang Paskibraka dan kegiatan lain: 38 Pemerintah Provinsi.
4.	Kolaborasi Kerja Sama: Kemenkumham/Ditjen PAS (LP Nusakambangan dan LP Gunung Sindur)
5.	TTD Kerja Sama Setwan DPRD Sumatera UTara
6.	TTD Kerja Sama Setwan DPRD Lampung
7.	TTD Kerja Sama BKPSDM Provinsi Bali

Untuk Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan dengan organisasi sosial, politik, serta komponen masyarakat

lainnya bidang prioritas mencapai 24 kesepakatan dari target 25 atau sebesar 88%, dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian kesepakatan}}{25 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= \frac{24 \text{ kesepakatan}}{25 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= 96\%$$

Berikut adalah Ringkasan Capaian Tersebut

NO	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi Hubungan ORSOSPOL Bidang Prioritas (24 Kesepakatan)
1.	TTD Kerja Sama IAIN Langsa
2.	TTD Kerja Sama UIN Maulana Malik Ibrahim
3.	TTD Kerja Sama UIN Alauddin Makassar
4.	TTD Kerja Sama IAIN Palopo
5.	TTD Kerja Sama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
6.	TTD Kerja Sama UPI Pusat
7.	TTD Kerja Sama UPI Cibiru
8.	TTD Kerja Sama Undip
9.	TTD Kerja Sama KPID Jabar
10.	TTD Kerja Sama KPID Yogyakarta
11.	Kolaborasi dan Koordinasi Kerja Sama dengan UGM
12.	Kolaborasi dan Koordinasi Kerja Sama dengan UIN Sunan Kalijaga
13.	Kolaborasi dan Koordinasi Kerja Sama dengan Universitas Brawijaya
14.	Kolaborasi dan Koordinasi Kerja Sama dengan UNJ
15.	Kolaborasi dan Koordinasi Kerja Sama dengan UIN Malang
16.	Kolaborasi dan Koordinasi Kerja Sama dengan UNU Yogya
17.	Kolaborasi dan Koordinasi Kerja Sama dengan Mahendratta Bali
18.	Kolaborasi dan Koordinasi Kerja Sama dengan UNM Malang
19.	Kolaborasi dan Koordinasi Kerja Sama dengan Universitas PGRI

NO	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi Hubungan ORSOSPOL Bidang Prioritas (24 Kesepakatan)
20.	Kolaborasi DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dan Koordinasi Kerja Sama dengan Universitas Hasanuddin
21.	Kolaborasi DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dan Koordinasi Kerja Sama dengan Universitas Patimura
22.	Kolaborasi DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dan Koordinasi Kerja Sama dengan Universitas Tanjungpura
23.	Kolaborasi DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dan Koordinasi Kerja Sama dengan Universitas Muhammadiyah Kupang
24.	Kolaborasi DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Kerapuhan Etika Penyelenggaraan Negara dan Koordinasi Kerja Sama dengan Universitas Sumatera Utara

Untuk Kesepakatan pengembangan hubungan kemitraan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya (nonprioritas) mencapai 16 paket kesepakatan dari target 4 kesepakatan atau sebesar 400% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian kesepakatan}}{4 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= \frac{16 \text{ kesepakatan}}{4 \text{ target kesepakatan}} = 400\%$$

NO	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi HAL Bidang Non-Prioritas (16 Kesepakatan)
1.	Koordinasi Kerja Sama Harlah Pancasila Pemerintah Provinsi Riau
2.	Koordinasi Kerja Sama Harlah Pancasila dan Jacket Bung Karno Pemkab Ende
3.	Koordinasi Kerja Sama Kemenko Polhukam
4.	Koordinasi Kerja Sama Kementerian BUMN

NO	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi HAL Bidang Non-Prioritas (16 Kesepakatan)
5.	Koordinasi Kerja Sama Kementerian PUPR
6.	Koordinasi Kerja Sama BIN
7.	Koordinasi Kerja Sama BNN
8.	Koordinasi Kerja Sama BNPT
9.	Koordinasi Kerja Sama Kementerian Agama
10.	Koordinasi Kerja Sama ANRI
11.	Koordinasi Kerja Sama BRIN
12.	Koordinasi Kerja Sama Pemkab Karanganyar
13.	Koordinasi Kerja Sama Pemkot Magelang
14.	Koordinasi Kerja Sama Perpustakaan Nasional
15.	Koordinasi Kerja Sama KPI Pusat
16.	Koordinasi Kerja Sama KPI Pusat

Untuk Kesepakatan dengan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang non-prioritas mencapai 4 paket kesepakatan dari target 3 kesepakatan atau sebesar 133% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian kesepakatan}}{3 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= \frac{4 \text{ kesepakatan}}{3 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= 133\%$$

Berikut adalah Ringkasan Capaian Tersebut

NO	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi Hubungan ORSOSPOL Bidang Non-Prioritas (4 Kesepakatan)
1	TTD Kerja Sama Yayasan Anak Bangsa Indonesia
2	Koordinasi Kerja Sama UPI
3.	Koordinasi Kerja Sama UNRI
4.	Koordinasi Kerja Sama dengan Gerakan Pembumih Pancasila

Adapun capaian jumlah dokumen Kerja Sama Pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 16 (Delapan) dokumen Kerja Sama yang sudah ditandatangani yang menjadi *output* Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Dokumen Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya

NO	Jenis Kerja Sama	PIHAK	Tanggal Kerja Sama	PN/Non PN
1.	Perjanjian Kerja Sama	Yayasan Anak Bangsa Indonesia	30 Januari 2024	Non PN
2.	Nota Kesepakatan	Kabupaten Kuningan	24 Februari 2024	PN
3.	Nota Kesepakatan	Kabupaten Pati	2 Maret 2024	PN
4.	Perjanjian Kerja Sama	IAIN Langsa	9 Maret 2024	PN
5.	Perjanjian Kerja Sama	UIN Maulana Malik Ibrahim	22 Maret 2024	PN
6.	Perjanjian Kerja Sama	UIN Alauddin Makassar	24 April 2024	PN
7.	Perjanjian Kerja Sama	IAIN Palopo	3 Mei 2024	PN
8.	Perjanjian Kerja Sama	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	16 Mei 2024	PN
9.	Perjanjian Kerja Sama	LEMHANNAS (Dep TAPLAI LEMHANNAS - Dep DIKLAT BPIP)	8 Juli 2024	PN
10.	Perjanjian Kerja Sama	Sekretariat DPRD Sumatera Utara	23 Juli 2024	PN
11.	Perjanjian Kerja Sama	Universitas Pendidikan Indonesia	18 Juli 2024	PN
12.	Perjanjian Kerja Sama	Universitas Pendidikan Indonesia Cibiru	18 Juli 2024	PN
13.	Perjanjian Kerja Sama	BKPSDM Pemerintah Provinsi Bali	1 Agustus 2024	PN
14.	Perjanjian Kerja Sama	Universitas Diponegoro	9 Agustus 2024	PN
15.	Perjanjian Kerja Sama	Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat	11 September 2024	PN

NO	Jenis Kerja Sama	PIHAK	Tanggal Kerja Sama	PN/Non PN
16.	Perjanjian Kerja Sama	Sekretariat DPRD Lampung	19 September 2024	PN

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Efektivitas HAL dan Kerja Sama dalam rangka pengarusutamaan Ideologi Pancasila pada Triwulan IV yaitu:

Tabel 2. 6. Aktivitas Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Optimalisasi Kerja Sama antara BPIP dengan KPID Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 10 November 2024)	
2.	Penerimaan Audiensi Aisiyyah Jawa Tengah (Jakarta, 25 November 2024)	
3.	Pembahasan Pembaharuan Naskah MoU antara BPIP dengan BNPT (Jakarta, tanggal 4 Desember 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Koordinasi Kerja Sama dengan Lapas Blora (Jawa Tengah, tanggal 8 Desember 2024)	
5.	Penerimaan Audiensi dari Kesbangpol Maluku Utara (Jakarta, tanggal 17 Desember 2024)	
6.	Penandatanganan Kerja Sama antara BPIP dengan Universitas Diponegoro (Klaten, tanggal 9 Agustus 2024)	
7.	DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Peluang Kerja Sama Perpusnas dan KPI (Jakarta, tanggal 30 Agustus 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Penandatanganan Kerja Sama antara BPIP dengan KPID Jabar (Bandung, tanggal 11 September 2024)	
9.	Penandatanganan Kerja Sama antara BPIP dengan DPRD Lampung (Bandar Lampung, tanggal 19 September 2024)	
10.	Optimalisasi Kerja Sama dengan DPR RI melalui Sosialisasi Pancasila, (Sukabumi, tanggal 20 September 2024)	

A.2. Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik

Indikator Keberhasilan Program

Target Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik pada Tahun 2024 adalah 4 Nilai.

Pada Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 5 Nilai Sangat Efektif Nilai dengan uraian capaian bahwa saat ini masih

dilakukan proses sosialisasi dan komunikasi dan penilaian dilakukan di akhir tahun untuk semua konten yang dibuat. Untuk menentukan tingkatan nilai di atas dengan formulasi:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Capaian Target} &= \frac{\text{jumlah viewers (n)}}{\text{jumlah konten (n)}} \\ \text{Nilai Capaian Target} &= \frac{3.362.042}{226} = 14.876 \\ \text{Nilai Capaian Target} &= 5(\text{Sangat Efektif})\end{aligned}$$

Adapun kategori nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 = 0-5 nilai (sangat tidak efektif)
- 2 = 6-10 nilai (tidak efektif)
- 3 = 11-15 nilai (cukup efektif)
- 4 = 16-20 nilai (efektif)
- 5 = 21-25 nilai (sangat efektif)

Pada Tahun 2024 dukungan Deputy I terhadap capaian IKU tersebut Sangat Efektif hal ini terlihat pada capaian optimalisasi Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik. Target Tahun 2024 adalah 4 (Empat) Nilai. Hingga Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7. Indikator Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik

NO	Judul	Tahun	Qty	Viewers
1	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila melalui Bedah Buku “Pancasila dari Indonesia untuk Dunia”	2024	1	190
2	Seminar Nasional dan Bedah Buku: “Pancasila dari Indonesia untuk Dunia” di Kampus UGM Yogyakarta	2024	1	194
3	Bedah Buku: Pancasila dari Indonesia untuk Dunia	2024	1	143
4	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur	2024	1	126
5	Produksi Materi Penyiaran Strategi Komunikasi Refleksi Akhir Tahun 2024	2024	1	118.293
6	Peliputan Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara, dalam Berbangsa dan Bernegara, Kedaulatan	2024	1	650.149

NO	Judul	Tahun	Qty	Viewers
	Sumber Daya Alam di Pontianak, Kalimantan Barat			
7	Peliputan Musyawarah Gotong Royong Forum Group Discussion Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Kupang, Nusa Tenggara Timur Pengadaan yang Dikecualikan Untuk Industri Kreatif dalam Kegiatan Peliputan Musyawarah Gotong Royong Forum Group Discussion Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Medan	2024	1	498.129
8	Kegiatan Peliputan Musyawarah Gotong Royong Forum Group Discussion Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Medan	2024	1	289.677
9	Penguatan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Podcast Salam Pancasila di Radio	2024	200	1.799.916
10	Penguatan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Podcast "SAMPAN" di Youtube	2024	18	5225
Jumlah			226	3.362.042
Nilai (view/qty konten)			14.876	
Kategori Nilai			5	

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 8. Indikator Keluaran Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase konten sosialisasi PIP yang ditindaklanjuti	Layanan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga/Daerah	4	4	165% (Layanan)
Persentase strategi komunikasi terhadap isu PIP yang ditindaklanjuti	Layanan komunikasi melalui media massa	4	4	237,2% (Layanan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2024 yaitu:

	Target	JUMLAH CAPAIAN	URAIAN
Layanan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga/daerah:		165%	layanan
- Penyusunan materi	2	7 (350%)	Paket
- Sosialisasi Pancasila di daerah	37	40 (108%)	Lokus
- Sosialisasi di KL	4	4 (100%)	K/L
- Sosialisasi pada Hari Besar	4	4 (100%)	Kegiatan
Layanan komunikasi melalui media massa:		237,2%	layanan
- Penyusunan materi komunikasi	2	5 (250%)	Paket
- Pengembangan komunikasi melalui media TV	3	14 (466%)	Program
- Pengembangan komunikasi melalui media cetak dan online	3	4 (133%)	Program
- Pengembangan komunikasi melalui media radio	1	1 (100%)	Program

a. Layanan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga/Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari 4 layanan yang dirincikan pada masing-masing komponen, diantaranya:

1) Penyusunan Materi Sosialisasi di Media Sosial

Hingga Tahun 2024 telah mencapai 7 (tujuh) *output* kegiatan dengan uraian paket yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
1.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Strategi Materi Sosialisasi dan Komunikasi dalam Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila di Solo	19 s.d. 21 Januari 2024
2.	Diskusi Kelompok Terpumpun Strategi Sosialisasi Pancasila di Ruang Publik di Yogyakarta	15 s.d. 17 Februari 2024

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
3.	Diskusi Kelompok Terpumpun "Strategi dan Optimalisasi Sosialisasi PIP di Ruang Publik, Sosial Media dan Sosial Masyarakat"	Bandung, 19 s.d. 21 April 2024
4.	Diskusi Kelompok Terpumpun Strategi Sosialisasi Pancasila di Ruang Publik	Jakarta, 02 s.d. 04 Mei 2024
5.	Rapat Persiapan Sosialisasi dan Komunikasi PIP di Era Digital melalui Virtual Expo dan Penayangan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2024 di Jakarta	Jakarta, 8 s.d. 10 Juli 2024
6.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Materi Komunikasi Publik Untuk Mencegah Efek Negatif Filter Bubble di Bandung	Bandung, 25 s.d. 28 Juli 2024
7.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Materi Sosialisasi dan Strategi Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Bogor, Jawa Barat	Bogor, 14 s.d. 16 Agustus 2024

2) Sosialisasi Pancasila di Daerah

Pada Tahun 2024 telah mencapai 40 (Empat Puluh) *output* dimana uraian lokus diantaranya:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
1.	Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Z dengan tema "Meneguhkan Eksistensi Demokrasi Pancasila Demi Terwujudnya Negara Yang Maju dan Bermartabat" di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Yogyakarta, DIY, 22 Januari 2024
2.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Sebagai Salam Kebangsaan "Memperkokoh Mental Mahasiswa Menuju Pesta Demkorasi 2024 Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila", di Universitas Negeri Malang dan Koordinasi Persiapan Acara Sosialisasi PIP melalui Bedah Buku Pancasila untuk Dunia di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur	Malang, 29 Januari 2024
3.	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Melalui Bedah Buku "Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia" di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat	Bandung, 19 Februari 2024

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
4.	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Melalui Bedah Buku “Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia” di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Yogyakarta, 21 Februari 2024
5.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila untuk Dunia: “To Build the World A New” di Universitas Brawijaya, Malang	Malang, Jawa Timur, 26 Februari 2024
6.	Sosialisasi Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila “Peduli <i>Stunting</i> Sebagai Wujud Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” di Kab. Grobogan, Jawa Tengah	Grobogan, Jawa Tengah, tanggal 01 Maret 2024
7.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Pemerintah Kab. Aceh Tamiang, Aceh	Aceh Tamiang, Aceh, 08 Maret 2024
8.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh	Aceh Tamiang, Aceh, 08 Maret 2024
9.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di IAIN Zawiyah Cot Kala Kota Langsa, Provinsi Aceh	Langsa, Aceh, 09 Maret 2024
10.	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila di Ponpes Kananga Kab, Pandeglang, Banten	Pandeglang, 16 Maret 2024
11.	Sosialisasi dan Penguatan Ideologi Pancasila di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Malang	Malang, 22 Maret 2024
12.	Kegiatan Sosialisasi kepada Warga Binaan dan Petugas Lembaga Permayarakatan di Lembaga Permayarakatan Nusakambangan Tanggal 27 Maret 2024	Cilacap, 27 Maret 2024
13.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Nusakambangan” dan “Seminar Penguatan Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Kedamaian dan Keakraban Perspektif Maqashid Al-Syari’ah di Cilacap	Cilacap, 28 Maret 2024
14.	Sosialisasi Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Yogyakarta, 02 April 2024
15.	Sosialisasi Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila di PSPBN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Yogyakarta, 03 April 2024
16.	Sosialisasi Penguatan Pembinaan Ideologi	Yogyakarta, 05

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
	Pancasila di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta	April 2024
17.	Sosialisasi Implementasi Buku Teks Utama Pancasila pada satuan Pendidikan di bawah Koordinasi Kementerian Agama di Provinsi D.I Yogyakarta	Yogyakarta, 22 April 2024
18.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Peningkatan Wawasan kebangsaan dan Penanggulangan <i>Stunting</i> di Kabupaten Karanganyar	Karanganyar, 27 April 2024
19.	Sosialisasi Pancasila melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Pekanbaru, Provinsi Riau	Pekanbaru, 04 Mei 2024
20.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku "Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia" di Universitas Negeri Jakarta	Jakarta, 14 Mei 2024
21.	Kuliah Umum Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku "Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia" di UIN Jakarta	Jakarta, 16 Mei 2024
22.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Moderasi Kerukunan Umat Beragama di Provinsi D.I. Yogyakarta	Yogyakarta, 07 Juni 2024
23.	Sosialisasi Pancasila Dalam Tindakan "Penanggulangan <i>Stunting</i> " di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Karanganyar, 20 Juni 2024
24.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Peresmian Desa Pancasila di Kabupaten Karanganyar	Karanganyar, 21 Juni 2024
25.	Sosialisasi Implementasi Buku Teks Utama pada satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah	Yogyakarta, 21 Juni 2024
26.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Seminar Pancasila untuk Dunia "To Build The World a New" di Politeknik Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur	Kupang, 25 Juni 2024
27.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila "Implementasi Pancasila Dalam Masyarakat Pesantren" di Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta	Yogyakarta, 27 Juni 2024
28.	Sosialisasi Penguatan Pembinaan Ideologi	Sragen, 04 Juli

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
	Pancasila “Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Perisai Bangsa” di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah	2024
29.	Sosialisasi Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila “Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Perisai Bangsa” di Kabupaten Provinsi D.I Yogyakarta	Yogyakarta, 31 Juli 2024
30.	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui <i>Forum Group Dicsussion “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara”</i> di Malang, Jawa Timur pada tanggal 31 Agustus s.d. 4 September 2024	Malang, 31 Agustus s.d. 4 September 2024
31.	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui <i>Forum Group Dicsussion “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara”</i> di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 s.d. 19 September 2024	Makassar, 15 s.d. 19 September 2024
32.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila “Pancasila sebagai Benteng Pencegahan Radikalisme dan Terorisme” di Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 s.d. 20 September 2024	Surabaya, 17 s.d. 20 September 2024
33.	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui <i>Forum Group Dicsussion “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara”</i> di Ambon, Maluku pada tanggal 18 s.d. 22 September 2024	Ambon, 18 s.d. 22 september 2024
34.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Perbatasan “Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Pemersatu Bangsa” di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat	Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, 03 Oktober 2024
35.	Paket Meeting Luar Kota Kegiatan Sosialisasi PIP Melalui Diskusi Kelompok Terpumpun Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara “Kedaulatan Ekonomi” pada tanggal 15 s.d. 18 Oktober di Kupang, Nusa Tenggara Timur	Kupang, Nusa Tenggara Timur, 15 s.d. 18 Oktober 2024
36.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila “Kontribusi Pesantren Sebagai Benteng Pancasila bagi Kemajuan NKRI” di	Tasikmalaya, 05 November 2024

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
	Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat	
37.	Sosialisasi Pembumian Nilai-Nilai Pancasila di Surabaya	Surabaya, 09 November 2024
38.	Koordinasi Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Penandatanganan Kerja Sama antara BPIP dengan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta, 10 November 2024
39.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Tema "Membangun Spirit dan Kepeloporan Pancasila bagi Mahasiswa" di Kota Serang, Banten	Banten, 29 November 2024
40.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Pameran Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP RI di Jakarta	Jakarta, 19 Desember 2024

3) Sosialisasi Pancasila di Lingkungan Kementerian/Lembaga

Pada Tahun 2024 telah mencapai 4 (Empat) *output* dimana dengan uraian yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan LP Kelas IIB di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir, 27 Februari 2024	200 Orang
2.	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rangka Penguatan Nilai Kebangsaan Sinergi BPIP bersama Mabes AD "Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa Indonesia"	Pekanbaru, 19 Maret 2024	500 Orang
3.	Sosialisasi Penguatan Nilai Kebangsaan Sinergi BPIP bersama Mabes AD melalui Seminar "Pancasila sebagai Dasar Ideologi Bangsa" di Sukoharjo	Sukoharjo, 28 Mei 2024	500 Orang

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
4.	Pengadaan Jasa Event Organizer Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Rangka Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Pancasila	Sragen, 15 Juni 2024	500 Orang

4) Sosialisasi Pancasila Pancasila Pada Peringatan Hari Besar Nasional

Pada Tahun 2024 telah mencapai 4 (Empat) *output* dimana dengan uraian kegiatan diantaranya yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Seminar Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Perayaan Hari Nyepi Tahun Saka 1946/2024 “Implementasi Pancasila dalam Perayaan Hari Suci Agama – Agama di Indonesia”	Jakarta, 31 Maret 2024	100 Orang
2.	Paket Meeting Dalam Kota <i>User Acceptance Test</i> Pancasila Expo Dan Peluncuran Pancasila Expo 2024 pada tanggal 24 s.d. 27 Mei 2024 di Jakarta	Jakarta, 24 s.d. 27 Mei 2024	50 Orang
3.	Pancasila Virtual Expo 2024	Jakarta, 26 Mei 2024	10.000 orang
4.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Dukungan Peringatan Hari Ibu Nasional	Tangerang, 22 Desember 2024	50 peserta

b. Layanan komunikasi melalui media massa

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari 4 layanan yang dirincikan pada masing-masing komponen yaitu:

1) Penyusunan Materi Komunikasi

Pada Tahun 2024 telah mencapai 5 (Lima) *output* kegiatan

dengan uraian program diantaranya yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
1.	DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Penyusunan Strategi Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Regulasi/Kebijakan	Jakarta, 6 s.d. 9 November 2024
2.	DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Penyusunan Strategi Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Regulasi/Kebijakan	Jakarta, 20 s.d. 23 November 2024
3.	DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Penyusunan Strategi Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Regulasi/Kebijakan	Jakarta, 11 s.d. 14 Desember 2024
4.	Pengadaan Yang Dikecualikan Untuk Industri Kreatif Pada Pembuatan Materi Komunikasi berupa Film Pendek "Menyulam Senjakala Sejarah"	18 November s.d. 15 Desember 2024
5.	Produksi Materi Penyiaran Strategi Komunikasi Refleksi Akhir Tahun 2024	12 s.d. 20 Desember 2024

2) Pengembangan Komunikasi melalui Media TV

Pada Tahun 2024 telah mencapai 14 (empat belas) *output* kegiatan dengan uraian program diantaranya yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
1.	Peliputan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia" di Universitas Pendidikan Indonesia	Bandung pada tanggal 19 Februari 2024
2.	Peliputan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia" di Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta, pada tanggal 21 Februari 2024

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
3.	Peliputan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku “Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia” di Universitas Brawijaya	Malang, pada tanggal 26 Februari 2024
4.	Peliputan Kegiatan Kirab Pancasila Tahun 2024 di Jakarta	Jakarta, pada tanggal 26 Mei 2024
5.	Peliputan Kegiatan Peluncuran Pancasila Virtual Expo Tahun 2024	Jakarta, pada tanggal 26 Mei 2024
6.	Penayangan Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 tanggal 01 Juni	Dumai, pada tanggal 1 Juni 2024
7.	Penayangan Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila Tahun 2024	Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2024
8.	Peliputan Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka di Balai Samudra	Jakarta, pada tanggal 5 s.d. 7 Agustus 2024
9.	Peliputan “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Malang	Malang, pada tanggal 2 September 2024
10.	Peliputan “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Makassar	Makassar, pada tanggal 18 September 2024
11.	Peliputan “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Ambon	Ambon, pada tanggal 20 September 2024
12.	Pengadaan Yang Dikecualikan Untuk Industri Kreatif Dalam Kegiatan Peliputan Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara, dalam Berbangsa dan Bernegara, Kedaulatan Sumber Daya Alam di Pontianak, Kalimantan Barat	Pontianak, Kalimantan Barat, 03 Oktober 2024

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
13.	Pengadaan Yang Dikecualikan Untuk Industri Kreatif Dalam Kegiatan Peliputan Musyawarah Gotong Royong Forum Group Discussion Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Kupang, Nusa Tenggara Timur	Kupang, Nusa Tenggara Timur, 18 Oktober 2024
14.	Pengadaan yang Dikecualikan Untuk Industri Kreatif dalam Kegiatan Peliputan Musyawarah Gotong Royong Forum Group Discussion Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Medan	Medan, Sumatera Utara, 02 November 2024

3) Pengembangan komunikasi melalui media cetak dan online

Pembuatan 4 Opini di Media Online Rakyat Merdeka



RM.id | Rakyat Merdeka - Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan solusi Indonesia mengurangi megatren dunia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga menjadi dasar hukum bagi Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik.



RM.id | Rakyat Merdeka - Merindukan karya dan Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga menjadi dasar hukum bagi Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik.



RM.id | Rakyat Merdeka - Pancasila adalah jiwa dari bangsa. Dengan mengamalkan Pancasila, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik. Pancasila juga menjadi dasar hukum bagi Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik.



RM.id | Rakyat Merdeka - Catatan Achdyat, Analisis Kebijakan Ahli Madya BPIP. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga menjadi dasar hukum bagi Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik.

4) Pengembangan komunikasi melalui media radio

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengadaan Yang Dikecualikan Untuk Industri Kreatif Pada Penguatan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Podcast Salam Pancasila di Radio	23 September s.d. 27 November 2024

Tabel 2. 9. Aktivitas Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Perbatasan "Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Pemersatu Bangsa" di Entikong (Kalimantan Barat, tanggal 3 Oktober 2024)	
2.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila "Kontribusi Pesantren Sebagai Benteng Pancasila bagi Kemajuan NKRI" (Tasikmalaya, tanggal 5 November 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Sosialisasi Pembumihian Nilai-Nilai Pancasila (Surabaya, tanggal 31 Juli 2024)	
4.	Koordinasi Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Penandatanganan Kerja Sama antara BPIP dengan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 10 November 2024)	
5.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Tema "Membangun Spirit dan Kepeloporan Pancasila bagi Mahasiswa" (Banten, tanggal 29 November 2024)	
6.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Pameran Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP RI (Jakarta 19 Desember 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Dukungan Peringatan Hari Ibu Nasional (Tangeran, tanggal 22 Desember 2024)	
8.	DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Penyusunan Strategi Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Regulasi/Kebijakan (Jakarta, tanggal 23 s.d. 24 Desember 2024)	
9.	Bimtek PIP "Pemahaman Ideologi Pancasila" dan Penandatanganan PKS bersama DPRD Provinsi Lampung (Lampung, tanggal 18 s.d. 21 September 2024)	

A.3. Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila

Indikator Keberhasilan Program

Target Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila pada Tahun 2024 adalah 70%. Target tersebut adalah target tahunan dan bukan merupakan target akumulasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024. sasaran Pembudayaan setiap tahun berbeda-beda, misal dari target 150 pokmas tahun 2024 berbeda dengan target 100 pokmas

di tahun 2023. Target 70% tahun 2024 adalah mereprenstasikan keberhasilan pembudayaan kepada 150 sasaran tersebut.

Pada Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 100% (150 Pokmas dari 150 Pokmas yang dilakukan pembudayaan). Uraian capaian adalah masyarakat yang telah menerima pembudayaan PIP sebanyak 150 kelompok masyarakat telah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan uraian capaian adalah:

Tabel 2. 10. Daftar Komunitas / Kelompok Masyarakat yang telah melaksanakan aktualisasi

No.	Nama Pokmas/Komunitas
1.	Yayasan Darma Bakti Karya
2.	Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum
3.	PCNU Surabaya
4.	Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Muhammadiyah Gersikan Tambaksari
5.	Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika
6.	Badan Kerja Sama Antar Gereja Kabupaten Pati
7.	Yayasan Subur Makmur Sejahtera
8.	Gabungan Organisasi Wanita Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (GOW PKK) Kabupaten Pati
9.	Yayasan Al Khidmah Kabupaten Pati
10.	Permadani (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia)
11.	Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pati
12.	Yayasan Maqam Ki Ageng Penjawi
13.	Rumah Anak Pancasila
14.	Atap Keberagaman
15.	Sanggar Trotoar
16.	Pemuda Garuda Kesaktian
17.	Nusantara Centre
18.	Masyarakat Urban dan Ibukota
19.	Barongan Pati
20.	Komunitas Notaris Indonesia Berkebaya
21.	Komunitas Perempuan Berkebaya
22.	Galang Kemajuan Satu Warna (GKSW)
23.	Komunitas Kebaya, Kopi & Buku
24.	Komunitas Kain Kebaya Indonesia (KKI)
25.	Alumni SMA Surabaya Bersatu (ASSB)

No.	Nama Pokmas/Komunitas
26.	Ikatan Keluarga Besar TTS Sejabodetabek
27.	Komunitas Perempuan Pelestari Budaya Indonesia
28.	IKB TNS (Ikatan Keluarga Besar Teon Nila Serua)
29.	Komunitas Alumni SMA Jakarta Bersatu
30.	Sanggar Trotoar
31.	Setya Kita Pancasila
32.	Srikandi Nusantara
33.	Taman Baca Masyarakat Garuda
34.	Aliansi Disabilitas Nusantara
35.	Organ Kembang Latar
36.	Masyarakat Urban Ibukota
37.	Ikatan Keluarga Besar Mollo
38.	Sanggar Trotoar
39.	Setya Kita Pancasila
40.	Srikandi Nusantara
41.	Komunitas Seni Teras Pancasila
42.	Gerakan Pendidikan Indonesia Baru
43.	Komunitas Pelestari Budaya Indonesia
44.	Pijar
45.	Badan Musyawarah Masyarakat Bima
46.	Badan Musyawarah Keluarga Jambi
47.	Forum Bhineka Indonesia
48.	Brigade Nasional
49.	Perempuan Pemimpin Indonesia
50.	Pijar Jakarta Timur
51.	Srikandi Budaya Nusantara
52.	Penari Penjaga Negeri
53.	Perempuan Berkebaya Indonesia
54.	Bunda Milenial
55.	Pelestari Kebaya Dan Budaya
56.	Pejuang Wanita Tangguh
57.	Pecinta Sanggul Nusantara
58.	Komunitas Cinta Nusantara
59.	Gemilang Karya Satu Nusantara
60.	Komunitas Menari Tari Nusantara
61.	Komunitas Panduan Suara Gabrela
62.	Wanita Sarinah Berkebaya
63.	Perempuan Nusantara Berkreasi

No.	Nama Pokmas/Komunitas
64.	Srikandi Gebyar Nusantara
65.	Pengawal Pancasila Damai
66.	Mama Cinta Kebaya Dan Batik
67.	CKB (Cinta Kebaya dan Budaya)
68.	NB (Notaris Berkebaya)
69.	Komunitas Sekar Jiwanta
70.	Komunitas Rampah Sarinah Jakarta
71.	Komunitas Pejuang Negeri Tercinta
72.	Komunitas Perempuan Pecinta Budaya Indonesia
73.	Komunitas Kain Dan Kebaya
74.	Komunitas Cinta Budaya Nusantara
75.	Komunitas Cinta Berkebaya
76.	Forum Komunikasi Badan Penghubung Provinsi Seluruh Indonesia (Forkappsi)
77.	Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur
78.	Badan Penghubung Provinsi Maluku
79.	BMMPB (Badan Musyawarah Masyarakat Pemerintah Bengkulu)
80.	Badan Penghubung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
81.	Badan Penghubung Pemprov Kaltara
82.	Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta
83.	WBI (Wanita Bersanggul Indonesia)
84.	Komunitas Kebaya Menari
85.	Komunitas Indonesia Menari
86.	Komunitas Belantara Budaya
87.	JO SMART
88.	KCBI (Komunitas Cinta Berkain Indonesia)
89.	Kebaya Foundation.
90.	Komunitas Perempuan di Perantauan
91.	Komunitas Perempuan Manggarai
92.	Komunitas Seknas Perempuan
93.	Komunitas Kridhadari
94.	Komunitas Laksmi Kinasih
95.	Komunitas Libas
96.	Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten
97.	Komunitas Sinar Pusaka Putra
98.	FPK Provinsi DKI Jakarta
99.	FPK Kota Administrasi Jakarta Pusat
100.	FPK Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Nama Pokmas/Komunitas
101.	FPK Kota Administrasi Jakarta Selatan
102.	FPK Kota Administrasi Jakarta Barat
103.	FPK Kota Administrasi Jakarta Utara
104.	Bundo Kanduang Provinsi DKI Jakarta
105.	Maluku Utara Bersatu
106.	JTS Kamayoran
107.	Ikatan Keluarga Besar Papua
108.	Mpok None Bamus Betawi
109.	Forum Kader Bela Negara Provinsi DKI Jakarta
110.	Ikatan Keluarga Minangkabau
111.	Wanita Forkabi
112.	Seusama Aceh
113.	Beranda UMKM Jakarta Timur
114.	Indonesia Timur Bersatu
115.	Kopemi
116.	AGPPKNI Provinsi Sumatera Utara
117.	AGPPKNI Provinsi Jawa Timur
118.	AGPPKNI Provinsi Sulawesi Selatan
119.	Padepokan Seni Bagonk Grup
120.	Forum Silaturahmi Tokoh Majelis Taklim (Forsitma) DPC Pasar Rebo
121.	Komunitas Perempuan dan Ketahanan Keluarga Jakarta Timur/Partai Keadilan Sejahtera
122.	Jendela Ide
123.	Bumi Dega
124.	Kampung Adat Cirendeu
125.	Organisasi Budi Budaya
126.	Ajaran Mei Kartawinata
127.	Paguyuban Kepala Desa Baturaden
128.	Perkumpulan Gerakan Hidup Pancasila Kab.Banyumas
129.	Assosiasi E-Commerce Indonesia
130.	Satgas Pancasila Palu
131.	Komunitas Tadulako Palu Sulteng
132.	Glintung Go Malang Jatim
133.	Pedati Palu Sulteng
134.	Polelea Sigli Sulawesi Tengah
135.	Sanggar Gonnengah Sulawesi Selatan
136.	Assosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dan PPKN
137.	Desa Ciseureuh Brebes Jateng

No.	Nama Pokmas/Komunitas
138.	Kampung Adat Jalawastu Brebes Jateng
139.	Karang Taruna Ciseureuh Brebes
140.	Sapta Darma Yogyakarta
141.	Srikandi Lintas Iman Yogyakarta
142.	Trisuka
143.	Generasi Muda Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
144.	Saung Angklung Udjo
145.	Himpunan Keluarga Maluku Utara
146.	Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat
147.	Studio Titik dua Ciamis
148.	Sanggar Rakyat Ciamis
149.	TTMC Teater Tari Ciamis
150.	Komunitas Baca Puisi Ciamis

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Jaringan dan Pembudayaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 11. Indikator Keluaran Penyelenggaraan Jaringan dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila	1	1	100% (Rekomendasi)
Persentase jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui relawan Gerakan kebajikan Pancasila	150	150	100% (Kelompok Masyarakat)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2024 yaitu:

- Persentase rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti

Tersusunnya Rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti, yaitu saat ini dari target 10 modul penyusunan modul Pedoman Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila bagi Siswa Sekolah Menengah Atas sebagai bagian dari rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila, telah tercapai 10 modul sehingga tercapai sebesar 100% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rekomendasi} &= \frac{\text{capaian modul}}{10 \text{ target modul}} \\ &= \frac{10 \text{ modul}}{10 \text{ target modul}} = 100\%\end{aligned}$$

Sebagai langkah awal dalam mendukung pembudayaan Pancasila, direkomendasikan pengembangan buku pedoman yang dirancang secara praktis untuk memudahkan generasi muda mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini harus menggunakan pendekatan interaktif dan reflektif yang sesuai dengan gaya komunikasi remaja. Selain itu, penyelenggaraan modul yang berisi tema-tema seperti hidup mulia, tumbuh mandiri, sinergi, sepadan setara, dan berpikir benar perlu diimplementasikan di lingkungan sekolah dan komunitas. Upaya ini juga perlu didukung dengan pelatihan khusus bagi guru dan orang tua, agar mereka dapat menjadi pembimbing efektif dalam pembentukan karakter siswa.

Kolaborasi antara sekolah, komunitas lokal, dan keluarga juga perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, remaja didorong menjadi agen perubahan melalui kegiatan berbasis modul, seperti kampanye kesetaraan, aksi gotong royong, dan perlindungan lingkungan. Upaya ini dilengkapi dengan pembentukan kelompok belajar atau klub berbasis Pancasila di sekolah untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai seperti berpikir.

b. Persentase jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila

Tahun 2024 ini target dari kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan yaitu 150 kelompok. Untuk Tahun 2024 tercapai 150 kelompok masyarakat atau sebesar 100% dari total keseluruhan capaian dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pokmas yang melakukan Aktualisasi}}{150 \text{ Kelompok Masyarakat}}$$

$$= \frac{150 \text{ Kelompok Masyarakat}}{150 \text{ Kelompok Masyarakat}} = 100\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 12. Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Persiapan Kegiatan Kejuaraan Nusantara Karate Open 2024 (Jakarta, tanggal 2 Oktober 2024)	
2.	Rapat Penerimaan Audiensi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Jakarta, tanggal 7 Oktober 2024)	

B. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi

Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukum tersendiri yang secara terus menerus dilakukan internalisasi dan institusionalisasi. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorn*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Indikator Keberhasilan Sasaran Program Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi adalah termanfaatkan dan ditindaklanjutinya capaian keluaran yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 13. Indikator Keluaran Program Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI	Ket
Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	93,3%	 93,3%
Jumlah rekomendasi hasil penyesuaian rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	20 Rekomendasi	23	 115%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

B.1. Rekomendasi Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang Ditindaklanjuti.

Indikator Keberhasilan:

Target Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti pada Tahun 2024 adalah pemanfaatan 1 Rekomendasi.

Pada Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 93,3% $(100\%+80\%+100\%)/3$ (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan:

- Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila
- Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi PIP

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 14. Indikator keluaran Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Serta Pengawasan Regulasi yang Dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN		KET
Persentase rekomedasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila	Rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila	3	3	100% (Rekomendasi) tiga bidang Polhukam, Bidang Ekomarinvest, bidang PMK)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah	1	80%	80% (Rekomendasi)
Persentase rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi advokasi PIP terhadap Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial/politik dan komponen masyarakat lainnya serta purnapaskibraka	3	3	100% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2024 yaitu:

- a. Persentase rekomedasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila

Pancasila sebagai paradigma dalam pengetahuan sebagai landasan dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan dalam pembangunan, nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus ditempatkan sebagai nilai bersifat meta-yuridis yang melandasi lahirnya norma-norma hukum di bawah UUD 1945 yang mengikat semua warga, kementerian dan lembaga.

Menyadari hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang utuh dan mendasar terhadap kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil yang diharapkan dari pemahaman itu, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan modal oleh bangsa Indonesia

untuk melakukan pembangunan nasional yang secara garis besar meliputi pembangunan di bidang: (a) Polhukam; (b) Ekomarivest; (c) PMK. Artinya, pembangunan nasional harus benar-benar merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berdaulat secara politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan dan bersendikan gotong royong.

Pada akhir periode tahun 2024 rekomedasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila sudah terselesaikan dimana telah terbit 3 rekomendasi dengan 23 keluaran rancangan produk hukum nasional yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila sehingga capaian sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 100%. Berikut adalah 23 keluaran rancangan produk hukum nasional yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila:

Tabel 2. 15. Rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat;	Selesai diselaraskan 100%
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;	Selesai diselaraskan 100%
3.	Rancangan Gubernur Provinsi Banten tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya bagi Masyarakat Tidak Mampu;	Selesai diselaraskan 100%
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;	Selesai diselaraskan 100%
5.	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Dan Perikanan;	Selesai diselaraskan 100%

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
7	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;	Selesai diselaraskan 100%
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
10.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
11.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
12.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
13.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik;	Selesai diselaraskan 100%
14.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu;	Selesai diselaraskan 100%
15.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pembinaan Ideologi Pancasila;	Selesai diselaraskan 100%
16.	Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan berbasis gender dalam penanggulangan bencana;	Selesai diselaraskan 100%
17.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
18.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
19.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta Tahun 2023-2043;	Selesai diselaraskan 100%
20.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;	Selesai diselaraskan 100%
21.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Perlindungan Produk Lokal;	Selesai diselaraskan 100%
22.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan	Selesai diselaraskan 100%
23.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Kawasan Tanpa Rokok.	Selesai diselaraskan 100%

Keterangan:

0-10%	Perencanaan	Belum Terlaksana
11-25%	Koordinasi Awal	Akan dilaksanakan
26-50%	Inisisasi dan Kajian	Akan dilaksanakan
51-100%	Tahapan Penyelesaian	Telah dilaksanakan

b. Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti

Dukungan Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi terhadap capaian IKU tersebut adalah menghasilkan 1 Rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah yang dimana pada tahun 2024 ini Direktorat Analisis dan Penyelarasan telah mencapai 80% dari target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari tersusunnya tim yang telah melakukan kajian lebih mendalam terhadap muatan materi dalam penyusunan draf rancangan peraturan

BPIP tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institucionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi. Selain itu kajian terhadap muatan materi tersebut, telah dilakukan konsolidasi antar unit kerja terkait yaitu bersama Kedeputan Pengkajian dan Materi, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Pengawasan Internal.

Dari proses penyusunan arah kebijakan internalisasi dan institucionalisasi Pancasila tersebut, masih belum terlaksanakannya beberapa tahapan yang menjadi target kerja pada tahun anggaran 2024 ini, antara lain:

Tabel 2. 15. Rekomendasi hasil internalisasi dan institucionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti

No.	Tahapan penyusunan arah kebijakan internalisasi dan institucionalisasi Pancasila	Keterangan
1.	Analisis Tugas dan Fungsi Perumusan Arah Kebijakan Internalisasi dan Institucionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja;	Terselesaikan 100%
2.	Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Arah Kebijakan Internalisasi dan Institucionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;	Terselesaikan 100%
3.	Penyusunan tim untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap muatan materi dalam penyusunan draf rancangan peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institucionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;	Terselesaikan 100%
4.	Pembahasan hasil konsolidasi tim penyusun Arah Kebijakan Internalisasi dan Institucionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi tingkat direktorat	Terselesaikan 100%
5.	Pembahasan hasil konsolidasi tim penyusun Arah Kebijakan Internalisasi dan Institucionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi tingkat kedeputan;	Terselesaikan 100%

No.	Tahapan penyusunan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila	Keterangan
6.	Tersusunnya Draft awal Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;	Terselesaikan 100%
7.	Pembahasan hasil konsolidasi tim penyusun Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi antar unit kerja terkait di BPIP;	Terselesaikan 100%
8.	Tersusunnya Draft Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi hasil pembahasan antar unit kerja terkait di BPIP;	Terselesaikan 100%
9.	Pembahasan, tanggapan dan masukan Draft Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi dari unsur pimpinan (Dewan Pengarah dan/atau Dewan Pakar);	Perencanaan 0%
10.	Finalisasi Draft Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Perencanaan 0%

Direktorat Analisis dan Penyelarasan sampai saat ini telah dilakukan 8 tahapan dari 10 tahapan yang direncanakan pada tahun 2024.

Sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar 80 % dengan rincian perhitungan:

$$\frac{\text{Aktivitas hingga TW IV}}{10 \text{ Aktivitas}} \times 100\% = \frac{8 \text{ Aktivitas}}{10 \text{ Aktivitas}} \times 100\% = 80 \%$$

c. Persentase rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti

Pada Tahun Anggaran 2024 Dukungan Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi terhadap capaian IKU tersebut adalah menghasilkan 3 Rekomendasi advokasi PIP terhadap Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial/politik dan komponen masyarakat lainnya serta purnapaskibraka duta

terbagi dalam 3 bidang kajian yakni bidang Polhukam, bidang Ekomarivest, dan bidang PMK. Dalam rangka penyusunan Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila memerlukan 5 tahapan:

- 1) Inventarisasi Masalah dan Kendala PIP;
- 2) Perumusan Rekomendasi Advokasi PIP;
- 3) Finalisasi Rekomendasi Advokasi PIP;
- 4) Penyerahan dan Penetapan hasil kajian; dan
- 5) Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Rekomendasi Advokasi PIP.

Ketiga rekomendasi memiliki pola yang serupa. Dalam setiap bidang, target berupa satu rekomendasi yang harus disampaikan dan/atau dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau organisasi lain yang relevan. Selain itu, komponen masyarakat yang terlibat dalam rekomendasi ini juga mencakup organisasi sosial, politik, serta purnapaskibraka. Persentase yang tertera dalam kolom capaian menunjukkan sejauh mana dokumen rekomendasi tersebut telah disusun, direspon dan/atau ditindaklanjuti. Berikut adalah proses dari hasil yang dicapai pada tahun 2024:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{3 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{(100\%+100\%+100\%)}{3 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{300\%}{3 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 100 \% \end{aligned}$$

Berikut adalah deskripsi mendetail mengenai tabel persentase yang menunjukkan progres dokumen rekomendasi Direktorat Advokasi:

- a) Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)

Kinerja dalam bidang Polhukam dengan fokus pada penyusunan, respon dan/atau tindak lanjut rekomendasi advokasi PIP. Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden dan ditembuskan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial/politik, serta komponen masyarakat lain yang terkait.

Rekomendasi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab BPIP dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap dijalankan dan diterapkan dalam berbagai aspek politik, hukum, dan keamanan. PIP dalam bidang ini berusaha mencakup berbagai hal, seperti kebijakan pemerintah, peran lembaga politik, penerapan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, hingga aspek keamanan yang diharapkan senantiasa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) pada tahun 2024 adalah sebesar:

$$\frac{\text{tahapan hingga TW IV}}{(1 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% \\ = \frac{5}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian 100% dalam Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Pemerintah untuk Mengatasi Perundungan dan Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas, Pelajar, dan Mahasiswa

Perundungan dan kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang semakin mendesak untuk ditangani, terutama karena dampaknya yang

serius terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pelajar, dan mahasiswa. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, pemerintah perlu merancang kebijakan komprehensif dengan pendekatan holistik yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil:

- Memperkuat Kerangka Regulasi dan Kebijakan
 - Meningkatkan Kapasitas Penegak Hukum dan Aparatur Negara
 - Meningkatkan Layanan Perlindungan dan Dukungan bagi Korban
 - Memperkuat Pengawasan dan Evaluasi
 - Memberikan Insentif untuk Menciptakan Lingkungan Inklusif
2. Rekomendasi Pemerintah untuk Mengatasi Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Kerapuhan etika penyelenggara negara menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks Pemilu 2024, Pilkada serentak, dan isu-isu terkait tata kelola pemerintahan, penting bagi pemerintah untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas guna menjaga legitimasi demokrasi. Berikut adalah rekomendasi strategis berdasarkan dinamika terkini:

- Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi

- Reformasi Tata Kelola Mahkamah Konstitusi (MK)
- Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
- Penguatan Pendidikan Politik dan Etika Penyelenggara Negara
- Penguatan Sanksi terhadap Pelanggaran Etika
- Wacana Pembentukan Mahkamah Etik di Indonesia serta Peran Strategis BPPI dalam Menjaga Etika dan Moral Penyelenggara Negara.

b) Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Sama halnya dengan bidang Polhukam, target dalam bidang PMK ini juga berupa penyusunan satu dokumen rekomendasi advokasi kepada Presiden yang ditembuskan kepada berbagai lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial/politik, serta komponen masyarakat lainnya. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Bidang PMK menekankan pentingnya pembangunan manusia yang berkarakter Pancasila, yang mencakup pendidikan, kesehatan, serta kebudayaan. Advokasi PIP dalam bidang ini bisa mencakup rekomendasi tentang kebijakan pendidikan karakter, program peningkatan kesejahteraan, serta pelestarian budaya yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Rekomendasi yang diberikan kemungkinan berhubungan dengan upaya untuk mengintegrasikan Pancasila dalam sistem pendidikan, memperkuat peran lembaga kebudayaan, serta

mengembangkan program-program yang mendukung kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada tahun 2024 adalah sebesar:

$$\frac{\text{tahapan hingga TW III}}{(1 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$
$$= \frac{5}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian untuk bidang ini mencapai Persentase 100% ini menunjukkan bahwa dari target penyusunan satu dokumen rekomendasi. Oleh karena itu, kami menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyusunan Regulasi Nasional tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan Seksual Berbasis Pancasila

Regulasi nasional yang kuat diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani kasus perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Regulasi ini harus mencakup pedoman teknis untuk deteksi dini, intervensi, dan rehabilitasi bagi korban maupun pelaku; integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan karakter; serta kewajiban lembaga pendidikan untuk memiliki mekanisme pelaporan kasus yang aman dan rahasia, sekaligus memberikan perlindungan memadai kepada korban. Dengan pendekatan holistik, regulasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang

lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebijakan di Sektor Pendidikan

Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan menjadi langkah kunci untuk memastikan nilai-nilai Pancasila diimplementasikan secara konsisten di lingkungan pendidikan. Pelatihan intensif harus melibatkan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan melalui modul berbasis nilai Pancasila yang relevan dengan tantangan lokal, melatih mereka menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan, serta memberikan keterampilan teknis dalam menangani kasus secara profesional dan sensitif. Dengan pendekatan ini, tenaga pendidikan akan memiliki kapasitas untuk mencegah perundungan serta memberikan intervensi yang sesuai dan bermartabat.

3. Penguatan Program Advokasi Berbasis Sekolah dan Komunitas

Sekolah dan komunitas menjadi tempat utama untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan dan penanganan perundungan serta kekerasan seksual. Direkomendasikan agar program seperti "*Advokasi Goes to School*" diperluas secara nasional dengan melibatkan komunitas lokal, termasuk orang tua siswa dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini dapat ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi interaktif seperti diskusi kelompok, simulasi kasus, dan pelibatan siswa sebagai agen perubahan, serta pengembangan program bimbingan konseling berbasis Pancasila untuk

mendukung pemulihan korban dan pengawasan pelaku.

4. Pendekatan Berbasis Data untuk Evaluasi Program

Pemerintah perlu membangun sistem evaluasi berbasis data yang mencakup survei nasional untuk memetakan persepsi dan prevalensi kasus perundungan serta kekerasan seksual. Data ini digunakan untuk menyusun strategi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, mengevaluasi efektivitas program advokasi yang telah dilakukan, dan merancang intervensi berbasis bukti yang lebih relevan dan efektif.

5. Kolaborasi Multi-Stakeholder untuk Meningkatkan Efektivitas Program

Sinergi lintas sektor sangat penting untuk mendukung implementasi program ini. Diperlukan kolaborasi dengan kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan regulasi diterapkan secara efektif; pelibatan organisasi masyarakat dalam advokasi, pendampingan korban, dan sosialisasi nilai Pancasila; serta partisipasi sektor swasta dalam pendanaan program advokasi dan penyediaan fasilitas pendidikan yang aman.

6. Peningkatan Kesadaran Publik melalui Kampanye Nasional

Kampanye nasional yang kreatif dan inklusif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menangani perundungan serta kekerasan seksual. Kampanye ini harus menonjolkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan perilaku yang beradab,

menggunakan pendekatan media massa dan digital yang menarik bagi siswa, orang tua, dan masyarakat umum, serta mengedepankan pesan inklusif yang mendorong kolaborasi semua elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan bebas kekerasan.

Melalui rekomendasi ini, diharapkan lingkungan pendidikan di Indonesia menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung pengembangan karakter generasi muda. Nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menghasilkan generasi bangsa yang bermoral, berakarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Direktorat Advokasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengusulkan agar langkah-langkah ini menjadi bagian integral dari kebijakan strategis nasional dalam pembangunan manusia dan kebudayaan yang berorientasi pada keadilan, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap nilai luhur Pancasila.

c) Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Ekonomi Maritim dan Investasi

Bidang ini mencakup advokasi terkait penerapan Pancasila dalam sektor ekonomi, khususnya yang berhubungan dengan kelautan dan maritim. Rekomendasi advokasi PIP yang diberikan kemungkinan besar terkait dengan kebijakan maritim, kesejahteraan masyarakat pesisir, perlindungan sumber daya alam laut, serta pengembangan ekonomi berbasis maritim yang berkelanjutan.

Bidang ekonomi maritim dan Investasi sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim yang sangat besar. Implementasi advokasi PIP di sektor ini tidak hanya akan memperkuat sektor ekonomi, tetapi

juga akan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah laut Indonesia. Dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari rekomendasi ini mungkin mencakup kebijakan perlindungan lingkungan laut, panduan pembangunan ekonomi berbasis kelautan, atau program kesejahteraan untuk masyarakat pesisir.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Bidang Ekonomi Maritim dan Investasi (Maninvest) pada tahun 2024 2024 adalah sebesar:

$$\frac{5}{(1 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$
$$= \frac{5}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 100 \%$$

Dalam hal ini, 100% Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Bidang Ekonomi Maritim dan Investasi (Maninvest) capaiannya merujuk pada keberhasilan tim dalam menyelesaikan seluruh tahapan ini dan menghasilkan dokumen rekomendasi yang siap untuk dipresentasikan kepada pengambil keputusan dan implementator kebijakan. Capaian dalam hal implementasi atau penerapan rekomendasi tersebut dalam praktik, maka progres atau pencapaiannya bisa jadi lebih dinamis dan perlu pengukuran atau evaluasi lebih lanjut setelah penerapan kebijakan.

Secara nomenklatur, memang pada tahun ini pembagian bidang adalah ekonomi, maritim dan investasi namun dalam proses aktualiasi dan penyesuaian problematika di Masyarakat yang menjadi isu dan di respon oleh direktorat advokasi maka kegiatan bersifat lebih *up to date* yaitu dalam hal ini mencakup penanganan kekerasan seksual, bullying, Respon Fatwa MUI Salam keagamaan, dan Diskusi Kelompok Terpumpun

Kerapuhan Etika Penyelenggara dalam Berbangsa dan Bernegara di Jakarta. Secara penjabaran poin, rekomendasi terdiri dari:

Tabel 2. 17. Rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti

No.	Judul Kajian Rekomendasi Advokasi Penyelesaian Dan Penanggulangan Masalah	Keterangan
1.	Penanganan masalah dan kendala tindak kekerasan atau bullying di lingkungan Pendidikan	Sudah selesai tahap rekomendasi
2.	Penanganan Masalah dan Kendala dalam bidang Keagamaan	Sudah selesai tahap rekomendasi
3.	Advokasi Goes To School	Sudah selesai tahap rekomendasi
4.	Pendampingan terhadap kelompok rentan dan masyarakat adat	Sudah selesai tahap rekomendasi
5.	Advokasi PIP pada Purnapaskibraka	Sudah selesai tahap rekomendasi
6.	Advokasi PIP diwilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar)	Sudah selesai tahap rekomendasi
7.	Diskusi Kelompok Terpumpun Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegaea	Sudah selesai tahap rekomendasi

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 18. Aktivitas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum Nasional terhadap Nilai- Nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi Capaian Kinerja, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 Kedeputan Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi (Jakarta, tanggal 14 Oktober 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Koordinasi dan Kerja Sama Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP RI terkait Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 17 Oktober 2024).	
3.	Rapat Evaluasi dan Penguatan Capaian Kinerja Direktorat Analisis dan Penyelarasan Tahun 2024 di BPIP (Jakarta, tanggal 24 Oktober 2024).	
4.	Audiensi DPRD Kabupaten Garut dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan di BPIP (Jakarta, tanggal 25 Oktober 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Kegiatan Penyelarasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Banten (Banten, tanggal 29 Oktober s.d. 1 November 2024).	
6.	Audiensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dalam rangka kunjungan kerja terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daeah Kota Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di BPIP (Jakarta, tanggal 14 November 2024).	
7.	Audiensi DPRD Kabupaten Cianjur dalam rangka konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daeah Kabupaten Cianjur tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 18 November 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Audiensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang dalam rangka konsultasi terkait Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 19 November 2024).	
9.	Kegiatan Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Garut (Jawa barat, 19 s.d. 22 November 2024).	
10.	Audiensi DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam rangka konsultasi terkait Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 22 November 2024).	
11.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 3 Desember 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Kegiatan Tindak Lanjut Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Cianjur (Jawa Barat, tanggal 9 s.d. 11 Desember 2024).	
13.	Kegiatan Penyusunan Laporan Triwulan IV Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Jakarta, tanggal 11 Desember 2024).	
14.	Kegiatan Penyusunan Draft Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi (Jakarta, tanggal 13 Desember 2024).	

Tabel 2. 19. Aktivitas Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi PIP

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Advokasi PIP dalam Rangka Penguatan Etika Penyelenggara Negara di Universitas Tajungpura (Pontianak, tanggal 1 s.d. 4 Oktober 2024)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 21 November 2024)	
3.	Rapat Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Konteks Menjaga Toleransi Keberagaman dan Kerukunan Umat Beragama (Jakarta, tanggal 11 Desember 2024)	
4.	Rapat Perencanaan Pembentukan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Advokasi (Jakarta, tanggal 13 Desember 2024)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat Penyusunan Pembentukan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Advokasi (Jakarta, tanggal 16 Desember 2024)	
6.	Rapat Penyusunan Pembentukan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Advokasi (Jakarta, tanggal 18 Desember 2024)	
7.	Rapat Penyusunan Rekomendasi Advokasi dan Penanganan Masalah dan Kendala dalam Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 20 Desember 2024)	

B.2. Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila

Indikator Keberhasilan:

Target jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti pada Tahun 2024 adalah tindak lanjut 20 rekomendasi.

Pada Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 115%, yaitu tercapai 23 Rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti yang masih dalam tahap inisiasi dan kajian. Dokumen kajian dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rekomendasi penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi}}{20 \text{ Rekomendasi penyelarasan rancangan rancangan kebijakan dan regulasi}} \\
 &= \frac{23 \text{ Rekomendasi penyelasrasn}}{20 \text{ Rekomendasi penyelarasan rancangan rancangan kebijakan dan regulasi}} \\
 &= 115\%
 \end{aligned}$$

Tabel 2. 20. Rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti Ditindaklanjuti

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat;	Selesai diselaraskan 100%
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;	Selesai diselaraskan 100%
3.	Rancangan Gubernur Provinsi Banten tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya bagi Masyarakat Tidak Mampu;	Selesai diselaraskan 100%
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;	Selesai diselaraskan 100%

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
5.	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Dan Perikanan;	Selesai diselaraskan 100%
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
7.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;	Selesai diselaraskan 100%
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
10.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
11.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
12.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
13.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik;	Selesai diselaraskan 100%
14.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu;	Selesai diselaraskan 100%
15.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pembinaan Ideologi Pancasila;	Selesai diselaraskan 100%
16.	Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan berbasis gender dalam penanggulangan bencana;	Selesai diselaraskan 100%
17.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
18.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
19.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta Tahun 2023-2043;	Selesai diselaraskan 100%

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
20.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;	Selesai diselaraskan 100%
21.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Perlindungan Produk Lokal;	Selesai diselaraskan 100%
22.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan	Selesai diselaraskan 100%
23.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Kawasan Tanpa Rokok.	Selesai diselaraskan 100%

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan:

Pelaksanaan Internalisasi, Institusionalisasi Pancasila dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 21. Indikator keluaran Rekomendasi atas Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang Ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila	3	3	100% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2024 yaitu:

Pada Tahun Anggaran 2024 Dukungan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi terhadap capaian IKU tersebut adalah menghasilkan 3 Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila terbagi dalam 3 bidang kajian yakni bidang Polhukam, bidang Ekomarinvest, dan bidang PMK.

Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila tercapai sebesar 100%. Dimana sampai saat ini telah selesai dikaji adalah:

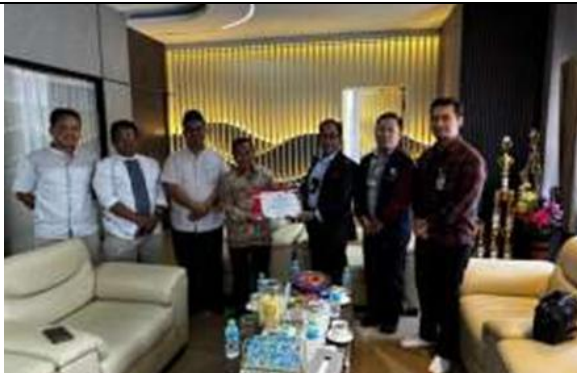
Tabel 2. 22. Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila

No.	Judul Kajian Rekomendasi Peraturan Eksisting	Keterangan
1.	Peraturan DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Yogyakarta	Selesai dikaji 100%
2.	Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tasikmalaya	Selesai dikaji 100%
3.	UU Perimbangan Pusat dan Daerah	Selesai dikaji 100%
4.	Rekomendasi UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Selesai dikaji 100%
5.	Rekomendasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah	Selesai dikaji 100%
6.	Peraturan Daerah Kab. Bulukumba No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Selesai dikaji 100%
7.	Rekomendasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Susila di Kota Medan	Selesai dikaji 100%
8.	Penyusunan Kajian terhadap Rekomendasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan	Selesai dikaji 100%
9.	Rekomendasi Terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai	Selesai dikaji 100%
10.	Rekomendasi Terhadap Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Persyaratan Tambahan Kenaikan Kelas pada Jenjang Pendidikan Dasar	Selesai dikaji 100%
11.	Rekomendasi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan	Selesai dikaji 100%

No.	Judul Kajian Rekomendasi Peraturan Eksisting	Keterangan
12	Peraturan Bupati Purwakarta No. 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter	Selesai dikaji 100%
13	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Selesai dikaji 100%
14	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.	Selesai dikaji 100%

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 23. Aktivitas Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Bedah buku jendela sejarah Pancasila di Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung, 21 September 2024)	
2.	Kegiatan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, 6 s.d. 8 November 2024)	
3.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pendalaman Materi Tahap Akhir Hasil Identifikasi dan Verifikasi Terhadap Kebijakan dan Regulasi Yang Dianggap Bertentangan Dengan Nilai Pancasila Tahun 2024 (Jakarta, 2 s.d. 5 Desember 2024)	

C. Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagai lembaga PIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya penyelenggaraan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP, diantaranya adalah:

1. Intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
2. Kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
3. Masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
4. Rendahnya tingkat ke dalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
5. Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

Berdasarkan urgensi atas tugas yang diemban oleh Deputy Bidang Pengkajian dan Materi, maka Sasaran Program Deputy Bidang Pengkajian dan Materi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 adalah berupa terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP yang kemudian dapat diukur capaian kinerjanya melalui indikator kinerja utama berupa “persentase kajian PIP yang dapat dimanfaatkan”.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP adalah:

Tabel 2. 24. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	Ket
Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	100%	100%	 100%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

C.1. Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan pada Tahun 2024 adalah 100%.

Pada Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 100% $(100\%+100\%+100\%)/3$ (rata-rata capaian hasil Kajian Kebijakan PIP, Kajian Materi PIP, dan Kajian Implementasi PIP).

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan:

- Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan PIP;
- Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP;
- Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 25. Indikator Keluaran Persentase Hasil Kajian PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN		KET
Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis PIP	2	2	100% (Rekomendasi)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN		KET
Persentase NSPK tentang standardisasi materi, bahan ajar dan metode PIP yang ditindaklanjuti	NSPK Materi, Bahan Ajar dan Metode PIP	1	1	100% (NSPK)
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi PIP	1	1	100% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2024 yaitu:

1. Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase rekomendasi kebijakan PIP yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) rekomendasi kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila. Capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\
 &= \frac{(100\% + 100\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\
 &= \frac{200\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 100\%
 \end{aligned}$$

Sebagai catatan, rekomendasi yang telah ditetapkan sebagai *output* Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP adalah dokumen rekomendasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2024-2029 dan rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.

Berikut merupakan detail capaian kinerja Direktorat Pengkajian

Kebijakan PIP pada Tahun 2024, dengan mempertimbangkan kalender rencana kerja Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP yang telah disusun.

1) Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila

Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kajian kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila berupa dokumen Arah Kebijakan PIP, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tahun 2024, kajian kebijakan strategis PIP berfokus pada penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan PIP 2025-2029 untuk menindaklanjuti dokumen Arah Kebijakan PIP yang telah ditetapkan menjadi peraturan dalam bentuk Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2024.

Pada titik ini, penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan PIP 2025-2029 difokuskan untuk menjaring lebih banyak partisipasi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan program atau kegiatan yang mendukung Peta Jalan PIP 2025-2029. Melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan, pada triwulan IV Tahun 2024 telah tersusun kertas kerja yang memuat 242 isian program/kebijakan dari kementerian/lembaga (K/L) dan 50 isian program/kebijakan dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan lima isu Arah Kebijakan PIP sebagai berikut:

No.	Isu Strategis Arah Kebijakan PIP	Usulan Program PIP K/L	Usulan Program PIP Pemprov
1	Penyelenggaraan Negara	64	2
2	Kebinekaan, Keteladanan, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	49	10
3	Sistem Pendidikan serta IPTEK	15	3
4	Sistem Politik Demokrasi dan Hubungan Luar Negeri	20	1

No.	Isu Strategis Arah Kebijakan PIP	Usulan Program PIP K/L	Usulan Program PIP Pemprov
5	Sistem Ekonomi	94	34
Total		242	50

Apabila dirinci, kementerian/lembaga yang telah berpartisipasi dalam Peta Jalan PIP pada tahap tersebut adalah 41, sementara itu enam (6) kementerian/lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Komisi Pemberantasan Korupsi, belum. Ini menunjukkan bahwa dari total 47 K/L yang ditargetkan, 87,2% nya (41) telah berpartisipasi.

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA
1.	Mahkamah Agung
2.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Hukum
3.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4.	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5.	Sekretariat Kabinet
6.	Kementerian Dalam Negeri
7.	Kementerian Luar Negeri
8.	Kementerian Pertahanan
9.	Kementerian Agama
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11.	Kementerian Kesehatan
12.	Kementerian Sosial
13.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14.	Kementerian Ketenagakerjaan
15.	Kementerian Perindustrian
16.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
17.	Kementerian Pertanian
18.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
20.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
21.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA
22.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi
23.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
24.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
25.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
26.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
27.	Komisi Pemilihan Umum
28.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
29.	Ombudsman
30.	Arsip Nasional Republik Indonesia
31.	Badan Kepegawaian Nasional
32.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
35.	Dewan Ketahanan Nasional
36.	Lembaga Administrasi Negara
37.	Lembaga Ketahanan Nasional
38.	Perpustakaan Nasional
39.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
40.	Kementerian Perdagangan
41.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan penyusunan yang telah dilakukan, pada triwulan tahun anggaran 2024 telah dicapai beberapa *output* terkait dengan dokumen Peta Jalan PIP, yaitu:

1. Lampiran Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Rancangan Naskah Urgensi Peraturan Presiden Tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025-2029;
3. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP TA 2025-2029;
4. Kertas Kerja Program/Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila lingkup Kementerian Lembaga dan Pemerintah

Daerah Provinsi; dan

5. Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025-2029 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi.

Maka dengan demikian, capaian *output* penyusunan Peta Jalan PIP pada triwulan IV telah mencapai target 100%. Namun demikian, pergantian masa pemerintahan baru 2025-2029 yang terjadi pada Oktober 2024 membuat proses penyusunan Peta Jalan PIP harus mengalami penyesuaian. Ini disebabkan karena banyak kementerian/lembaga yang telah mengisi usulan program Peta Jalan PIP, berubah nomenklatur kelembagaannya dan dibentuknya kementerian/lembaga baru. Dengan demikian, kami menargetkan proses penyesuaian tersebut dilaksanakan pada periode Semester I (Januari-Juli 2025) dan merekomendasikan kepada Presiden RI kebijakan dalam pelaksanaan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025-2029 bagi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi.

- 2) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP dalam hal perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pada tahun 2024 Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP melakukan beberapa kajian dan perumusan kebijakan PIP yaitu:

- a) Kajian Naskah Autentik Risalah Sidang BPUPK dan PPKI

Dalam rangka memperkuat argumentasi dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan narasi mengenai sejarah kelahiran, perumusan, hingga pengesahan Pancasila, maka perlu merujuk pada

naskah-naskah otentik. Berkenaan dengan urgensi tersebut, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP melalui Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila memandang penting untuk melaksanakan penyusunan kajian naskah autentik mengenai rangkaian kronologis sejarah kelahiran, perumusan, hingga pengesahan Pancasila yang tergambar dalam arsip-arsip sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) dan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Penyusunan kajian naskah autentik risalah sidang BPUPK dan PPKI pada dasarnya telah dimulai pada tahun 2023 melalui proses kurasi (pengumpulan dan identifikasi) naskah-naskah otentik yang didapatkan dari *National Archives of the Netherlands* dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Menindaklanjuti hasil kerja tahun 2023, pada tahun 2024 dilaksanakan tahap selanjutnya berupa pencermatan lintas dan uji kelayakan naskah dengan melibatkan ANRI dan pakar-pakar sejarah.

Dalam perkembangannya, penyusunan kajian naskah autentik sebagaimana yang dimaksudkan akan menghasilkan 3 seri Naskah Sumber Arsip yang menggambarkan rangkaian kronologis sidang pertama BPUPK (29 Mei s.d. 1 Juni 1945), masa reses dan sidang kedua BPUPK (10 Juli s.d. 17 Juni 1945), serta sidang PPKI (18 Agustus s.d. 22 Agustus). Berkaitan dengan adanya penyesuaian anggaran, berdasarkan arahan pimpinan, naskah sumber arsip yang menjadi fokus penyelesaian dalam tahun 2024 adalah “Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Masa

Sidang 29 Mei s.d. 1 Juni 1945". Sementara itu, 2 seri lainnya akan diselesaikan pada tahun anggaran 2025.

Berkaitan dengan penyusunan kajian Naskah Autentik Risalah Sidang BPUPK dan PPKI Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP melaksanakan beberapa tahapan yaitu: 1) Pengumpulan dan proses kurasi Naskah Autentik Risalah Sidang BPUPK dan PPKI; 2) Pencermatan lintas lembaga (*cross check*); 3) Gelar Naskah; 4) Penyerahan dan Penetapan hasil kajian.

Pada periode triwulan IV sebagai tindak lanjut dari capaian pada periode triwulan sebelumnya, tahapan akhir dari proses penyusunan yaitu berupa penyerahan dan penetapan hasil kajian. Sebagai bentuk tindak lanjut dari rancangan final Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP telah melaksanakan penyerahan dan penetapan atas dokumen tersebut kepada unsur pimpinan. Hal tersebut dilakukan melalui proses reviu untuk mendapatkan masukan, saran dan persetujuan dari segenap unsur pimpinan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Berkenaan dengan hal tersebut, pada 14 Oktober 2024 telah dilaksanakan Reviu Naskah Sumber Dasar Negara I Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei S.D. 1 Juni 1945 Bersama Unsur Pimpinan di Jakarta yang dihadiri oleh Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Jabatan Pimpinan Tinggi Madya BPIP; Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Fungsional Madya dan Pelaksana di Lingkungan Deputy Pengkajian

dan Materi BPIP; Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

Dengan terselesaikannya tahapan penyerahan dan penetapan hasil kajian, maka rangkaian penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Masa Sidang 29 Mei s.d. 1 Juni 1945” telah selesai dilaksanakan. Sebagai bagian dari upaya strategis publikasi hasil kajian lebih lanjut kepada masyarakat luas, maka diharapkan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Masa Sidang 29 Mei s.d. 1 Juni 1945” dengan berKerja Sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

- b) Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.

Penyusunan dokumen rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, akan dilaksanakan dalam lima tahap yaitu 1) penyusunan sistematika; 2) pelaksanaan kajian, 3) triangulasi data; 4) finalisasi kajian, dan 5) akseptasi pimpinan. Pada Tahun 2024 ini, hasil rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila telah selesai disusun dan telah diserahkan kepada pimpinan.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila pada Tahun 2024 adalah sebesar:

$$\frac{\text{tahap} \text{an} \text{ h} \text{ing} \text{ga} \text{ TW IV}}{(1 \text{ r} \text{ek} \text{om} \text{end} \text{asi} \times 5 \text{ t} \text{ah} \text{ap} \text{an} \text{ p} \text{en} \text{y} \text{us} \text{un} \text{an})} \times 100\%$$
$$= \frac{5}{5 \text{ t} \text{ah} \text{ap} \text{an} \text{ p} \text{en} \text{y} \text{us} \text{un} \text{an}} \times 100\% = 100 \%$$

3) Penyerapan Pandangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP dalam hal penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat, pada tahun 2024 Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP melakukan beberapa kegiatan yaitu:

- a) Pengelolaan Jurnal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan; dan Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia;

- (1) Pada Triwulan IV Tahun 2024, telah terbit Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volume 4 Nomor 2 Edisi Oktober 2024 dengan jumlah 10 artikel dengan judul-judul artikel sebagai berikut: 1) *Indonesia's Directive Legislation: Balancing with Pancasila Law-Idea*; 2) Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia; 3) Analisis Interkonektivitas antara Nilai-Nilai dan Indikator SDGs dalam Konteks Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Indonesia; 4) *Fostering the Golden Generation 2045: Embedding Pancasila Values in Early Childhood Education*; 5) Pancasila sebagai Pilar dalam Mengatasi *Cyberbullying*; 6) Penguatan Sistem Ketatanegaraan Indonesia berbasis Demokrasi Pancasila melalui Penghidupan Kembali Utusan Golongan; 7) Konsep Kekuasaan menurut Byung-Chul Han dan Sumbangannya dalam Meminimalisir Anomali Kekuasaan di Indonesia; 8)

Challenges of Indonesian Defense Resilience in the Face of Contemporary Technology Advancement: What's Next?; 9) Pancasila sebagai Landasan Kebijakan Transportasi Publik yang Terintegrasi pada Provinsi DKI Jakarta; dan 10) Peran Perempuan melalui Organisasi PKK sebagai Upaya Menghadapi Ancaman Ideologi Radikalisme dan Terorisme.

- (2) Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia merupakan jurnal ilmiah baru yang tugas pengelolaannya dilekatkan pada Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP. Jurnal ini secara rutin akan terbit 2 kali dalam satu tahun, yaitu edisi November dan Mei. Sebagai awal, pada Triwulan IV Tahun 2024 telah terbit Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Volume 1 Nomor 1 Edisi November 2024. Pada terbitan Volume I Nomor I, Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia menerbitkan 5 Artikel Jurnal dengan judul sebagai berikut: 1) Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Abad Ke-21; 2) Pengaruh Pancasila dan Hukum Islam dalam Perdamaian Dunia; 3) Mengajarkan Pancasila secara Dialogis pada Generasi Muda; 4) Trisakti, Pancasila dan Pembangunan Karakter Bangsa; dan 5) *Pancasila Philosophy as a Basis for Strengthening Religious Moderation in Indonesia*.

b) Pengelolaan Kajian Penyerapan Pandangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat terkait Pembinaan Ideologi Pancasila

Kajian penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penyusunan rekomendasi Kebijakan. Pada periode Triwulan IV, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP mendapatkan tugas dari pimpinan untuk menyelenggarakan salah satu rangkaian *Focus Group Discussion (FGD)* dengan Tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” pada 30 Oktober sampai dengan 3 November 2024 yang bertempat di Universitas Sumatera Utara (USU). Kegiatan ini dilaksanakan dengan format diskusi kelompok terpumpun (DKT) dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang berasal dari kalangan pakar, akademisi, pengamat serta praktisi untuk membahas isu yang berkaitan dengan memperkuat etika penyelenggara negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui keteladanan elit politik.

Adapun *output* dari kegiatan tersebut adalah Buku Bunga Rampai DKT Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dan Rekomendasi Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

2. Persentase NSPK tentang standardisasi materi, bahan ajar dan metode PIP yang ditindaklanjuti

Dalam rangka pelaksanaan penyediaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) standardisasi materi, bahan ajar dan

metode Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase NSPK tentang standarisasi materi, bahan ajar dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan rincian *output* yaitu satu (1) NSPK Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila.

Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2024 ini telah menyelesaikan penyusunan standar materi PIP bagi Paskibraka dan menyelesaikan materi penunjang PIP yaitu Buku Hermeneutika Karya Sukarno Selama Pengasingan di Ende. Telah diterbitkan juga Keputusan Kepala BPIP untuk materi PIP bagi Hakim, ASN dan TNI sehingga target *output* Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila berupa 1 NSPK telah tercapai.

Penyusunan NSPK Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan melalui delapan (8) tahapan yaitu:

- 1) Identifikasi permasalahan/isu publik dan pengumpulan data primer/sekunder dalam penyusunan standar materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan kelompok komponen masyarakat;
- 2) Perumusan sistematika standar materi, bahan ajar dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) Perumusan (NSPK) kebijakan strategis dan program teknis dalam penyusunan standar materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila;
- 4) Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan terkait standar materi, bahan ajar dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 5) Melakukan uji petik implementasi atas hasil perumusan standar materi, bahan ajar dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 6) Perancangan naskah NSPK (Legalisasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Pemantauan dan evaluasi penyusunan/ perumusan standar

materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila; dan

- 8) Penyusunan pelaporan/rekomendasi untuk mendukung keberlanjutan implementasi standar materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila.

Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Capaian Tahapan}}{(3 \text{ komponen kegiatan})} \times 100\% \\ &= \frac{100\%+100\%+100\%}{3 \text{ komponen kegiatan}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Berikut merupakan kegiatan dalam rangka menghasilkan capaian kinerja Direktorat Pengkajian Materi PIP pada Tahun 2024 dengan mempertimbangkan kalender kerja yang telah disusun.

- a) Penyusunan Standar materi PIP bagi Calon anggota Paskibraka sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Tahapan Penyusunan}}{(8 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% \\ &= \frac{8}{8 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- b) Penyusunan Standar Materi PIP Diplomat telah sampai pada tahap 8 dari 8 tahapan, sehingga dihasilkan Capaian Kinerja sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Tahapan Penyusunan}}{(8 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% \\ &= \frac{8}{8 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- c) Penyusunan Materi Pendukung PIP bagi Komponen Masyarakat Lainnya, yakni Penyusunan Buku Hermeneutika

Karya Sukarno Selama Masa Pengasingan di Ende telah sampai pada tahap ke enam dari 8 tahapan, sehingga dihasilkan Capaian Kinerja sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Tahapan Penyusunan}}{(8 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% \\ &= \frac{8}{8 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

d) Keputusan Kepala BPIP tentang:

- a. Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi ASN yaitu Keputusan Kepala BPIP Nomor 55 Tahun 2024
- b. Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yaitu Keputusan Kepala BPIP Nomor 56 Tahun 2024
- c. Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim yaitu Keputusan Kepala BPIP Nomor 57 Tahun 2024

e) Materi Sosialisasi Tidak Berlakunya TAP MPRS No XXXIII/MPRS/1967 terhadap pemulihan nama baik Dr (H.C.) Ir. Sukarno sebagai Tokoh Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia

3. Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti

Dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan rincian *output* yaitu satu (1) rekomendasi hasil kajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam rangka mencapai *output* tersebut, dilakukan 5 (lima) tahapan dengan rincian aktivitas/tahapan, yaitu:

1. Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

2. Strategi Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila
3. Koordinasi Implementasi dan Pengkajian Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila dan Value Assessment
5. Diseminasi Hasil Pengkajian

Pada tahun 2024, penyusunan rekomendasi kajian implementasi telah melalui 5 (lima) aktivitas dengan progress/persentase realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan	Persentase Realisasi Kegiatan
Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	100%
Strategi Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	100%
Koordinasi Implementasi dan Pengkajian Pembinaan Ideologi Pancasila	100%
Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila dan <i>Value Assessment</i>	100%
Diseminasi Hasil Pengkajian	100%

$$\begin{aligned} & \frac{\text{capaian aktivitas}}{1 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ aktivitas}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{5 \text{ aktivitas penyusunan}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2024, Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila akan menghasilkan dokumen berupa:

- 1) Dokumen hasil kajian Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada satuan Pendidikan di bawah Koordinasi Kemenag RI pada Empat lokus (Provinsi DIY, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur);
- 2) Naskah Awal Kajian identifikasi nilai ideologi Pancasila pada kebijakan Pendidikan nasional (Profil Pelajar Pancasila, P5 dan Zonasi);

3) Kajian literasi: Nilai Ideologi Pancasila dalam Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi dengan judul “Naskah Demokrasi Berdasarkan Pancasila” (Kajian Literasi)

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah:

a. Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan PIP:

Tabel 2. 27. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Konsolidasi Persiapan Penyusunan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025-2029 Bagi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan Publikasi Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volume 4 Nomor 2 (Jakarta, tanggal 1 s.d. 4 Oktober 2024)	
2.	Rapat Pembahasan Matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 Bagi Kementerian/Lembaga (Jakarta, tanggal 11 Oktober 2024)	
3.	Reviu Naskah Sumber Dasar Negara I Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei S.D. 1 Juni 1945 Bersama Unsur Pimpinan (Jakarta, tanggal 13 s.d. 16 Oktober 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terpumpun Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara Dalam Berbangsa Dan Bernegara: Keteladanan Elit Politik (Medan, tanggal 21 s.d. 23 Oktober 2024)	
5.	Rapat Persiapan Kegiatan DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara lokus Medan (Jakarta, tanggal 25 Oktober 2024)	
6.	Diskusi Kelompok Terpumpun Dengan Tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara” (Medan, tanggal 30 Oktober s.d. 3 November 2024)	
7.	Rapat Kunjungan dan Diskusi Universitas Banten Jaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Penguatan Materi Pancasila (Jakarta, tanggal 28 November 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Perencanaan Rekomendasi Tahun 2025 dan <i>Capacity Building</i> Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Jakarta, tanggal 16 s.d. 18 Desember 2024)	

b. Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP;

Tabel 2. 28. Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	DKT Perancangan Penulisan Materi Filsafat Keilmuan Pancasila dan penyempurnaan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Diplomat (Jakarta, tanggal 21 s.d. 25 Oktober 2024)	
2.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Tindak Lanjut Tidak Berlakunya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 terhadap pemulihan nama baik Dr (H.C.) Ir. Sukarno sebagai Tokoh Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia (Jakarta, tanggal 18 s.d. 20 November 2024)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Diskusi Kelompok Terpusat (DKT) Review Draft Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Diplomat (Jakarta, tanggal 5 Desember 2024)	

c. Pelaksanaan Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP.

Tabel 2. 29. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Monitoring Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (Jawa Barat, tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2024)	
2.	Kegiatan Monitoring Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (Nusa Tenggara Barat, tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Kegiatan rapat dalam kantor pembahasan naskah rekomendasi Identifikasi dan Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Kebijakan Anti Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Formal (Jakarta, tanggal 5 s.d. 6 November 2024)	
4.	Kegiatan rapat dalam kantor pembahasan naskah rekomendasi Identifikasi dan Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Kebijakan Anti Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Formal (Jakarta, tanggal 8 November 2024)	
5.	Kegiatan Rapat Dalam Kantor Pembahasan Naskah Rekomendasi Strategi Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Pada Satuan Pendidikan Di bawah Koordinasi Kementerian Agama (Jakarta, tanggal 13 November 2024)	
6.	Kegiatan rapat dalam kantor hasil kajian identifikasi nilai ideologi Pancasila pada kebijakan Pendidikan Nasional (Profil Pelajar Pancasila, P5 dan Zonasi). dan Naskah Rekomendasi Strategi Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Pada Satuan Pendidikan Di bawah Koordinasi Kementerian Agama (Jakarta, tanggal 22 November 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Kegiatan rapat dalam kantor pembahasan naskah hasil kajian identifikasi nilai ideologi Pancasila pada kebijakan Pendidikan Nasional (Profil Pelajar Pancasila, P5 dan Zonasi) dan Naskah Rekomendasi Strategi Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Pada Satuan Pendidikan Di bawah Koordinasi Kementerian Agama (Jakarta, tanggal 26 November 2024)	
8.	Rapat penyusunan Naskah Rekomendasi (Jakarta, tanggal 10 Desember 2024)	

D. Diklat PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal

Pengembangan kebijakan/regulasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya Sistem Nasional Pendidikan dan PIP yang terstruktur, sistemik, dan masif sehingga perlu dirumuskan pengaturan yang komprehensif. Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan PIP merupakan implementasi dari Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan. Perumusan program teknis dilakukan untuk memastikan advokasi kebijakan strategis yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni terwujudnya pembumian Pancasila sebagai dasar negara sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kehidupan bermasyarakat. Program teknis tersebut perlu dielaborasi dalam program jangka panjang Sistem Nasional Diklat PIP dalam rangka mendukung terwujudnya pembumian Pancasila bagi aparatur negara dan seluruh komponen bangsa menuju sumber daya manusia unggul pada saat Indonesia Emas Tahun 2045. Sedangkan program teknis jangka menengah, jangka pendek, serta tahunan dielaborasi secara komprehensif dan cascading dimana secara agregat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang tersebut.

Sumber daya manusia Indonesia Emas tahun 2045 diharapkan mempunyai kecerdasan yang lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain untuk mendukung Indonesia sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban dunia. Pembangunan SDM unggul tersebut perlu dilakukan secara paripurna, tidak hanya membangun kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga membangun iman dan taqwa serta budaya sehingga menjadi insan-insan pembangunan yang religius, menguasai iptek, serta berbudaya luhur.

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal adalah:

Tabel 2. 30. Indikator Keluaran Program Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	KET
Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan	100%	266%	 266%
Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	100%	128,5%	 128,5%
Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi	100%	57,13%	 57,13%
Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	60%	61,5%	 102,5%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

D.1. Persentase hasil perencanaan, standardisasi kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Target persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan pada Tahun 2024 adalah 100%.

Pada Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 266% $((100\%+286\%+230\%)/3)$ (rata-rata capaian hasil indikator kinerja kegiatan perencanaan dan pelatihan PIP) dengan capaian berupa penyusunan kesepakatan perencanaan Diklat PIP.

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 31. Indikator Keluaran Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN		KET
Persentase rekomendasi perencanaan dan pengembangan Diklat PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP (PN)	3	4	133% (Rekomendasi)
Persentase Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat PIP yang Bersertifikat	Sertikasi Pendidik dan Pelatih Diklat PIP (PN)	200	572	286% (orang)
Persentase NSPK Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti	Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PN))	10	23	230% (Lembaga)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh yaitu:

a. Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan. Pada Tahun 2024 rekomendasi Kebijakan Strategis dan Program Teknis Diklat PIP yang telah ditindaklanjuti telah rampung 4 rekomendasi atau sebesar 133% dari target indikator kinerja kegiatan dengan rincian:

1. Revisi Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila telah disetujui oleh Kepala BPIP melalui Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Revisi Keputusan Kepala BPIP Nomor 67 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila telah disetujui Kepala BPIP menjadi Keputusan Kepala BPIP Nomor 17 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila berisikan prosedur pelaksanaan sertifikasi Pengajar Diklat PIP;
3. Juknis Diseminasi Diklat PIP yang terdiri dari petunjuk pelaksanaan diseminasi pengelolaan Diklat PIP, materi kebijakan Diklat PIP, materi pengantar perencanaan Diklat PIP, dan materi penguatan pengelola Diklat PIP yang ditanda tangani Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Diklat.
4. Keputusan Kepala BPIP Nomor 61 Tahun 2024 tentang Cetak Biru Diklat PIP.

Pedoman penilaian (scoring) capaian rincian *output* persentase rekomendasi perencanaan dan pengembangan Diklat PIP yang ditindaklanjuti, yaitu:

Score	Kriteria Score	Keterangan
0%	Fisik: Belum dilaksanakan	Belum terlaksana

Score	Kriteria Score	Keterangan
20%	Fisik: 1. DKT Revisi Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan akademisi. 2. DKT Revisi Keputusan Kepala BPIP Nomor 67 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan akademisi; dan 3. DKT Rancangan Juknis Desiminasi Pengelolaan Diklat PIP dengan akademisi.	Telah dilaksanakan
40%	Fisik: 1. DKT Revisi Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan K/L/Pemda. 2. DKT Revisi Keputusan Kepala BPIP Nomor 67 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan K/L/Pemda; dan 3. DKT Rancangan Juknis Desiminasi Pengelolaan Diklat PIP dengan K/L/Pemda.	Telah dilaksanakan
60%	Fisik: 1. DKT Revisi Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan internal BPIP. 2. DKT Revisi Keputusan Kepala BPIP Nomor 67 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan internal BPIP; dan 3. DKT Rancangan Juknis Desiminasi Pengelolaan Diklat PIP dengan internal BPIP.	Telah dilaksanakan
80%	Fisik: 1. Penyelarasan Revisi Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila PIP Bersama Biro Hukum dan	Telah dilaksanakan

Score	Kriteria Score	Keterangan
	Organisasi. 2. Penyelarasan Revisi Keputusan Kepala BPIP Nomor 67 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila PIP Bersama Biro Hukum dan Organisasi; dan 3. Penyelarasan Rancangan Juknis Desiminasi Pengelolaan Diklat PIP dengan PIP Bersama Biro Hukum dan Organisasi.	
90%	Fisik: 1. Penyempurnaan Revisi Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila PIP Bersama Dewan Pengarah BPIP, Dewan Pakar BPIP, Wakil Kepala BPIP, dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP. 2. Penyempurnaan Revisi Keputusan Kepala BPIP Nomor 67 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila PIP Bersama Dewan Pengarah BPIP, Dewan Pakar BPIP, Wakil Kepala BPIP, dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP; dan 3. Penyempurnaan Rancangan Juknis Desiminasi Pengelolaan Diklat PIP dengan PIP Bersama Dewan Pengarah BPIP, Dewan Pakar BPIP, Wakil Kepala BPIP, dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP.	Telah dilaksanakan
100%	Fisik: 1. Revisi Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila PIP telah disetujui Kepala BPIP. 2. Revisi Keputusan Kepala BPIP Nomor 67 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila PIP telah disetujui Kepala BPIP; dan 3. Rancangan Juknis Desiminasi Pengelolaan Diklat PIP dengan PIP telah	Telah dilaksanakan

Score	Kriteria Score	Keterangan
	disetujui Kepala BPIP. 4.c.Keputusan Kepala BPIP Nomor 61 Tahun 2024 tentang Cetak Biru Diklat PIP	

b. Persentase Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat PIP yang Bersertifikat

Persentase Tenaga Diklat PIP yang bersertifikat dengan rincian *output* sertifikasi pendidik dan pelatih Diklat PIP dari target 200 orang. Jumlah peserta Sertifikasi Tenaga Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2024 sebanyak 676 orang peserta yang dilakukan proses penelusuran rekam jejak oleh Badan Intelijen Negara (BIN), 572 orang peserta dari berbagai Kementerian, Lembaga, Instansi, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Sosial dan Organisasi Politik se-Indonesia mendapatkan sertifikasi dan rekomendasi sebagai Pengajar Diklat PIP. Tujuan dari penyelenggaraan sertifikasi Pengajar Diklat PIP adalah tersedianya Pengajar Diklat PIP sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu terhadap kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pada penyelenggaraan Diklat PIP.

Pedoman penilaian (scoring) capaian rincian *output* persentase tenaga Diklat PIP yang bersertifikat, yaitu:

Score	Kriteria Score	Keterangan
0%	Fisik: Belum dilaksanakan	Belum terlaksana
20%	Fisik: Terlaksananya verifikasi dan validasi data calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Telah dilaksanakan
50%	Fisik: Tersedianya berita acara hasil asesmen peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dari Tim Asesor.	Telah dilaksanakan

Score	Kriteria Score	Keterangan
70%	Fisik: Tersedianya rekomendasi hasil penelusuran rekam Jejak calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dari BIN.	Telah dilaksanakan
80%	Fisik: Terlaksananya Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP dan/atau Penguatan Bagi Pengajar Diklat PIP kepada calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Telah dilaksanakan
100%	Fisik: Tersedianya 572 orang Pengajar Diklat PIP bersertifikat sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Telah dilaksanakan

c. Persentase NSPK Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti

Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti dengan target 10 lembaga pada tahun 2024 Tujuan Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tersedianya lembaga penyelenggara Diklat PIP pada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dan diharapkan memiliki kesamaan pandangan tentang ideologi Pancasila serta pembangunan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila guna menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP dan Keputusan Kepala BPIP Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Terakreditasi Penyelenggara Diklat PIP telah ditetapkan 23 lembaga penyelenggara Diklat PIP. Tujuan Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tersedianya lembaga penyelenggara Diklat PIP pada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dan diharapkan memiliki kesamaan pandangan tentang ideologi

Pancasila serta pembangunan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila guna menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045.

Pedoman penilaian (*scoring*) capaian rincian *output* persentase NSPK akreditasi penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti, yaitu:

Score	Kriteria Score	Keterangan
0%	Belum dilaksanakan	Belum terlaksana
20%	Bimbingan Teknis Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP bagi Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP	Telah dilaksanakan
40%	DKT Penyampaian Data Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP kepada Tim Asesor	Telah dilaksanakan
60%	Visitasi Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP (pemeriksaan data dukung)	Telah dilaksanakan
70%	Berita Acara Hasil Penilaian Tim Asesor Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP kepada Calon Penyelenggara Diklat PIP	Telah dilaksanakan
80%	Berita Acara Tim Penilai Akhir menyampaikan rekomendasi pemohon yang layak diberikan akreditasi dengan melampirkan hasil penilaian akhir akreditasi kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP	Telah dilaksanakan
100%	Kepala BPIP menetapkan status akreditasi bagi lembaga penyelenggara diklat untuk menyelenggarakan program Diklat PIP dan menerbitkan sertifikat akreditasi penyelenggara Diklat PIP	Telah dilaksanakan

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 32. Aktivitas Penyelenggaraan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Awal Pelaksanaan Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dan Dokumen Cetak Biru Sistem Diklat PIP sesuai Arah Kebijakan PIP (Jakarta, tanggal 14 Oktober 2024)	
2.	Rapat Koordinasi Standar Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dan Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP (Jakarta, tanggal 29 Oktober s.d. 1 November 2024)	
3.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Akreditasi Penyelenggaraan Diklat PIP dan Dokumen Cetak Biru Diklat PIP Sesuai Arah Kebijakan PIP (Jakarta tanggal 4 s.d. 5 November 2024)	
4.	Menghadiri Kegiatan Uji Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran di Yogyakarta (Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat tanggal 5 s.d. 9 November 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Sertifikat Sertifikasi Pengajar Diklat PIP di ruang rapat BPIP (Jakarta, tanggal 13 Desember 2024)	
6.	Penyerahan Sertifikat Sertifikasi kepada Pengajar Diklat PIP tahun 2024 (Jakarta, tanggal 16 Desember 2024)	
7.	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diklat PIP tahun 2025 bersama BPSDM Provinsi Riau (Jakarta, tanggal 18 Desember 2024)	

D.2. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP.

Indikator Keberhasilan:

Target persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP pada Tahun 2024 adalah 100%.

Pada Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 128,5% dengan uraian capaian (perhitungan) sebagai berikut:

$$IKK = \left(\frac{\text{NSPK yang telah di tetapkan}}{\text{target kinerja}} \times 100\% \right)$$

$$IKK = \left(\frac{9}{7} \times 100\% \right)$$

$$IKK = 128,5\%$$

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 33. Indikator Keluaran Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Pendidikan dan Pelatihan PIP yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PN))	7	9	128,5% (NSPK)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2024 yaitu:

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan tersebut yaitu Persentase Pendidikan dan Pelatihan PIP yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP dengan rincian *output* NSPK standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sebanyak 7 NSPK. Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila serta Penyelenggaraan Diklat yang membutuhkan petunjuk teknis sesuai dengan sasaran Diklat agar bisa lebih spesifik sesuai dengan

karakteristik kelompok sasaran, sehingga *output* NSPK yang disusun yaitu melakukan perbaikan regulasi terkait Keputusan Kepala BPIP Nomor 34 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan, Pembelajaran, Penilaian, dan Evaluasi dan Pemantauan PIP dan Keputusan Kepala Nomor 35 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Diklat bagi Pengajar Diklat PIP Diklat serta Penyusunan Petunjuk Teknis Diklat PIP sesuai kelompok sasarannya.

Capaian *Output* Kegiatan tersebut dengan target *output* adalah 9 NSPK, pada Tahun 2024 dengan mempertimbangkan kebutuhan standar dan kurikulum diklat, maka disusun:

Terselesaikannya dokumen NSPK Petunjuk Teknis (Juknis) yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila berupa:

1. Keputusan Kepala BPIP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat PIP;
2. Keputusan Kepala BPIP Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar dan Kurikulum Diklat PIP;
3. Keputusan Kepala BPIP Nomor 46 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Diklat PIP;
4. Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP;
5. Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP;
6. Kurikulum Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara;
7. Kurikulum Diklat PIP bagi Anggota TNI dan POLRI;
8. Kurikulum Diklat PIP bagi Anggota DPRD;
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Diklat PIP;

Tersusunnya dokumen NSPK Petunjuk Teknis (Juknis) yang masih dalam tahapan penyusunan berupa:

1. Rancangan Kurikulum Diklat PIP bagi Kepala Desa;
2. Rancangan Kurikulum Diklat PIP bagi Komunitas; dan
3. Rancangan Kurikulum Diklat PIP bagi PGRI.

Petunjuk teknis yang telah disusun tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Direktorat Direktorat Pelaksanaan Diklat dalam pelaksanaan Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP. Petunjuk teknis tersebut memuat cara pelaksanaan Diklat PIP sesuai sasarannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pemantauan dan evaluasi Diklat. Untuk mengetahui bagaimana kebermanfaatan dokumen petunjuk teknis yang telah disusun, dalam beberapa kegiatan pelaksanaan Diklat, akan dimonitoring dan evaluasi menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang merupakan lampiran dari Dokumen Petunjuk Teknis Diklat PIP. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam pelaksanaan Diklat PIP yang selanjutnya.

Pencapaian *output* kegiatan Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat sampai Tahun 2024 adalah 9 NSPK terselesaikan, sehingga persentase capaiannya adalah 128,5% dari target *output* sebanyak 7 NSPK. Cara penghitungan capaian *output* tersebut adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen NSPK yang telah dihasilkan dibagi dengan target *output*.

Petunjuk teknis yang disusun tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Direktorat Direktorat Pelaksanaan Diklat dalam pelaksanaan Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP. Petunjuk teknis tersebut memuat cara pelaksanaan Diklat PIP sesuai sasarannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pemantauan dan evaluasi Diklat. Untuk mengetahui bagaimana kebermanfaatan dokumen petunjuk teknis yang telah disusun, dalam

beberapa kegiatan pelaksanaan Diklat, akan dimonitoring dan evaluasi menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang merupakan lampiran dari Dokumen Petunjuk Teknis Diklat PIP. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam pelaksanaan Diklat PIP yang selanjutnya.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 34. Aktivitas pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penyusunan Juknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Kepala Desa (Jakarta, tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2024)	
2.	Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 23 Oktober 2024)	
3.	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Diklat tahun 2024 (Jakarta, tanggal 25 November 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Rapat Koordinasi Persiapan Diseminasi Pengelolaan Diklat Periode Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 4 Desember 2024)	
5.	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Diklat (Jakarta, tanggal 5 Desember 2024)	
6.	Diseminasi pengelolaan Diklat PIP tahun 2024 (Jakarta, tanggal 9 s.d. 11 Desember 2024)	

D.3. Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi

Indikator Keberhasilan:

Target persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT pada Tahun 2024 adalah 100% .

Pada Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 57,13% ((857:1500)x100%). Pada Tahun 2024 Diklat bagi Pengajar Diklat PIP dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Pedoman

Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dimana pada saat ini masih dalam tahap persiapan.

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2.35. Indikator Keluaran Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi (ToT)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompetensinya meningkat	Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP (PN)	1500	857	57,13% (Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh Tahun 2024 yaitu:

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah 100%. Hingga Tahun 2024 capaian target tersebut adalah dari target 1.500 orang peserta luring dan daring Pendidikan dan Pelatihan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, telah tercapai sebanyak 857 orang peserta atau sebesar 57,13% telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan uraian capaian sebagai berikut:

1. Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP - Pelaksanaan Diklat Pengajar dan Penceramah Diklat PIP Tingkat Menengah dan Dasar , yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 29 Januari s.d. 2 Pebruari 2024, dengan peserta sebanyak 94 Orang; dan

2. Pelaksanaan Diklat Pengajar PIP Berbasis BTU Pendidikan Pancasila Bagi Guru SD, SMP, dan SMA di Provinsi DKI Jakarta, yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 s.d. 27 Maret 2024, dengan peserta sebanyak 284 Orang
3. Diklat PIP Bagi Pengajar Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang berjumlah sebanyak 478 orang yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2024.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 36. Aktivitas Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompetensinya meningkat

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	DKT Reviu Final Modul Dasar, Umum, dan Pengayaan Diklat PIP (Jakarta, tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2024)	
2.	Diklat PIP Bagi Pengembang Capaian Pembelajaran dan Penyusunan BTU Pendidikan Pancasila (Jkaarta, tanggal 28 Oktober s.d. 1 November 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Diklat PIP Bagi Pengajar Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Yogyakarta, tanggal 11 s.d. 14 Desember 2024)	

D.4. Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya pada Tahun 2024 adalah 61,5%.

Pada Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 61,5%. $((35\%+88\%)/2)$ (rata-rata capaian hasil indikator kinerja kegiatan persentase peserta diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya).

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP
- b. Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 37. Indikator Keluaran Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Peserta Diklat PIP yang kompetensinya meningkat	Peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP	500	35% (103 masih dalam proses)	35% (Orang)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN		KET
Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila	6600	5822 Orang	88% (Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capai yang telah diperoleh Tahun 2024 yaitu:

a. Persentase Peserta Diklat PIP yang kompetensinya meningkat

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP. Sampai dengan Tahun 2024 jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompetensinya meningkat masih dalam persiapan disebabkan pada Tahun 2024 ini difokuskan pada penyusunan modul dan bahan ajar untuk Pembelajaran Aktif PIP, Diklat PIP Purnapaskibraka, Materi Umum Diklat PIP dan Materi Pengayaan Diklat PIP, dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU. Sampai saat ini terdapat 103 peserta Pendidikan dan Pelatihan yang masih dalam tahap pembelajaran. Sehingga capaian Tahun 2024 adalah sebesar 35%.

b. Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila

Purnapaskibraka yang telah mendapatkan diklat PIP dan dinyatakan lulus nantinya akan menjadi Duta Pancasila. Pada tahun 2024 Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka sedang melakukan pendataan terhadap Purnapaskibraka Tahun 2023, saat ini jumlah Data Purnapaskibraka yang sudah dikumpulkan dan akan mendapatkan Diklat PIP melalui LMS adalah sejumlah 9.031 orang. Setelah Purnapaskibraka mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat PIP, baru mereka akan diangkat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila. Namun Purnapaskibraka mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat PIP di tahun 2024 ini adalah sebesar 5.822 orang. Sehingga pada periode ini dapat disimpulkan capaian sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Purna Paskibraka yang lulus}}{\text{Target Purnapaskibraka Duta Pancasila}} \times 100\%$$

$$= \frac{5.822}{6600} \times 100\% = 88,21 \%$$

Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 5.822 orang. Sehingga tercapai capaian sebesar sebesar 88,21%.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 38. Aktivitas Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pembelajaran Aktif Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Paskibraka Tingkat Daerah Tahun 2022 dan 2023 (Banten, tanggal 24 April 2024)	

Tabel 2. 39. Aktivitas Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Diklat PIP Bagi Purnapaskibraka Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 Angkatan I (Jakarta, tanggal 6 s.d. 8 November 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Diklat PIP Bagi Purnapaskibraka Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 Angkatan II (Jakarta, tanggal 13 s.d. 15 November 2024)	
3.	Diklat PIP Bagi Purnapaskibraka Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 Angkatan III (Jakarta, tanggal 20 s.d. 22 November 2024)	

E. Pengendalian dan Evaluasi PIP

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi PIP adalah:

Tabel 2. 39. Indikator Keluaran Program Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KINERJA
Persentase Rekomendasi Pendalian PIP yang dimanfaatkan	100%	100%	 100%
Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan	100%	100%	 100%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

E.1. Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan pada Tahun 2024 adalah 100%.

Pada Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 100% .

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan:

- Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila
- Terlaksananya Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Purna Paskibraka

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 40. Indikator Keluaran Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan PIP	1 (20 Dokumen Laporan)	1 (20 Dokumen Laporan)	100% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2024 yaitu:

- Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila akan terdiri dari 3 (tiga) klaster yaitu Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan. Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Pengkajian Materi dan Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, laporan Rekomendasi dari kegiatan yang terkumpul adalah 20 laporan kegiatan dengan target 20 laporan kegiatan.

Sehingga capaian kinerja pada periode tahun 2024 adalah sebesar:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Laporan Rekomendasi Kegiatan}}{(1 \text{ dokumen} \times 20 \text{ Laporan Rekomendasi Kegiatan})} \times 100\% \\
 &= \frac{20 \text{ Laporan}}{20 \text{ Laporan}} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Berikut adalah dokumen laporan tersebut:

1. Laporan Kegiatan Pengendalian PIP Eksternal kepada Sekretariat Negara
2. Laporan Kegiatan Pengendalian PIP Eksternal kepada Sekretariat Wakil Presiden
3. Laporan Kegiatan Pengendalian PIP Eksternal kepada KPPPA
4. Laporan Kegiatan Pengendalian PIP kepada Eksternal Perguruan Tinggi (Universitas Diponegoro, Universitas UIN Alauddin Makassar)
5. Laporan Kegiatan Pengendalian PIP Eksternal kepada Pemerintah Daerah di TW I (Pemkot Malang, Pemkab Kuningan, Pemkab Pati)
6. Laporan Kegiatan Pengendalian PIP Eksternal kepada Pemerintah Daerah di TW II (Pemkot Jambi)
7. Laporan Kegiatan Pengendalian PIP Eksternal kepada Pemerintah Daerah di TW IV (Pemkab Klaten, Pemrov NTT, Pemprov Papua Pegunungan)
8. Laporan Rekomendasi Internal Kedeputian I
9. Laporan Rekomendasi Internal Kedeputian II
10. Laporan Rekomendasi Materi Paskibraka
11. Laporan Rekomendasi Pengendalian PIP Arah Kebijakan dan Peta Jalan
12. Laporan Rekomendasi Pengendalian PIP Buku Teks Utama Pancasila
13. Laporan Rekomendasi Pengendalian PIP Pada Program Paskibraka
14. Laporan Rekomendasi Pengendalian PIP pada Program Kurikulum Diklat
15. Draft Naskah Urgensi Pedoman Pengendalian PIP
16. Draft Batang Tubuh Pedoman Pengendalian PIP
17. Laporan Rekomendasi Hasil IAP Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
18. Laporan Kegiatan Pengendalian PIP Internal BPIP

19. Laporan Kegiatan Menghadiri Series DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Kerapuhan

20. Laporan Kegiatan menghadiri Refleksi Akhir Tahun dan Expose Deputi 5

Pencapaian Kinerja Tahun 2024 ini juga dapat dijabarkan dengan:

Pengendalian Pembinaan Ideologi Eksternal sudah dilakukan untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan Perguruan Tinggi. Untuk K/L yaitu Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan KPPPA. Untuk Perguruan Tinggi yaitu; Universitas Diponegoro dan UIN Alauddin Makassar. Untuk pemerintah daerah yaitu; Pemkot Malang, Pemkab Kuningan, Pemkab Pati, Pemkot Jambi, Pemkab Klaten, Pemprov NTT, Pemprov Jawa Timur.

Pengendalian Internal untuk kedeputian di BPIP sudah dilakukan antara lain untuk Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan terdiri dari Pengendalian pada Sosialisasi Buku Teks Utama Berbasis Kampus Negeri dan Penandatanganan MOU, Untuk Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi terdiri dari Pengendalian PIP pada DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara. Untuk Kedeputian IV yaitu; Pengendalian pada sosialisasi BTU Berbasis Agama, Materi Calon Paskibraka, Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP. Untuk Kedeputian IV yaitu; Pengendalian PIP pada Program Paskibraka dan Kurikulum Diklat. Untuk Internal V yaitu Pengendalian pada IAP dan IPLP sedang dalam proses pelaksanaan.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka kegiatan pengendalian pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 41. Kegiatan Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pengendalian Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Rangka Pencegahan <i>Stunting</i> Berkolaborasi Dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang, tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2024)	
2.	Rapat Pengendalian Koordinasi Kegiatan T.A. 2025 (Jakarta, tanggal 20 s.d. 21 November 2024)	
3.	Rapat Pengendalian Koordinasi Kegiatan T.A. 2025 (Jakarta, tanggal 20 s.d. 21 November 2024)	
4.	Rapat Rancangan Usulan Hasil Rekomendasi (Jakarta, tanggal 9 Desember 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila pada Kedeputan di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 11 s.d. 12 Desember 2024)	
6.	Rapat Penyusunan Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan PIP dan Dokumen Usulan Langkah dan Strategi PIP (Jakarta, tanggal 12 s.d. 13 Desember 2024)	

E.2. Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Target persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan pada Tahun 2024 adalah 100%.

Pada Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 100% $((100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/6) \times 100\%$ rata-rata capaian indikator.

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan:

- Pelaksanaan Evaluasi PIP.
- Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 42. Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan PIP	1	100%	100% (Rekomendasi)
	Rekomendasi hasil evaluasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang terindikasi menentang Ideologi Negara (PN)	1	100%	100% (Rekomendasi)
	Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan negara dan ASN yang terindikasi menentang Ideologi Negara (PN)	1	100%	100% (Rekomendasi)
	Rekomendasi hasil evaluasi Ormas, organisasi dan perusahaan asing, serta media yang menentang Ideologi Negara (PN)	1	100%	100% (Rekomendasi)
Persentase Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila	1	100%	100% (Rekomendasi)
Persentase Rekomendasi Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Hasil pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila	1	100%	100% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2024 yaitu:

- Persentase rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti

Dalam tahapannya rekomendasi evaluasi pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100% dimana dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan Identifikasi permasalahan dan penentuan skala prioritas atau urgensi permasalahan yang telah dilakukan evaluasi, dianalisis dan disusun laporannya yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi hasil evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, dengan rincian perhitungan

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{1 \text{ rekomendasi kebijakan}}$$

$$= \frac{(100\%)}{1 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 100 \%$$

Untuk Rekomendasi Hasil Evaluasi Prioritas Nasional telah dilakukan 3 Segmen yaitu:

- Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara sejumlah 956 Respondern
- Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan ASN Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara 358 Responden
- Rekomendasi hasil evaluasi Ormas, organisasi dan perusahaan asing, serta media yang menentang Ideologi Negara 310 Responden, dimana presentase dicapai dengan penyusunan metode Evaluasi Hal-Hal yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila di Lingkungan Media bersama KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah).

Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, yang berasal dari rata-rata capaian Rincian *Output* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase rekomendasi evaluasi} = \frac{R02 + R03 + R04}{3 \text{ Rekomendasi Kebiasaan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase rekomendasi evaluasi} = \frac{100 + 100 + 100}{3} \times 100\%$$

$$\text{Persentase rekomendasi evaluasi} = 100\%$$

- Persentase Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang ditindaklanjuti

Dalam tahapannya Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100% dimana saat ini Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila telah selesai disusun, dan Saat ini Pengukuran Pelembagaan Pancasila telah selesai penyusunan logical frame work aplikasi perhitungan Pelembagaan Pancasila beKerja Sama dengan Biro Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pengukuran Pelembagaan Pancasila telah dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase rekomendasi kebijakan PIP yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan rincian *output* yaitu satu (1) rekomendasi kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, dengan rincian perhitungan

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{1 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{(100\%)}{1 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 100\% \end{aligned}$$

c. Persentase Rekomendasi Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti

Dalam pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Hasil pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase rekomendasi kebijakan PIP yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan rincian *output* yaitu satu (1) rekomendasi kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam tahapannya Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100% dimana saat ini telah dilaksanakan antara lain:

- a. Perhitungan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Nasional Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan; 1. Capaian Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2023 sebesar 77,73, menunjukkan kenaikan dari Tahun 2022 sebesar 75,53, dan

Tahun 2021 sebesar 72,93. Meskipun terjadi peningkatan, dimensi Sila ke-5 menunjukkan capaian terendah yaitu 68,33 pada Tahun 2023, Tahun 2022 sebesar 66,98, dan Tahun 2021 sebesar 65,10.

- b. Proses perhitungan Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2023 Kota Palu telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan diseminasi kepada jajaran Pemerintah dan masyarakat Kota Palu;
- c. Rekomendasi hasil Perhitungan IAP Kota Palu telah selesai disusun. Rekomendasi ini telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Palu untuk diaktualisasikan dalam program kerja dan kegiatan. Diharapkan dengan adanya rekomendasi ini, indikator dalam Perhitungan Kota Palu yang rendah dapat ditingkatkan;
- d. Rekomendasi hasil Perhitungan IAP Provinsi Jawa Timur telah selesai disusun. Rekomendasi ini telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk diaktualisasikan dalam program kerja dan kegiatan. Diharapkan dengan adanya rekomendasi ini, indikator dalam Perhitungan Provinsi Jawa Timur yang rendah dapat ditingkatkan; dan
- e. Hasil perhitungan IAP telah disampaikan dan dilaporkan kepada Unsur Pimpinan BPIP.

Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, dengan rincian perhitungan

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{1 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{(100\%)}{1 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 100 \% \end{aligned}$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 43. Aktivitas Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pilot Survei Instrumen Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Kelompok Sasaran Media (Jakarta, tanggal 10 Oktober 2024)	
2.	Uji Coba Pedoman Evaluasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Kemenko Polhukam RI (Jakarta, tanggal 11 Oktober 2024)	
3.	Uji Coba Pedoman Evaluasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Kemendagri (Jakarta, tanggal 14 Oktober 2024)	
4.	Uji Coba Pedoman Evaluasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Kemenko PMK (Jakarta, tanggal 15 Oktober 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Uji Coba Pedoman Evaluasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Sekretariat Wakil Presiden (Jakarta, tanggal 15 Oktober 2024)	
6.	Uji Coba Pedoman Evaluasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 17 Oktober 2024)	
7.	Uji Coba Pedoman Evaluasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Kementerian Pariwisata (Jakarta, tanggal 18 Oktober 2024)	
8.	Diskusi Kelompok Terpumpun Finalisasi Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Bandung, tanggal 12 s.d. 14 Desember 2024)	

Tabel 2. 44. Aktivitas Rekomendasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Analisis Data Hasil Perhitungan Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2023 Per Provinsi dan Finalisasi Laporan Hasil Perhitungan IAP Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 1 s.d. 4 Oktober 2024)	
2.	Diseminasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Kota Palu Tahun 2023 dan Uji Coba Survei Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Palu, tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024)	
3.	Penyusunan Rekomendasi Hasil Indeks Aktualisasi Pancasila Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Surabaya, tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2024)	
4.	Penyusunan Rekomendasi Hasil Indeks Aktualisasi Pancasila Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Malang, tanggal 6 s.d. 9 November 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat Pelaksanaan Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Nasional Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 14 November 2024)	
6.	Diseminasi dan Penyerahan Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Surabaya, tanggal 24 s.d. 26 November 2024)	
7.	Koordinasi Reviu Akhir Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung, tanggal 15 s.d. 16 Desember 2024)	
8.	Rapat Pembahasan Surat Keputusan Kepala BPIP tentang Penetapan Hasil Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 17 Desember 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Rapat Perencanaan Sistem Informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 11, 14, 17, 19, 20 dan 23 Desember 2024)	
10.	Rapat Perencanaan Sistem Informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 12, 13, dan 18 Desember 2024)	

F. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Pelayanan PIP yang Berkualitas

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya meliputi kegiatan Kesekretariatan yang diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPIP Yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel adalah:

Tabel 2. 44. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPIP yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KET
Nilai Reformasi Birokrasi	83	66,82	Penilaian atas periode T.A. 2023
Indeks Sistem Merit	0,81	0,83	Capaian Indeks Sistem merit Tahun 2024
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	Opini atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 oleh BPK
Nilai SAKIP	BB	B	Capaian Tahun 2024
Indeks Profesionalisme ASN	83	69,45	Capaian Tahun 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	90,25%	Survei terhadap <i>Stakeholder</i>

Fokus layanan yang dilakukan dalam rangka dukungan manajemen BPIP diberikan kepada pihak internal BPIP dan K/L Pembina sebagai mitra BPIP dalam upaya penguatan kelembagaan BPIP adalah:

1. Layanan Perencanaan dan Keuangan
2. Layanan Hukum dan Organisasi;
3. Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia;

4. Layanan Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;
5. Layanan pengawasan Internal; dan
6. Layanan Pusat Data dan Informasi.

Indikator keberhasilan tata kelola BPIP menjadi perhatian: (i) Kementerian PAN dan RB, KASN, BKN dengan indeks RB, nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), nilai sistem merit, nilai profesionalisme ASN; (ii) Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini pada laporan keuangan, dan (iii) Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait perencanaan, keuangan, dan monitoring dan evaluasi program dan anggaran.

Beberapa perkembangan capaian strategis tata kelola BPIP Tahun 2024, dicapai melalui kegiatan yaitu:

F.1. Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 45. Indikator Keluaran Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	100% (Dokumen)
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (SBKU)	3	3	100% (Dokumen)
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Layanan Manajemen Keuangan	1	1	100% (Dokumen)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100% (Dokumen)
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (SBKU)	6	6	100% (Dokumen)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada periode 2024 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%. Layanan yang telah dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen Perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Biro Perencanaan dan Keuangan sudah melakukan layanan Perencanaan sebaik mungkin misalnya dari Revisi DIPA dan revisi POK dalam rangka optimalisasi anggaran. Berikut adalah dokumen dan layanan perencanaan dan penganggaran yang telah diselesaikan Pada Tahun Anggaran 2024:

1. Revisi DIPA 13 (Tiga Belas) kali;
2. Revisi POK 21 (Duapuluh Satu) kali;

3. Rapat Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2024 dengan tema “Aktualisasi Pancasila Perkokoh Demokrasi Bangsa”;
4. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis BPIP Tahun 2025 – 2029;
5. *Kick Off* Penyusunan Rencana Strategis BPIP Tahun 2025 – 2029.
6. Melaksanakan Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Angka Kredit Perencana;
7. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
8. Identifikasi Kebutuhan Kerangka Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Diusulkan pada Rancangan Awal RKP 2025 dan Tindak Lanjut Kerangka Regulasi pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029;
9. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra BPIP Tahun 2025-2029;
10. *Trilateral Meeting (TM)* Pembahasan Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga TA 2025 bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI;
12. Penelaahan usulan tambah anggaran program Paskibraka bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas;.
13. Penelaahan RKA-K/L bersama Kementerian Keuangan;
14. Penelaahan usulan revisi anggaran BPIP T.A. 2024 bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas;

15. Koordinasi usulan relaksasi blokir *Automatic Adjustment* BPIP T.A. 2024 bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas;
16. Review dan penandatanganan Konsep DIPA BPIP Tahun 2025;

b. Layanan Manajemen Keuangan

Dalam menjalankan Layanan Manajen Keuangan Biro Perencanaan dan keuangan pada tahun 2024 Tahun 2024 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Pelaksanaan Layanan Keuangan;
3. Pelaksanaan audit keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Rekonsiliasi laporan keuangan Triwulan I s.d. IV di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I s.d. IV TA 2024 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
7. Koordinasi Integrasi Sistem Informasi Keuangan dengan Aplikasi Sakti pada Kementerian Keuangan;
8. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023.
9. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024.
10. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester II TA 2024.

c. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Dalam menjalankan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan dan keuangan pada Tahun 2024 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

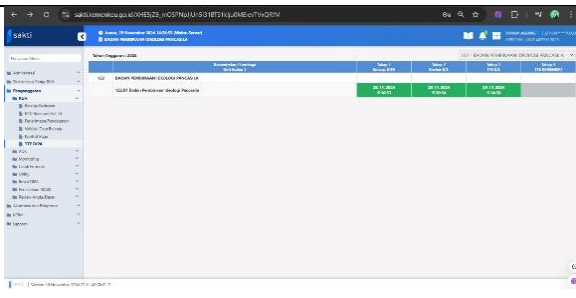
1. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Tahun 2023;
2. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Triwulan I s.d. IV Tahun 2024
3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan I s.d. IV Tahun 2024;
4. Pemenuhan Monev Pelaksanaan Anggaran melalui e-monev Bappenas dan smart-dja;
5. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2023;
6. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Semester I dan II Tahun 2024;
7. Implementasi SAKIP berbasis elektronik melalui sistem APII Kinerja;
8. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan;
9. Penyusunan tindaklanjut rekomendasi LHE implementasi SAKIP oleh KemenPANRB;
10. Koordinasi dan penyusunan laporan pada SISMONEV KP KSP setiap triwulan;
11. Rapat Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan BPIP dan Penyusunan Instrumen Survei Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen;
12. Pelaksanaan Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Wilayah Sumatera dalam Rangka Penyusunan Renstra BPIP;

13. Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Politik Dan Komunikasi bersama dengan BAPPENAS.
14. Pelaksanaan dan pengumpulan
15. Pemutakhiran Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi di Lingkungan BPIP; dan
16. Mengumpulkan dan mengevaluasi aspirasi Masyarakat untuk membangun rencana Strategis BPIP tahun 2025-2029.

Aktivitas dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan, dan kinerja pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 46. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 dan Sosialisasi Langkah Langkah Akhir Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2024)	
2.	Kegiatan Monitoring, dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBN Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 28 Oktober s.d. 1 November 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Pencapaian IKPA Tahun Anggaran 2024 (Jakarta, tanggal 4 s.d. 8 November 2024)	
4.	Review dan penandatanganan Konsep DIPA BPIP Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 25 s.d. 29 November 2024)	
5.	Kegiatan Koordinasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 2024 (Jakarta, tanggal 12 s.d. 14 Desember 2024)	
6.	Rapat Pra Raker BPIP Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 17 s.d. 18 Desember 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Kegiatan Koordinasi Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2024 (Jakarta, tanggal 23 s.d. 25 Desember 2024)	

F.2. Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 47. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	Layanan Hukum	1	1	100% (Layanan)
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1	100% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen hukum dan organisasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada periode Tahun 2024 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%. Uraian capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

1. Persentase rancangan produk hukum dilaksanakan dengan rincian *output* layanan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan hukum meliputi 2 (dua) klasifikasi utama sebagai berikut:
 - a. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP; dan
 - b. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penelaahan hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Adapun masing-masing layanan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum

Rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan BPIP, sedangkan produk hukum BPIP meliputi Keputusan Dewan Pengarah/Kepala/Sekretaris Utama/Deputi BPIP, selain juga instruksi dan surat edaran.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tahapan kegiatan penyusunan Peraturan BPIP meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan/penetapan, pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan. Dalam perencanaan akan ditetapkan Program Penyusunan Peraturan BPIP Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala BPIP. Tahap penyusunan dilakukan oleh pemrakarsa untuk selanjutnya dilakukan penyelarasan internal oleh Biro Hukum dan Organisasi. Tahap pembahasan merupakan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelahnya Rancangan Peraturan BPIP akan ditetapkan oleh Kepala BPIP untuk selanjutnya diundangkan melalui pencatatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tahap penyusunan keputusan dan produk hukum lainnya meliputi penyusunan dan pembahasan internal. Dalam tahap penyusunan dan pembahasan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, ahli, dan atau pihak lain yang terkait dengan materi produk hukum. Dalam beberapa penyusunan produk hukum memerlukan kegiatan studi banding dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintahan daerah sehingga produk hukum yang disusun tepat tujuan dan tepat sasaran serta dapat diimplementasikan.

b. Penelaahan Hukum dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1) Penelaahan hukum merupakan kegiatan untuk melakukan kajian terhadap produk hukum dan berbagai permasalahan hukum, yang terdiri atas analisis hukum, evaluasi produk hukum, mediasi, dan pendampingan hukum serta asistensi penyusunan naskah Kerja Sama berupa nota kesepahaman, perjanjian Kerja Sama, kemitraan, dan naskah Kerja Sama lainnya.

Objek kajian penelaahan adalah lembaga (BPIP) maupun individual (Pegawai BPIP), termasuk juga kajian terhadap produk hukum BPIP dalam kerangka pembentukan atau evaluasi produk hukum BPIP. Sedangkan mediasi dan pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum yang memerlukan penanganan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Asistensi penyusunan naskah Kerja Sama dilaksanakan dalam rangka menguatkan materi Kerja Sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman, perjanjian Kerja Sama, kemitraan, dan naskah Kerja Sama lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

- 2) Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum di lingkungan BPIP meliputi pendokumentasian, penyebarluasan, dan pemeliharaan dokumen hukum. Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum tersebut telah diundangkan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP, dimana BPIP diproyeksikan JDIH BPIP menjadi sentra informasi dan dokumentasi hukum terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi hukum merupakan kegiatan pengelolaan produk hukum BPIP meliputi pendokumentasian, inventarisasi, dan penyediaan informasi produk hukum. Pendokumentasian produk hukum BPIP dilakukan secara manual dan elektronik dalam JDIH BPIP yang telah terintegrasi dengan JDIHN. Sedangkan penyediaan

informasi hukum dilakukan melalui berbagai sarana, yaitu dapat melalui pencetakan/penjilidan produk-produk hukum BPIP, pamflet, *standing banner*, dan berbagai media lain serta media elektronik, selain juga melakukan sosialisasi dan/atau internalisasi produk hukum yang telah diterbitkan BPIP. Pengembangan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum juga memerlukan pembangunan perpustakaan *offline* dan *online*.

Sebagai salah satu sarana penyediaan informasi hukum berbasis elektronik, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan terhadap JDIH secara berkala sehingga seluruh produk hukum BPIP dan segala dokumen berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila dapat terinformasikan dan diakses oleh masyarakat luas dengan serta-merta.

Seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian Layanan Hukum dilakukan melalui berbagai tahapan yang harus dibangun secara bertahap, berkelanjutan dan perlu melibatkan koordinasi serta Kerja Sama dengan instansi lain (K/L/Pemda) serta didukung dengan tersedianya infrastruktur (sarana prasarana) yang memadai.

Pada Tahun 2024, penyusunan rancangan Peraturan BPIP dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

No.	Jenis Produk Hukum	Jumlah	
		Rancangan	Ditetapkan dan Terdokumentasi
1	Peraturan Presiden	-	-
2	Peraturan BPIP	5	5

No.	Jenis Produk Hukum	Jumlah	
		Rancangan	Ditetapkan dan Terdokumentasi
3	Keputusan Ketua Dewan Pengarah	-	-
4	Keputusan Kepala BPIP	68	57
5	Keputusan Sekretaris Utama	46	36
6	Keputusan Deputy I	1	1
7	Keputusan Deputy II	-	-
8	Keputusan Deputy III	2	2
9	Keputusan Deputy IV	-	-
10	Keputusan Deputy V	1	-
11	Instruksi Kepala	-	-
12	Surat Edaran Kepala	4	3
13	Surat Edaran Sekretaris Utama dan Deputy	5	5
15	Nota Kesepahaman	6	5
16	Perjanjian Kerja Sama	17	12
17	Kemitraan	-	-
18	Telaah Hukum		-

Sesuai dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, penyusunan Peraturan BPIP dilaksanakan berdasarkan perencanaan program penyusunan Peraturan BPIP pada tahun berjalan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Berdasarkan hal tersebut, untuk pelaksanaan penyusunan Peraturan BPIP tahun 2024 telah ditetapkan Keputusan Kepala BPIP Nomor 72 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2004, yang kemudian dicabut dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 37 Tahun 2024

tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2004.

Progres penyelesaian Program Penyusunan Peraturan BPIP berdasarkan Keputusan Kepala BPIP sebagai berikut:

Tabel 2. 48. Peraturan dan Produk Hukum Tahun 2024

NO.	JUDUL RANCANGAN	PROSES
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		
<i>Tidak mengajukan.</i>		
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		
1.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Penyusunan oleh Pemrakarasa dan telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan BPIP Tahun 2025 sesuai Keputusan Kepala BPIP No. 54 Tahun 2024
2.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022	Penyusunan oleh Pemrakarasa dan telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan BPIP Tahun 2025 sesuai Keputusan Kepala BPIP No. 54 Tahun 2024
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi		
3.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Diundangkan, Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024
4.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Kompetensi (Pembelajaran) Materi dan Metode Pendidikan Moral	Ditarik kembali pengusulannya oleh Pemrakarsa

NO.	JUDUL RANCANGAN	PROSES
5.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila Jenjang Pendidikan Formal (PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi)	Ditarik kembali pengusulannya oleh Pemrakarsa
6.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila pada Lingkup Organisasi Masyarakat	Ditarik kembali pengusulannya oleh Pemrakarsa
7.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila pada Lingkup Keluarga	Ditarik kembali pengusulannya oleh Pemrakarsa
8.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim	Diubah menjadi Keputusan Kepala BPIP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPIP No. 57 Tahun 2024
9.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara	Diubah menjadi Keputusan Kepala BPIP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPIP No. 55 Tahun 2024
10.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	Dikembalikan kepada Pemrakarsa
11.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Tentara Nasional Indonesia	Diubah menjadi Keputusan Kepala BPIP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPIP No. 56 Tahun 2024
12.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kepala Daerah	Dikembalikan kepada Pemrakarsa

NO.	JUDUL RANCANGAN	PROSES
13.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Ditarik kembali pengusulannya oleh Pemrakarsa
14.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Diplomat	Ditarik kembali pengusulannya oleh Pemrakarsa
15.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Buku Referensi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Perguruan Tinggi	Ditarik kembali pengusulannya oleh Pemrakarsa
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		
16.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Diundangkan, Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		
<i>Tidak mengajukan</i>		
Sekretariat Utama		
17.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum BPIP	Penyusunan oleh Pemrakarsa
18.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Satu Data Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia

- Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang di tindaklanjuti dilaksanakan dengan rincian *output* Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal meliputi 4 (empat) klasifikasi utama sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penataan Organisasi

1. Naskah Akademik Jabatan Fungsional Pembinaan Ideologi Pancasila serta Naskah Akademik Pembentukan Badan Diklat
2. Melakukan evaluasi kelembagaan melalui Penyusunan laporan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024

b. Pelaksanaan Tata Kelola Internal

1. Tata Kelola Administrasi Biro Hukum dan Organisasi

Kinerja yang dilakukan terkait ketatusahaan adalah urusan tata usaha dan rumah tangga serta penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Hukum dan Organisasi.

Biro Hukum dan Organisasi di dalam Korespondensi yang terdiri Surat Masuk dan Surat Keluar mengalami perubahan terdiri dari Jumlah Kualitas dan Kuantitas. Didalam surat masuk yang meliputi nota dinas, memorandum, undangan, surat perintah, surat edaran, surat keputusan, intruksi atau surat edaran dari unit kerja lain. Surat Keluar terdiri dari nota dinas, memorandum, sprint, undangan, dan surat keluar biasa.

2. Kepuasan Layanan Biro Hukum

Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Hukum dan Organisasi sebagai salah satu penyedia dukungan manajemen di Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka perlu

diselenggarakan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penilaian pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil Survei Kepuasan *Stakeholder* yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan *Stakeholder*. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat *Stakeholder*, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

c. Perencanaan Reformasi Birokrasi

Perubahan Road Map RB BPIP 2020-2024 melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 42 tahun 2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam Dokumen Road Map terdapat 2 program kegiatan RB:

1. RB General dengan 21 kegiatan utama

Reformasi Birokrasi (RB) memiliki 21 kegiatan utama yang mencakup berbagai aspek untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Kegiatan tersebut meliputi penguatan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sistem manajemen kinerja, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penguatan budaya kerja, pengelolaan manajemen perubahan, pengelolaan manajemen risiko,

pengembangan inovasi pelayanan, peningkatan integritas, pengelolaan manajemen talenta, pengelolaan keuangan negara yang efisien dan transparan, penguatan sinergi antar-instansi, pengelolaan data yang terintegrasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, peningkatan efektivitas kebijakan, penyederhanaan proses kerja, serta percepatan reformasi struktural untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil..

2. RB Tematik dengan tema digitalisasi pemerintahan dalam program percepatan pencegahan dan penurunan angka *stunting*.

d. Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPIP

Pelaksanaan dan Evaluasi RB BPIP Telah dilakukan pengisian Rencana Aksi pada Portal RB Nasional sesuai dengan surat dari menpan nomor B/121/RB.04/2024 tentang teknis evaluasi RB 2024. Untuk Penilaian RB tahun 2024 2024 masih dalam penyerahan hasil RB general dan RB tematik kepada MENPAN RB.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen hukum dan organisasi pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 49. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPIP tentang Satu Data Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 1 Oktober 2024)	
2.	Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 10 Desember 2024)	
3.	Rapat Lanjutan Penyusunan Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 16 Desember 2024)	

F.3. Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 50. Capaian Target Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	Layanan BMN	1	1	100% (Layanan)
	Layanan BMN (SBKU)	1	1	100% (Layanan)
	Layanan Umum	1	1	100% (Layanan)
	Layanan Perkantoran	1	1	100% (Layanan)
	Layanan Sarana Internal	40	429	1072% (unit)
	Layanan Manajemen SDM	441	706	160% (Layanan)
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	95	401	422% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Tahun 2024 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%. Beberapa capaian tersebut didukung sebagai berikut:

a. Barang Milik Negara dan Layanan BMN (SBKU)

Merupakan layanan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengendalian, serta pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, layanan BMN telah melakukan penyusunan beberapa laporan seperti Laporan Barang Pengguna Unaudited Tahun Anggaran 2023, Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Laporan Barang Pengguna Unaudited Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang berisi tentang akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan akuntansi Barang Milik Negara yang meliputi Neraca, Laporan Barang Milik Negara, dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara. Sedangkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian merupakan laporan pemantauan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, dan Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya.

Penyusunan Laporan yang telah dilakukan pada tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan manajemen dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara.

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

UAPB : 122
UAKPB : 403992

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl.Data : 08/01/25 6:30 AM
Tgl.Cetak : 08/01/25 10:45 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_p

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2,010,388,192
132111	Peralatan dan Mesin	80,295,905,674
135111	Aset Tetap Renovasi	1,105,801,200
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(47,114,366,026)
162151	Software	1,951,126,700
162161	Lisensi	1,411,716,525
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,207,967,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	902,988,180
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(819,161,675)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,803,039,200)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(196,550,478)
J U M L A H		38,952,776,592

Pada Triwulan IV, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan proses usulan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin yang dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi.

Selanjutnya, setelah persetujuan oleh Kepala selaku Pengguna Barang, atas usulan tersebut akan dilakukan lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Jakarta IV untuk dapat menghasilkan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

b. Layanan Umum

Pengelolaan Barang Milik Negara yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan khususnya Kendaraan dan anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Negara yang saat ini berada pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pada Tahun 2024, Layanan Umum masih berusaha untuk meningkatkan nilai Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan

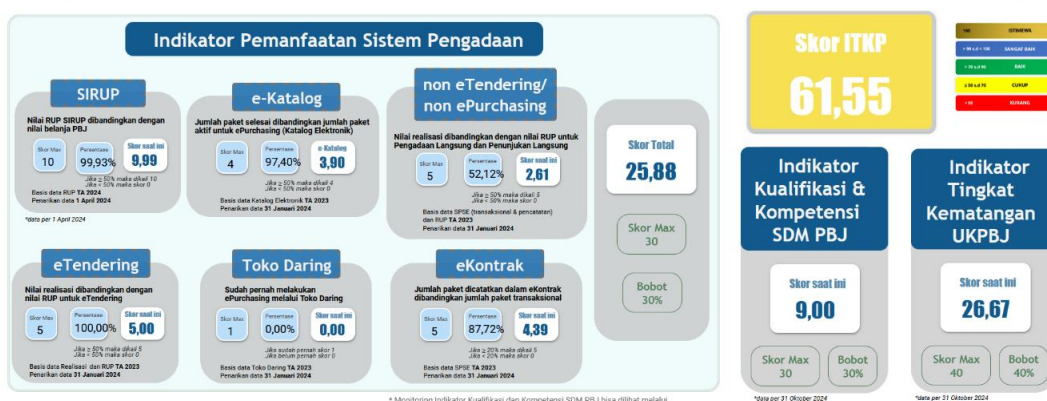
(ITKP) dimana pada hasil dari Penilaian ITKP Tahun 2023 masih kurang memuaskan. ITKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut,:

No	Indikator	Target Penilaian	Nilai Pencapaian	Keterangan
1	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan			
	Sistem Rencana Umum Pengadaan	10	9,99	
	eTendering	5	5	
	e-Katalog	4	3,90	
	Toko Daring	1	0	Belum ada transaksi melalui toko daring
	Non etendering	5	2,61	
	eKontrak	5	4,39	
2	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	30	9	BPPI sudah memiliki formasi JF PPBJ yang terdiri dari 6 JF PPBJ Pertama dan 4 JF Proses pengajuan data JF PPBJ yang sudah di lantik ke LKPP

No	Indikator	Target Penilaian	Nilai Pencapaian	Keterangan
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	40	26,67	BPIP belum memiliki LPSE Mandiri Saat ini BPIP masih sebagai LPSE Agency Kementerian Hukum dan HAM Progres pembentukan LPSE mandiri saat ini sedang proses PKS dengan LKPP
	Total	100	61,55	

K/L/Pemda: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

(1)



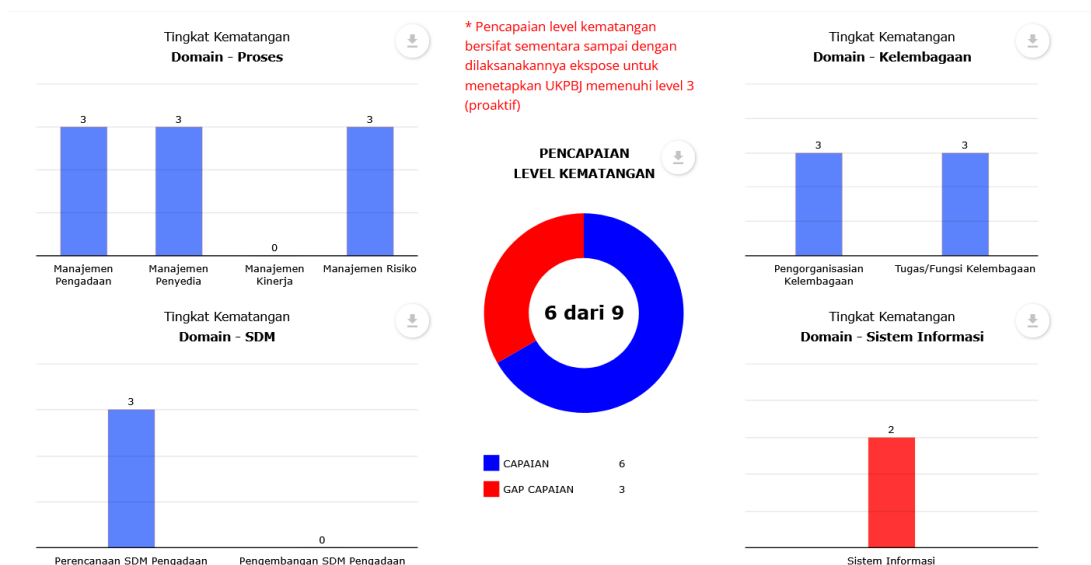
Beberapa Rencana dalam peningkatan nilai ITKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kuota Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ)

2. Peningkatan kompetensi SDM Pengadaan melalui pelatihan pengelolaan e-katalog bagi pelaku PBJ pada bulan Mei 2024
3. Peningkatan Tingkat Kematangan UKPBJ dengan memenuhi standar SPSE *Admin Agency*
4. Peningkatan produk dalam negeri di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Untuk tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPIP yang merupakan tingkat kesiapan dan kemampuan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa. Kematangan UKPBJ diukur menggunakan Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ. Model ini mencakup empat domain dan sembilan variabel. Tujuan dari pengukuran kematangan UKPBJ adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kemampuannya dalam menyesuaikan diri. Pengukuran ini juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah korupsi.

UKPBJ BPIP saat ini telah mencapai tingkat kematangan proaktif pada 6 dari 9 variabel.



Beberapa langkah yang dilaksanakan oleh UKPBJ BPIP untuk meningkatkan level kematangan UKPBJ BPIP sebagai berikut:

1. Mengusulkan pendirian LPSE mandiri ke LKPP agar menjadi Service Provider dari yang sebelumnya Agency pada LPSE Kementerian Hukum dan HAM;
2. Membuat perencanaan dan laporan kinerja UKPBJ sebagai laporan kinerja tahunan;
3. Membuat laporan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan personal UKPBJ, serta memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi pelaku pengadaan.

Laporan Realisasi Kinerja UKPBJ berdasarkan serapan anggaran, ketepatan waktu, penggunaan PDN, dan Tingkat layanan adalah sebagai berikut:

Area	Nama Indikator Kinerja	Karja	Target 2024	Realisasi 2024
Serapan anggaran	Persentase serapan penggunaan anggaran	Serapan anggaran pada UKPBJ	90%	95,76%
Ketepatan Waktu	Persentase ketepatan waktu paket pengadaan	Dari Segi Jumlah	80%	90,5%
		Dari Segi nilai	80%	93,6%
Penggunaan PDN	Persentase Penggunaan PDN	Penggunaan PDN	80%	35%
Tingkat Layanan	Tingkat kepuasan atas layanan pengadaan	Kepuasan pelanggan	80%	97%

c. Layanan Perkantoran

Pada Tahun 2024, layanan perkantoran melakukan dukungan perkantoran seperti proses pembayaran gaji dan tunjangan/hak keuangan pejabat dan pegawai BPIP dari Dewan Pengarah hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Layanan perkantoran juga memberikan layanan berupa dekorasi kantor dan proses dukungan pemeliharaan peralatan dan mesin sehingga menunjang tugas dan fungsi pegawai. Pengelolaan kendaraan dinas seperti pemeliharaan dan pembayaran pajak dilakukan sehingga pejabat atau pegawai yang menggunakan fasilitas tersebut terasa aman pada saat menggunakan dan tidak mengalami hambatan.

d. Layanan Manajemen SDM

Pada Tahun 2024, Layanan manajemen SDM telah melakukan Layanan bagi seluruh Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang rutin dilaksanakan, Dimana telah dilakukan layanan terhadap 706 orang dari target 441 orang. Berikut adalah Layanan Manajemen SDM yang dilakukan pada tahun 2024 di BPIP:

NO	LAYANAN	JUMLAH
1.	Pelantikan dan Perpindahan Tugas	148 Orang
2.	Kenaikan pangkat	75 Orang
3.	Kenaikan gaji berkala	120 Orang
4.	Satya Lencana Karyasatya	10 Orang
5.	Seleksi Terbuka	62 Orang
6.	Asesmen pegawai	166 Orang
7.	Pensiun	1 Orang
8.	Mutasi antar instansi	3 Orang
9.	Pengadaan CPNS	53 Orang
10.	Pengadaan PPPK	68 Orang

Selain itu pada tahun 2024 memiliki beberapa pencapaian yaitu:

a. Penilaian Sistem merit

Hasil penilaian Sistem Merit Tahun 2024 sebesar 333 dengan indeks 0,83 sehingga mendapatkan predikat sangat baik. Adapun aspek-aspek yang menjadi penilaian sistem merit seperti Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karier, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi.

b. Penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

Hasil penilaian IP ASN Tahun 2023 sebesar 69,45 dengan rincian Dimensi Kualifikasi: 24,04, Dimensi Kompetensi: 20,64, Dimensi Kinerja: 19,77, Dimensi Disiplin: 5,00.

c. Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN

Hasil penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapatkan nilai 80,55 dengan Kategori B Predikat Baik.

d. Penyusunan Revisi Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Penyusunan revisi Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja disesuaikan dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- e. Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi (SINERGI)
- f. Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMANTEN)
- g. Pengadaan ASN BPIP Tahun 2024

Pengadaan CPNS Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 mendapatkan formasi sejumlah 53 formasi.

Adapun jumlah pendaftar sebanyak 875 dengan jumlah submit sebanyak 769. Peserta yang lulus dalam proses seleksi administrasi sebanyak 687 dan yang lulus seleksi kompetensi dasar sebanyak 109 peserta, serta lulus seleksi akhir sebanyak 51 peserta.

- h. Pengadaan PPPK Tahun 2024

Pengadaan PPPK Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 mendapatkan formasi sejumlah 81 formasi.

Seleksi PPPK diadakan 2 tahapan yaitu Tahap I untuk tenaga non-ASN yang sudah terdata pada pangkalan data BKN dan Tahap II untuk tenaga non-ASN yang belum terdata pada pangkalan data BKN. Jumlah pendaftar tahap I sebanyak 38 peserta dan tahap II sebanyak 30 peserta.

i. Seleksi Terbuka Jabatan Deputy dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPIP

Seleksi Terbuka Jabatan Deputy dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-562/JP.00.00/02/2024 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Adapun jumlah peserta yang mengikuti seleksi administrasi dan seleksi makalah sebanyak 50 orang yang terdiri dari 17 pelamar jabatan deputy dan 33 pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama dan yang lulus seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama sebanyak 12 peserta.

j. Penyusunan Jabatan Fungsional Pembina Ideologi Pancasila

e. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Pada Tahun 2024, Layanan Pendidikan Pelatihan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

NO	LAYANAN	JUMLAH
1.	Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	2 orang
2.	Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya	2 orang
3.	Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	5 orang
4.	Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Analis Kebijakan	2 orang
5.	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pranata Komputer	3 orang
6.	Pelatihan E-Purchasing	5 orang
7.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. I	2 orang
8.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	6 orang
9.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	5 orang
10.	Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peranturan Perundang-undangan Ahli Muda	2 orang
11.	Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	2 orang

NO	LAYANAN	JUMLAH
12.	Pelatihan dan sertifikasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan	8 orang
13.	Pelatihan dan sertifikasi Audit Forensik FRAUD	4 orang
14.	Pelatihan Pembentukan Fasilitator Bela Negara	5 orang
15.	Pendidikan dan Pelatihan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan Bagi Pegawai BPPI	50 orang
16.	Pelatihan Jarak Jauh SKP, Core Values dan Smart ASN	57 orang
17.	Pelatihan Jarak Jauh Multimedia dan Desain Grafis	40 orang
18.	Pelatihan Jarak Jauh <i>Cyber Security Awareness</i>	43 orang
19.	Pelatihan Jarak Jauh Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Tugas Perkantoran	73 orang
20.	Pelatihan Jarak Jauh Digitalisasi Arsip	38 orang
21.	Pelatihan Professional Recognition Program for Qualified Government Internal Auditor	1 orang
22.	Pelatihan ECSc <i>Threshold Level For National Leadership Training Level I & Level II</i> Angkatan II Tahun 2024	1 orang
23.	Ujikom Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama	1 orang
24.	Ujikom Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	1 orang
25.	Ujikom Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama	6 orang
26.	Ujikom Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	3 orang
27.	Ujikom Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	21 orang
28.	Ujikom Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	2 orang
29.	Ujikom Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	1 orang
30.	Ujikom Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	3 orang
31.	Ujikom Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil	2 orang
32.	Ujikom Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	5 orang

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen SDM, BMN, dan ketatausahaan pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 51. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	
2.	Kegiatan Layanan Dukungan Voucher Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
3.	Proses Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor dan Plat Dinas Rahasia Untuk Pimpinan	
4.	Koordinasi Optimalisasi Sistem Pengadaan di Lingkungan BPIP	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Konsultansi Pemenuhan Bukti Dukung Indikator Manajemen Kinerja dan Pengembangan SDM Kematangan UKPBJ di LKPP	
6.	Koordinasi Percepatan Nilai Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan pada Indeks Tata Kelola Pengadaan di Lingkungan BPIP)	

F.4. Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 52. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi bagi dewan pengarah, staf khusus dewan pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli yang diberikan	Layanan Protokoler	1	1	100% (Layanan)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Nilai indeks keterbukaan informasi publik BPIP	Layanan Hubungan masyarakat	1	1	100% (Layanan)
	Layanan Hubungan masyarakat (SBKU)	1	1	100% (Layanan)
Nilai pengawasan kearsipan	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	1	100% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat, dan administrasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada tahun 2024 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%. Adapun layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Layanan Protokoler secara khusus bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada Pimpinan, dengan berfokus pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan stake holder sehingga mewujudkan tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan, pengamanan, dan administratif yang diberikan. Beberapa aktifitas kegiatan yang diberikan dalam layanan protokoler meliputi:
 1. Pengkoordinasian Layanan Tata Usaha;
 2. Pengkoordinasian Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan;
 3. Penyusunan Agenda Pimpinan;
 4. Fasilitasi dan Pendampingan Acara Pimpinan;
 5. Penyusunan Materi Pimpinan;
 6. Penyelenggaraan Rapat Unsur Pimpinan;

7. Fasilitasi Penerimaan Tamu Pimpinan;
8. Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila;
9. Pelatihan Layanan Keprotokolan; dan
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Layanan Protokoler.

Adapun terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Layanan Protokoler sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana layanan protokoler memenuhi standar tertentu dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam bentuk persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan dengan indikator kinerja yang telah terlaksana hingga tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan:
Menilai kepuasan peserta, tamu, dan pihak terkait terhadap layanan protokoler.
- 2) Ketepatan Waktu:
Memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan layanan protokoler sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Kesesuaian dengan Protokol dan Etiket Resmi:
Menilai sejauh mana layanan protokoler mematuhi protokol dan etiket yang berlaku.
- 4) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:
Menilai efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya selama pelaksanaan layanan protokoler.
- 5) Ketepatan Informasi:
Memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam layanan protokoler akurat dan tepat waktu.
- 6) Manajemen Risiko dan Keamanan:
Menilai kemampuan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan merespons risiko serta memastikan keamanan selama acara.

- 7) Koordinasi dan Kemitraan:
Menilai sejauh mana kolaborasi dan koordinasi antarinstansi atau pihak terkait dalam penyelenggaraan layanan protokoler.
- 8) Pelaporan dan Evaluasi:
Menilai kualitas pelaporan dan evaluasi terkait pelaksanaan layanan protokoler.
- 9) Pemanfaatan Teknologi:
Menilai sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan protokoler.
- 10) Ketersediaan dan Pelengkap Dokumentasi:
Menilai apakah semua dokumen dan catatan terkait protokoler telah tersedia dan lengkap.
- 11) Kemampuan Manajemen Krisis:
Menilai seberapa baik tim protokoler dapat menangani situasi darurat atau krisis selama acara.
- 12) Pelatihan dan Pengembangan SDM:
Menilai keterampilan dan pengetahuan staf yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan protokoler.

Penggunaan indikator kinerja guna mengukur dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan protokoler yang diselenggarakan. Persentase indeks kinerja Layanan Protokoler pemerintahan dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{Persentase Indeks Kinerja} = \left(\frac{\text{Skor yang Dicapai}}{\text{Skor Maksimum yang Dapat Dicapai}} \right) \times 100\%$$

- Skor yang Dicapai
Jumlah skor yang diperoleh dari hasil evaluasi atau pengukuran berbagai indikator kinerja. Skor ini diperoleh dari survei internal dan evaluasi kinerja lainnya.
- Skor Maksimum yang Dapat Dicapai

Jumlah maksimum skor yang dapat dicapai jika semua indikator kinerja memenuhi standar yang ditetapkan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Layanan Protokoler memperoleh skor 100 dari skor maksimum 100, maka persentase indeks kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indeks Kinerja} = (100/100) \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, indeks kinerja Layanan Protokoler pada Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi mencapai 100%. Persentase ini mencerminkan sejauh mana layanan protokoler memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan bahwa semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja Layanan Protokoler.

Layanan Protokoler telah dilaksanakan Tahun 2024. Kegiatan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi di wilayah DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Adapun layanan yang dilakukan berfokus pada pendampingan Unsur Pimpinan, Pengurusan tata usaha dan rumah tangga, serta pembuatan materi (berupa *speech notes* dan/atau bahan paparan), rapat pimpinan dan protokol kegiatan Unsur Pimpinan yang sejalan dengan pendampingan unsur pimpinan.

b. Layanan Hubungan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik BPIP

Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah suatu metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana lembaga publik, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya, memenuhi prinsip transparansi dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Penilaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa publik

memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, dan proses administrasi negara, yang pada akhirnya mendukung akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan publik.

Penilaian IKIP berlandaskan pada berbagai aturan hukum yang mengatur hak akses informasi publik, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik, serta kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut. Selain itu, aturan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi juga diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (KIP) seperti Peraturan KIP No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Secara umum, penilaian IKIP dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator yang mencerminkan sejauh mana badan publik memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Indikator-indikator tersebut dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan Informasi: Mengukur sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara terbuka, baik melalui website atau media lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP.
2. Aksesibilitas Informasi: Menilai kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi yang disediakan, termasuk kemudahan navigasi pada situs web badan publik, serta cara dan prosedur untuk mendapatkan informasi.
3. Kualitas Informasi: Mengevaluasi kelengkapan, kejelasan, dan ketepatan waktu informasi yang disediakan oleh badan

publik, apakah informasi tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Informasi.

4. Pelayanan Permohonan Informasi: Mengukur responsivitas dan efisiensi dalam menangani permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat, serta apakah prosedur yang diikuti transparan dan tidak berbelit-belit.
5. Partisipasi Masyarakat: Mengidentifikasi sejauh mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan atau pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan publikasi informasi.
6. Sanksi dan Pengawasan: Melihat sejauh mana badan publik mematuhi aturan keterbukaan informasi, serta adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang diberlakukan jika badan publik gagal memenuhi kewajibannya.

Penilaian terhadap indikator-indikator tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi atau lembaga independen yang ditunjuk, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang tingkat keterbukaan informasi suatu badan publik. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna memperkuat demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.

Adapun beberapa hal yang sudah dilakukan oleh BPIP dalam proses penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik meliputi:

1. Penilaian atas sarana dan prasarana BPIP;
2. Penilaian atas kualitas informasi yang diberikan BPIP kepada publik;
3. Penilaian atas jenis informasi yang diberikan BPIP kepada publik;

4. Penilaian atas komitmen BPIP melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Penilaian atas inovasi dan strategi dalam BPIP; dan
6. Penilaian atas digitalisasi di lingkungan BPIP.

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024 tercatat bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah berhasil meraih peringkat “Informatif” dengan skala penilaian sebesar 91,40 secara Nasional. BPIP berhasil menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Pencapaian ini menjadi landasan penting dalam upaya terus-menerus meningkatkan standar keterbukaan dan akuntabilitas lembaga di masa depan.

- c. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan sebagai pengukuran indeks kinerja. Tujuan dari pengukuran ini mencakup:
 1. Perencanaan dan Pengambil Keputusan:
Memastikan data dan informasi arsip yang akurat untuk mendukung perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang efektif.
 2. Dukungan Pelayanan Publik:
Menyediakan akses yang cepat dan akurat terhadap informasi arsip yang diperlukan untuk mendukung pelayanan publik.
 3. Pelindungan Terhadap Hak Keperdataan Rakyat:

Memastikan keamanan dan integritas dokumen penting seperti buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, ijazah, dan sertifikat.

4. Bahan Pertanggungjawaban:

Menyediakan basis data yang dapat diandalkan untuk pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan organisasi.

5. Pelindungan Aset dan Kekayaan Intelektual:

Menjaga keberlanjutan dan keutuhan informasi yang berharga sebagai aset dan kekayaan intelektual organisasi.

6. Pembelajaran Bagi Generasi Sekarang dan yang Akan Datang:

Menyimpan dan menyajikan informasi yang berharga sebagai sumber pembelajaran bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

7. Identitas dari Memori Kolektif:

Menyajikan dan memelihara arsip sebagai identitas dan memori kolektif masyarakat.

8. Pelindungan Eksistensi Bangsa (Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa):

Menggunakan arsip sebagai alat pemersatu dan penjaga eksistensi bangsa.

9. Sebagai Alat Bukti Hukum:

Menyediakan arsip sebagai bukti hukum yang sah dan dapat diandalkan.

Dengan mengukur indeks kinerja Layanan Penyelenggaraan Kearsipan melalui indikator ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem kearsipan berkontribusi secara positif pada tujuan-tujuan strategis yang lebih luas. Pencapaian Layanan Penyelenggaraan Kearsipan pada tahun 2024 secara pengukuran Nasional telah berhasil mendapatkan nilai hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2024 yaitu 81,32 Kategori A (Memuaskan) meningkat dari tahun sebelumnya yaitu kategori BB (Sangat Baik).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menetapkan 4 (empat) instrumen kearsipan, yaitu berupa Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Dinamis (SKKAD), dan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pengelolaan Kearsipan juga telah aktif berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Serta telah menjadi anggota Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Unit Kearsipan BPIP telah mengupload sekitar 200 dokumen pada SIKN. Unit Kearsipan juga telah melakukan penataan arsip di Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023. Saat ini BPIP sudah menggunakan SRIKANDI, dan membangun proses bisnis secara menyeluruh berupa penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan (pemberkasan) termasuk penerapan tanda tangan elektronik yang bersertifikat BSSN.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat dan administrasi pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 53. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi , Hubungan Masyarakat dan Administrasi

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pendampingan Kegiatan Unsur Pimpinan- Dewan Pengarah (Protokol, Tata Usaha, dan Peliputan) (Januari s.d. Desember 2024)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Ratas Unsur Pimpinan Bpip (Januari s.d. Desember 2024)	
3.	Rapat Pleno Unsur Pimpinan Bpip (Januari s.d. Desember 2024)	
4.	Kegiatan Pemilihan Arsiparis Teladan, Pengenputan Aplikasi SIKN dan JIKN serta Pembuatan Daftar Berkas Arsip Aktif Periode Januari s.d Juli 2024 (Jakarta, tanggal 22 s.d. 23 Oktober 2024)	
5.	Penguatan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan Evaluasi Tata Naskah Dinas (TND) di Lingkuagn Ketatausahaan dan Unit Kearsipan BPIP (Jakarta, tanggal 21 s.d. 22 November 2024)	

F.5. Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 54. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Layanan Audit Internal	1	1	100% (Dokumen)
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP	2,5	2,94	117% (Nilai)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen pengawasan internal adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Tahun Anggaran 2024 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%.

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 Organisasi dan tata Kerja BPIP Bahwa dalam melaksanakan tugas Biro Pengawasan Internal mempunyai Tugas dan fungsi melakukan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama. Sebagaimana Keputusan Sekretaris Utama Nomor 5 tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Biro Pengawasan Internal

Tahun 2024 dimana memiliki Program Kerja, antara lain Audit, Reviu, Evaluasi, Pengawasan Lainnya.

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti;
2. Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d 5); dan
3. Prosentase Laporan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator atau alat ukur dalam mencapai sasaran kegiatan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan Sasaran Program. Di samping itu indikator kinerja kegiatan digunakan untuk mengukur efektivitas perencanaan pengawasan Biro Pengawasan Internal. Indikator Kinerja Biro pengawasan Internal 2 (dua) sasaran kegiatan Perjanjian Kinerja dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu:

- a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti;

Pada Tahun 2024 Capaian indikator kinerja kegiatan pelaksanaan manajemen pengawasan internal pada indikator kinerja kegiatan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dimana merupakan hasil pengawasan dari evaluasi BPK yang telah ditindaklanjuti capaian dengan persentase 100%. (Layanan selama 12 bulan).

- b. Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d 5);

Pada tahun 2024 nilai Tingkat SPIP tahun 2024 masih dalam penilaian secara mandiri dimana dalam penilaian mandiri didapatkan nilai 4,27 dan Penjaminan Kualitas dengan nilai 3,50. Dikarenakan nilai Tingkat Maturitas SPIP untuk tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP. Namun, dapat dilaporkan nilai BPKP untuk tahun 2023 adalah 2,94 pada

posisi (Level Maturitas berkembang). Beberapa hal yang dilakukan dalam Meningkatkan Maturitas SPIP di tahun 2024 yaitu:

1. Kegiatan Tindak Lanjut Evaluasi Penilaian Mandiri atas Penguatan Kapabilitas APIP BPIP Tahun 2023 dan Internalisasi Penilaian Mandiri atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) Tahun 2024 di Lingkungan BPIP;
2. Penguatan Standar Mutu Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan BPIP dengan Penguatan Regulasi Pengawasan Internal di BPIP;
3. Percepatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila "Penguatan dalam Zona Integritas";
4. Forum Diskusi Finalisasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan BPIP Melakukan Diskusi Finalisasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan BPIP Tahun 2024; dan
5. Pengembangan SDM Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Madya.

Adapun detail mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dilakukan oleh Biro Pengawasan Internal yang telah dilakukan sampai dengan periode Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perencanaan Pengawasan PKPT Januari s.d Desember	Jumlah	
			Target Januari s.d Desember	Realisasi Januari s.d Desember
1.	Jumlah Laporan Evaluasi, Reviu, Audit, Pemantauan dan Pengawasan lainnya	1.1 Jumlah Laporan Hasil Audit	2 Laporan	2 Laporan
		1.2 Jumlah Laporan Hasil Reviu	11 Laporan	19 Laporan
		1.3 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan	8 Laporan	10 Laporan
		1.4 Jumlah Lapooran Hasil Evaluasi	14 Laporan	11 Laporan
		1.5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lainnya	2 Laporan	7 Laporan

Rincian lebih Lanjut target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Biro Pengawasan Internal Tahun 2024 telah menghasilkan beberapa dokumen yaitu:

1. Jumlah realisasi laporan hasil Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama Laporan Audit
1.	Audit Pengadaan Meubelair Untuk Ruang Kerja Kepala BPIP Tahun Anggaran 2024
2.	Audit Kinerja Pada Kedeputusan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Tahun 2024

2. Jumlah realisasi laporan hasil Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama Laporan Reviu
1.	Laporan Reviu LK Tahun Anggaran 2023 (Unaudited)
2.	Laporan Reviu LK Tahun Anggaran 2023 (Audited)
3.	Laporan Reviu LK semester 1 Tahun 2024 (Unaudited)
4.	Laporan Reviu LK Triwulan 3 Tahun 2024 (Unaudited)
5.	Laporan Reviu PAPBJ TW I 2024
6..	Laporan Reviu PAPBJ TW II 2024
7.	Laporan Reviu PAPBJ TW III 2024
8.	Laporan Reviu PAPBJ TW IV 2024

No.	Nama Laporan Reviu
9.	Laporan Hasil Reviu Biro Pengawasan Internal Atas Revisi DIPA Tahun 2024
10.	Laporan Reviu Usulan Anggaran Paskibra (Non PKPT)
11.	Laporan Reviu PIPK
12.	Laporan Reviu LKJIP
13.	Laporan Reviu RKBMN BPIP Tahun 2024
14.	Laporan Reviu Dokumen RKBMN BPIP Tahun 2026
15.	Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
16.	Pagu Indikatif BPIP TA 2025
17.	Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
18.	Pagu Alokasi BPIP TA 2025
19.	Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 (un-Audited)

3. Jumlah realisasi laporan hasil Pemantauan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemantauan
1.	Laporan Hasil Monitoring Percepatan Tindaklanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 s.d.Semester I Tahun 2023 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Instansi Lain Terkait.
2	Laporan Hasil Monitoring Kedua Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
3.	Laporan Monitoring Kegiatan Publikasi Artikel Pancasila Jurnal Keindonesiaan Volume 4 Nomor 1 dan Pembimbingan Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia di Makassar Tanggal 23-26 April 2024.
4.	Laporan Monitoring Kegiatan Pembudayaan Gotong Royong Dalam Rangka Ngaji Pancasila dan Haul WR Supratman Bersama Tokoh Lintas Agama dan Santri di Surabaya Provinsi Jawa Timur.
5	Laporan Monitoring Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Pancasila dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat
6.	Hasil Laporan Kegiatan pelaksanaan Monitoring Realisasi Kegiatan dan Anggaran di Kedeputan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Periode 1 Januari 2024 sampai dengan Cutt-Off tanggal 15 Maret.
7.	Koordinasi dan Pendampingan Tim Pemeriksaan atas Keuangan Rencana Aksi Tematik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 (Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> -BAAS).
8.	Monitoring Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Civitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia
9.	Reviu Atas Dokumen Pertanggungjawaban Pengganti Biaya Transport Peserta Pada Kegiatan Sosialisasi PIP Tahun 2023 di FU Hotel Banjarmasin
10.	Laporan Pemantauan Kegiatan Memperkokoh Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Tahun 2024

4. Adapun jumlah realisasi laporan hasil Evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Evaluasi
1.	Hasil Evaluasi On Going RB Th 2023 TW Ke IV
2.	Hasil Evaluasi Ex-Ante Reformasi Birokrasi Th 2024
3.	Hasil Evaluasi On Going RB Th 2024 TW Ke I
4.	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan BPIP
5.	Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Deputi Bidang Hukum, Evaluasi, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
6.	Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Advokasi dan Pengawasan Regulasi
7.	Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
8.	Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
9.	Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
10.	Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Sekretaris Utama
11.	Evaluasi SAKIP Tahun 2023 BPIP

5. Adapun jumlah realisasi laporan hasil Pengawasan Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama hasil Pengawasan Lainnya
1.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Semester II Tahun 2023 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2.	Pendampingan Pemeriksaan BPK LK Tahun 2023 periode Januari – April.
3.	Koordinasi dan Pendampingan Tim Pemeriksaan atas Keuangan Rencana Aksi Tematik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 (Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> -BAAS).
4.	Pendampingan Tindaklanjuti Audit Kinerja dan Rekomendasi BPK Tahun 2022 – semester I Tahun 2023.
5.	Menghadiri Undangan Pelantikan QGIA dan Seminar Nasional Internal Audit 2024 (<i>Cultural Transformation: Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management</i>)
6.	Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Semester II Tahun 2024
7.	Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP Tahun 2024

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen pengawasan internal pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 55. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Audit Kinerja Pada Kedeputan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 15 Oktober s.d. 29 November 2024)	
2.	Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Semester II Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 7 November s.d. 20 Desember 2024)	
3.	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 25 November s.d. 11 Desember 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Audit Pengadaan Meubelair Untuk Ruang Kerja Kepala BPIP Tahun Anggaran 2024 (Jakarta, tanggal 2 s.d. 24 Desember 2024)	
5.	Menghadiri Undangan Pelantikan QGIA dan SNIA 2024 di Bali (Bali, tanggal 3 s.d. 6 Desember 2024)	

F.6. Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi Pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 56. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	Layanan Data dan Informasi	1	1	100% (Layanan)
	Indeks SPBE	2,50	4,07	162% (Nilai)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen data dan informasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Tahun 2024 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%. Berikut adalah Layanan yang telah diberikan Pusat Data dan Teknologi sampai dengan:

Di Tahun 2024 ini, Pusat Data dan Teknologi Informasi, telah melakukan beberapa pencapaian guna mendukung tercapainya nilai indeks SPBE yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Saat ini sudah dilaksanakan beberapa kegiatan baik di bidang keamanan data dan informasi, maupun di bidang pengembangan aplikasi BPIP. Berikut rincian pencapaian hingga bulan September 2024, antara lain:

1. Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting dalam pemerintahan karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa layanan TIK sangat penting dalam konteks pemerintahan:

- Peningkatan Efisiensi Administrasi

Penggunaan TIK memungkinkan untuk mengotomatiskan banyak proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual, yang mengurangi beban kerja dan meningkatkan kecepatan pemrosesan data

- Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem informasi yang transparan memungkinkan publik untuk melihat bagaimana anggaran dikelola, bagaimana kebijakan diambil, dan bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat,

sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.

- Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat dan Akurat

Dengan TIK, data yang terkumpul bisa diproses dan dianalisis dengan cepat, memberikan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan.

- Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah

TIK memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai lembaga pemerintahan. Sistem berbasis digital memungkinkan berbagai instansi untuk berbagi informasi dan beKerja Sama dalam menangani isu-isu nasional dengan lebih efektif. Misalnya, aplikasi SAKTI untuk penganggaran, Srikandi untuk persuratan, aplikasi Transparansi untuk Paskibraka, dan lain sebagainya.

- Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Data

Teknologi memungkinkan pemerintah untuk mengamankan data sensitif. Sistem keamanan yang baik dapat melindungi data dari ancaman peretasan, penyalahgunaan, atau kebocoran informasi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP telah melaksanakan beberapa kegiatan baik di bidang keamanan data dan informasi, maupun di bidang pengembangan aplikasi dalam rangka memenuhi sasaran kinerja layanan TIK. Berikut rincian pencapaian sampai dengan bulan Desember 2024, antara lain:

- a. Pemasangan *Secure Socket Layer (SSL) Website* BPIP
Periode 2024 – 2025

Pusat Data dan Teknologi Informasi telah melakukan pembaharuan periodiasi pada SSL untuk website-website BPIP untuk menjamin keamanan website BPIP:



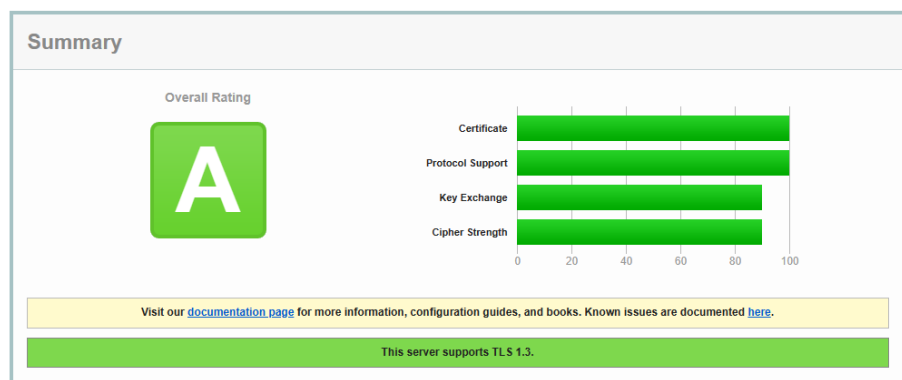
b. Upgrade Performa *Secure Socket Layer (SSL)* Website BPIP Periode 2024 – 2025

SSL BPIP saat ini mendukung versi TLS 1.3, dimana versi TLS 1.3 ini memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dari versi sebelumnya (TLS 1.2) selain itu, versi TLS 1.3 ini memiliki kecepatan handshake yang jauh lebih cepat sehingga website dapat diakses lebih cepat dari sebelumnya.

SSL Report: surel.bPIP.go.id (103.6.34.77)

Assessed on: Tue, 26 Mar 2024 05:01:14 UTC | [Hide](#) | [Clear cache](#)

[Scan Another »](#)



c. Pelaksanaan *Backup as a Service (BaaS)* pada Website dan Server BPIP di Pusat Data Nasional Kementerian Kominfo

Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP juga sudah melakukan pengamanan data pada website dan server-server BPIP di PDN Kominfo. Dengan melakukan permohonan backup

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DI REKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 11010 Telp/Fax. (021) 3441391. www.kominfo.go.id

Jakarta, 22 Februari 2024

**Layanan Pusat Data Nasional Sementara
(Government Cloud)**

Permohonan BaaS (Backup)

Menjawab adanya permohonan REQ-KMF-022024-05168 dengan no tiket **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila** dari Kami dari pihak EOS Kominfo telah dipenuhi sebagai berikut :

No	List VM	Cpu (GHz)	Memory (GB)	Storage (GB)	Nama VM	IP VM	vApps Group
1	Server Sipendekar BPIP	10	8	100	VM17SIPENDEKAR	10.95.0.18	vAppDeputi-5
2	Server Simpati BPIP	10	12	1300	VM39SIMPATI-BPIP	10.95.0.40	vAppSestama
3	Server Simpul Kendali BPIP	8	8	125	VM45SIMPUL-BPIP	10.95.0.46	vAppDeputi-5
4	Server Sendadu BPIP	8	8	100	VM49SERDADU-BPIP	10.95.0.50	vAppDeputi-5

Name ↑ ⚙ B2_BPIP_VM17SIPENDEKAR_050224	Type VMware Backup	Objects 1
---	-----------------------	--------------

Name ↑ ⚙ B2_BPIP_VM45SIMPUL-BPIP_060224	Type VMware Backup	Objects 1
--	-----------------------	--------------

Name ↑ ⚙ B2_BPIP_VM49SERDADU-BPIP_060224	Type VMware Backup	Objects 1
---	-----------------------	--------------

Name ↑ ⚙ B2_BPIP_VM39SIMPATI-BPIP_060224	Type VMware Backup	Objects 1
---	-----------------------	--------------

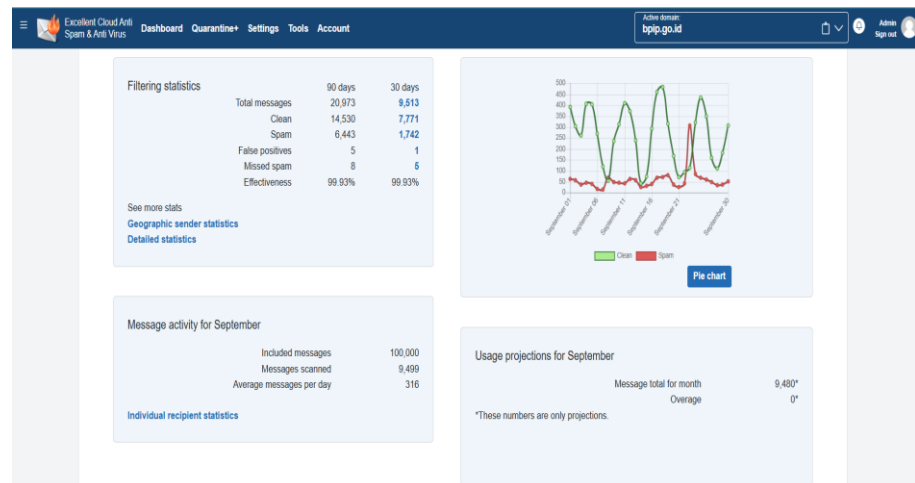
d. Pencapaian Keamanan pada Lalu Lintas Email Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

➤ *Anti Spam*

Anti Spam adalah sebuah teknologi yang bertujuan untuk memfilter semua email masuk dan mencegah spam yang berpotensi berbahaya masuk ke kotak masuk Anda. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menghindari malware dan virus, karena tidak ada peluang untuk mengklik tautan berbahaya yang disertakan dalam beberapa e-mail spam.

BPIP melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi saat ini menerapkan teknologi Anti Spam tersebut, guna memfilter email masuk sehingga terhindar dari Malware, Spam, Phising dan tindakan jahat lainnya. Saat ini tercatat dalam 30 hari terakhir sudah total 9.513 E-mail telah dilakukan deteksi dan sekitar

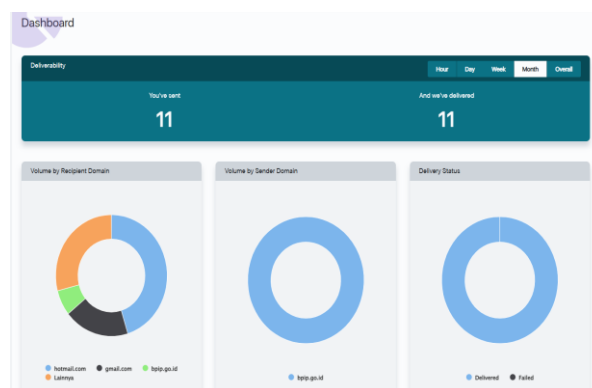
sebanyak 1.742 ditandai sebagai spam. Dengan hal tersebut, lalu lintas email di lingkungan BPIP terpantau aman



➤ SMTP Relay

SMTP Relay adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk memfilter e-mail keluar dan mencegah adalah overload trafik yang tidak diinginkan dari suatu Server Mail. Selain itu SMTP Relay juga berfungsi untuk mencari jalan terbaik untuk proses pengiriman email, serta SMTP Relay juga membantu pada sistem Flagging (cap/tanda) pada Server yang ditanamkan agar dinilai Baik pada lalu lintas Global.

Dalam 30 hari terakhir, terdapat 11 email yang dikirimkan keluar dari domain BPIP dan semuanya berhasil terkirim dengan baik, dan tidak ada tanda-tanda anomali trafik berlebihan dari arah domain BPIP menuju domain luar. Sehingga Email BPIP ter-Flag Baik (Good).

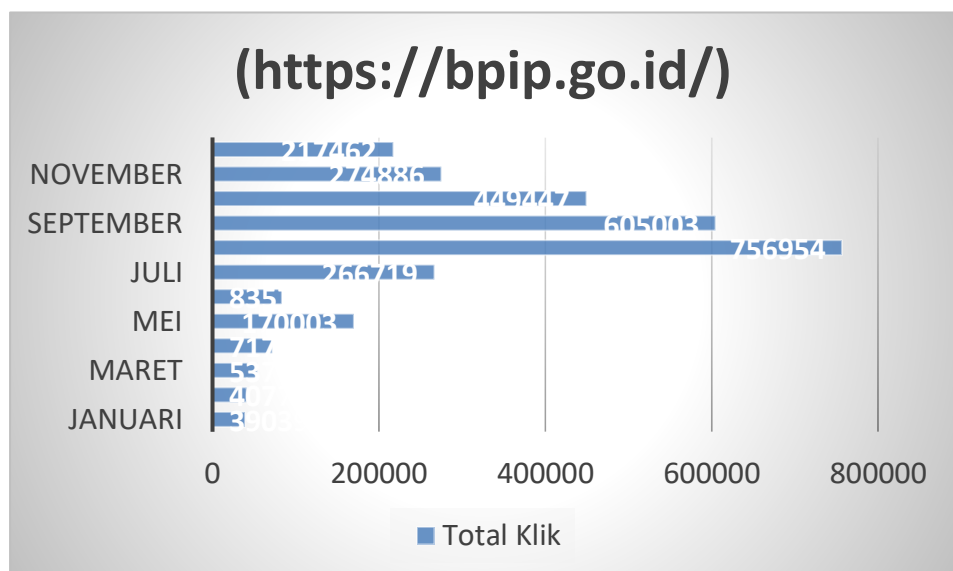


e. Pencapaian Penilaian Penyelenggaraan TTIS/CSIRT

Kegiatan Penilaian Penyelenggaraan TTIS/CSIRT dilaksanakan dengan mengukur tingkat kematangan penanganan insiden keamanan siber dan melakukan wawancara dengan personil Tim CSIRT berkaitan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi penyelenggaraan keamanan siber meliputi aspek *people - process - technology*. Berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas penangan insiden keamanan siber, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2022 adalah 0,99 sedangkan hasil penilaian pada tahun 2024 adalah 2,52, sehingga ada kenaikan sebanyak 1,53 poin.

f. Kunjungan website utama BPIP

Selama Tahun 2024 website utama BPIP <https://bpip.go.id> telah dikunjungi sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE bertujuan mencapai tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Instansi perlu meningkatkan indeks SPBE karena indeks SPBE merupakan indikator yang penting untuk menilai efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. SPBE membawa sejumlah manfaat signifikan bagi transformasi digital pemerintahan. Salah satunya adalah SPBE dapat meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengotomatisasi proses-proses pemerintahan. Hal ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga membuka jalan untuk proses pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, SPBE memungkinkan publik untuk mengakses informasi pemerintahan dengan lebih mudah dan cepat, menciptakan tingkat transparansi yang tinggi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi, telah melakukan beberapa pencapaian guna mendukung tercapainya nilai indeks SPBE yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hasil evaluasi Indeks SPBE Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2023 mendapat nilai 3,11. Pada tahun 2024 Indeks SPBE BPIP meningkat menjadi 4,07 dan melampaui target yang direncanakan di angka 4,00.

Domain/Aspek	Evaluasi 2023	Evaluasi 2024
Kebijakan SPBE	3,00	5,00
Tata Kelola SPBE	2,60	4,25
Manajemen SPBE	2,64	3,25
Layanan SPBE	3,60	4,07
Indeks SPBE	3,11	4,07

Ketercapaian indikator kinerja tersebut di atas dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

- a. Tersusunnya Draft Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) BPIP

Pusat Data dan Teknologi Informasi tengah mengusulkan Kebijakan Internal di BPIP terkait SMKI, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai SPBE BPIP terutama pada indikator yang berkaitan dengan Keamanan Sistem Informasi, diantaranya pada Indikator 8 (Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi), 22 (Penerapan Manajemen Keamanan Informasi), dan 31 (Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE).



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR TAHUN 202....
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI)
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset data dan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka perlu melakukan pengelolaan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen data dan informasi pada Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 57. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Wawancara Penilaian Mandiri SPBE BPIP (Jakarta, tanggal 18 Oktober 2024)	
2.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan SPBE BPIP Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 4 s.d. 5 Desember 2024)	
3.	Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan ISO 27001 dan Koordinasi Teknis Pembuatan Aplikasi Kerja Sama (Semarang, tanggal 22 s.d. 25 Juli 2024)	
4.	Rapat Tim Koordinasi dan Evaluasi Evidence SPBE di Lingkungan BPIP Tahun 2024 (Mataram, tanggal 12 s.d. 16 Agustus 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat Koordinasi Penyampaian Data Prioritas BPIP 2024 untuk Satu Data Indonesia di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 26 Agustus 2024)	
6.	Rapat Pemutakhiran Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 9 s.d. 12 September 2024)	

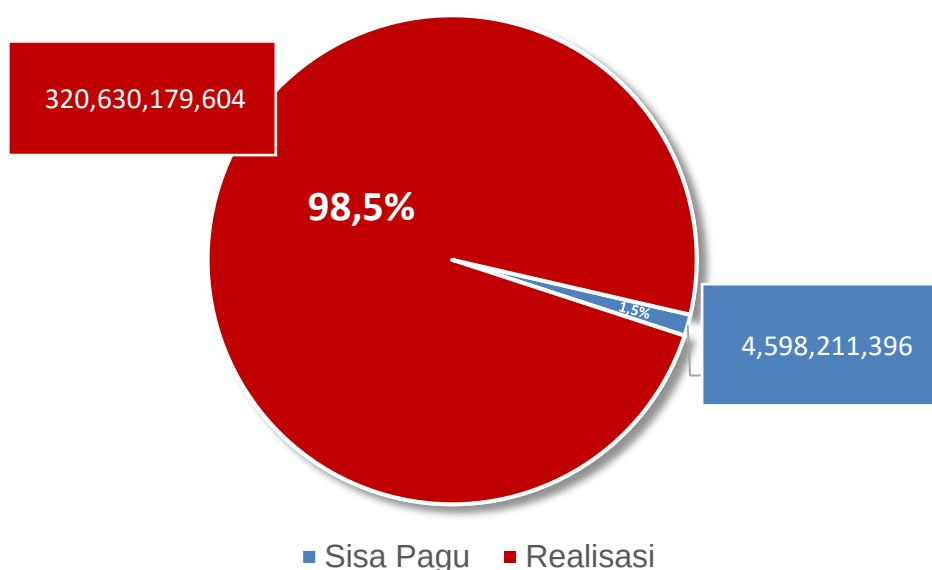
BAB III REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Tahun Anggaran 2024 BPIP mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp325.228.391.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Anggaran digunakan mendukung 2 Program, yaitu:

- Program PIP, sebesar Rp135.965.396.000,00;
- Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp189.262.995.000,00.

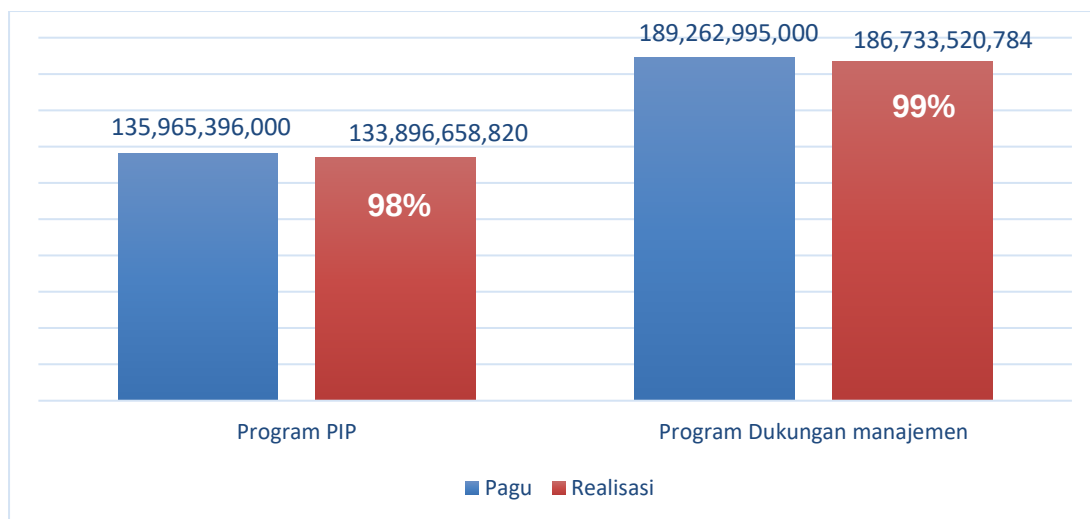
Realisasi Anggaran hingga 31 Desember 2024 (sumber: aplikasi SAKTI) adalah:

Realisasi Anggaran Total: **Rp320.630.179.604,00** (tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar **98,5%** dari pagu.



Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total

Realisasi anggaran per program:



Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program

Adapun realisasi anggaran berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Sekretariat Utama		189,262,995,000	186,733,520,784	98.66%	2,529,474,216
1	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	31,350,000,000	31,081,315,266	99.14%	268,684,734
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	133,673,924,000	131,658,443,452	98.49%	2,015,480,548
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	9,851,071,000	9,746,054,516	98.93%	105,016,484
4	Biro Hukum dan Organisasi	8,250,000,000	8,126,672,014	98.51%	123,327,986
5	Biro Pengawasan Internal	2,400,000,000	2,385,202,365	99.38%	14,797,635
6	Pusat Data dan Informasi	3,738,000,000	3,735,833,171	99.94%	2,166,829
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		58,323,191,000	57,392,477,758	98.40%	930,713,242
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama	6,479,038,000	6,430,512,527	99.25%	48,525,473
2	Direktorat Sosialisasi,	35,344,153,000	34,506,193,446	97.63%	837,959,554

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
3	Komunikasi, dan Jaringan Direktorat Pembudayaan	16,500,000,000	16,455,771,785	99.73%	44,228,215
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		7,727,000,000	7,675,390,811	99.33%	51,609,189
1	Direktorat Analisis dan Sinkronisasi	3,375,000,000	3,331,905,310	98.72%	43,094,690
2	Direktorat Advokasi	2,702,000,000	2,693,641,482	99.69%	8,358,518
3	Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi	1,650,000,000	1,649,844,019	99.99%	155,981
Deputi Bidang Pengkajian Materi		11,250,000,000	11,203,453,177	99.59%	46,546,823
1	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,350,000,000	4,313,954,522	99.17%	36,045,478
2	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,450,000,000	3,440,727,377	99.73%	9,272,623
3	Direktorat Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,450,000,000	3,448,771,278	99.96%	1,228,722
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		45,425,575,000	44,597,859,271	98.18%	827,715,729
1	Direktorat Perencanaan, Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	6,847,676,000	6,485,871,416	94.72%	361,804,584
2	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	26,295,619,000	25,942,354,115	98.66%	353,264,885
3	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	12,282,280,000	12,169,633,740	99.08%	112,646,260
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		13,239,630,000	13,027,477,803	98.40%	212,152,197
1	Direktorat Pengendalian	3,356,512,000	3,342,736,164	99.59%	13,775,836
2	Direktorat Evaluasi	3,127,338,000	2,969,210,596	94.94%	158,127,404
3	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	6,755,780,000	6,715,531,043	99.40%	40,248,957
TOTAL		325,228,391,000	320,630,179,604	98.59%	4,598,211,396

BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN

Bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi unit kerja dalam rangka mencapai Sasaran Program dan kegiatan. Terhadap kendala tersebut dilakukan upaya tindaklanjut. Usulan rekomendasi merupakan upaya perbaikan guna peningkatan kinerja di waktu mendatang. Kendala dan tindak lanjut atau rekomendasi atau usulan perbaikan dikelompokkan per Sasaran Program, yaitu:

1. Kendala dan rekomendasi terwujudnya hubungan antar lembaga, Kerja Sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 1. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya hubungan antar lembaga, Kerja Sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase penilaian atas efektivitas HAL dan Kerja Sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Masih Kurangnya SDM 2. Beluma adanya unit kerja yang fokus pada perencanaan tindak lanjut Kerja Sama 3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi atas Kerja Sama yang telah ditandantangani 4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana komunikasi antar lembaga 5. Belum adanya sistem informasi Kerja Sama	1. Memaksimalkan SDM yang tersedia. 2. Menyusun Perencanaan Kerja Sama Per Tahun yang ditetapkan oleh Kepala BPIP sesuai Perban 6 Tahun 2021. 3. Melakukan sinkronisasi berupa penyusunan peluang rencana aksi Kerja Sama antara internal BPIP dengan mitra kerja BPIP. 4. Membentuk Forum Koordinasi/komunikasi Kerja Sama lintas Kementerian / Lembaga. 5. Membuat Sistem Informasi Manajemen Kerja Sama.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi Kerja Sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas yang ditindaklanjuti	1. Masih banyaknya kegiatan yang bersifat sektoral dan belum memanfaatkan dasar Nota Kesepahaman untuk menjadi landasan mencapai <i>output</i> dan <i>outcome</i>. 2. Dibutuhkan suatu instrumen untuk memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap optimalisasi Kerja Sama pembinaan ideologi Pancasila dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Kerja Sama	1. Secara formal dan informal menjalin komunikasi dengan berbagai lintas sektor Kementerian/Lembaga/Organisasi Sosial Politik dan Badan Hukum Lainnya, salah satu bentuknya yaitu pelaksanaan <i>Quick Win</i> Pembentukan Forum Koordinasi/Komunikasi Kerja Sama lintas Kementerian/Lembaga. 2. Membuat Sistem Informasi Manajemen Kerja Sama sebagai alat dalam mendukung fungsi Kerja Sama dari perencanaan sampai Monitoring dan Evaluasi
Persentase rekomendasi Kerja Sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang nonprioritas yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya kesepahaman dalam melakukan mekanisme penyusunan naskah Kerja Sama 2. Belum adanya sinkronisasi antara program BPIP dengan unit kerja teknis pelaksana 3. Belum adanya tanggung jawab dari pengurus Kerja Sama dalam menyusun rencana aksi 4. Belum adanya anggaran yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang pra dan pasca penyusunan Kerja Sama	1. Menyusun NSPK terkait petunjuk teknis mekanisme penyusunan naskah Kerja Sama. 2. Penyusunan perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh Unit kerja teknis pelaksana 3. Memfasilitasi pertemuan antara pengusul dengan mitra Kerja Sama BPIP 4. Perlunya anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan pra dan pasca Kerja Sama
Persentase konten sosialisasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya penyusunan dan kajian komprehensif tentang materi Sosialisasi PIP 2. Jumlah personil pendukung terbatas	1. Perlu dilakukan kajian komprehensif tentang strategi komunikasi dengan melibatkan pakar, praktisi, dan akademisi, serta publik 2. Diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia administrasi dan kegiatan teknis.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase strategi komunikasi terhadap isu PIP yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya kajian komprehensif tentang strategi komunikasi PIP 2. Belum adanya instrumen khusus untuk mengetahui jangkauan pemberitaan, jangkauan program radio, dan rating program BPIP pada media televisi 3. Jangka waktu kontrak yang panjang pada pelaksanaan kegiatan di media online 4. Jumlah personil pendukung terbatas	1. Perlu dilakukan kajian komprehensif tentang strategi komunikasi dengan melibatkan pakar, praktisi, dan akademisi, serta publik 2. Belum adanya instrumen khusus untuk mengetahui jangkauan pemberitaan, jangkauan program radio, dan rating program BPIP pada media televisi 3. Dilakukan beberapa mekanisme/tahapan kontrak secara termin 4. Diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia yang membantu pelaksanaan administrasi dan kegiatan teknis.
Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan jaringan yang diselesaikan	Proses pemindahan POK	Kegiatan teknis yang berkaitan dengan Pengembangan Jaringan dilakukan mekanisme pengajuan kepada unit kerja Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi
Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila	1. Belum adanya instrumen pengukuran yang menjadi acuan efektivitas	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait
Persentase rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Dibutuhkan pedoman pelaksanaan pembudayaan Pancasila yang segmented sesuai target sasaran	1. Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan pembudayaan Pancasila yang lebih segmented sesuai target sasaran
Persentase jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila	1. Belum ada konektivitas antar komunitas sehingga dapat dipantau secara optimal melalui media sosial atau internet; dan administrasi keuangan	1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait guna memfasilitasi jejaring komunitas melalui platform digital terpadu untuk memetakan dan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	2. Tidak ada monitoring berkelanjutan untuk pembinaan ideologi Pancasila pada komunitas.	memantau aktivitas komunitas secara <i>realtime</i> ; dan 2. Membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk mendukung pembinaan ideologi Pancasila secara berkelanjutan.

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- a) Penyusunan NSPK dalam bentuk Peraturan Badan yang diturunkan dalam Petunjuk Teknis terkait dengan Kerja Sama pembinaan ideologi Pancasila.
- b) Menyusun program/kegiatan dalam kaitan optimalisasi Kerja Sama PIP dalam rangka efektivitas Kerja Sama PIP;
- c) Mengusulkan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk perencanaan kegiatan pra dan pasca Kerja Sama PIP untuk memfasilitasi efektivitas dari suatu Kerja Sama;
- d) Dilakukan koordinasi antara Kedeputian I BPIP dengan Kedeputian lain BPIP untuk penguatan kembali ruang lingkup dari Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati agar mudah dipahami dan dapat di implementasikan dalam kegiatan nyata;
- e) Dilakukan peninjauan/evaluasi terhadap nota kesepahaman dan perjanjian Kerja Sama yang telah ditanda tangani yang sudah lewat masa berlakunya agar seluruh kegiatan Kerja Sama dapat dilaksanakan dengan optimal.
- f) Penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan prioritas kerja Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
- g) Diperlukan alat atau instrumen evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas kegiatan Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan program di periode berikutnya;

- h) Perlunya standardisasi materi pembinaan Ideologi Pancasila serta peningkatan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga yang telah beKerja Sama dengan BPIP untuk memastikan pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan komunikasi yang lebih tepat, efektif, dan massif di seluruh wilayah Indonesia;
- i) Peningkatan kapabilitas pegawai Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi melalui program pelatihan dan bimbingan teknis untuk mendukung pencapaian *output* kerja dan outcome kinerja secara optimal;
- j) Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat melalui peningkatan sinergitas dan gotong royong antar unit kerja di lingkungan BPIP serta penguatan Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah;
- k) Optimalisasi penggunaan media sosial dan ruang publik sebagai sarana strategis untuk menyebarkan materi sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila secara massif kepada masyarakat;
- l) Penyusunan dan pengajuan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan program secara efektif dan efisien untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- m) Mensosialisasikan hasil rekomendasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- n) Melaksanakan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengadakan kegiatan atau uji coba implementasi hasil rekomendasi kebijakan pembudayaan;
- o) Mengembangkan platform digital untuk mendukung jaringan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara terintegrasi;
- p) Membuat dan mengelola basis data jaringan komunitas serta ikon prestasi Pancasila;
- q) Menyelenggarakan acara atau festival yang berfokus pada pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan inklusif;
- r) Menggiatkan pembudayaan Pancasila kepada generasi muda melalui kegiatan seperti Kemah Pancasila untuk siswa, program

Direktorat Jaringan dan Pembudayaan di sekolah-sekolah, serta pendekatan inovatif lainnya.

2. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 2. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti	Belum adanya dasar hukum dalam pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi dalam bentuk Peraturan Badan	Draft arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang telah disusun oleh Kedeputan bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi diserahkan kepada biro hukum untuk ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyesuaian peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila	1. Belum adanya penguatan kelembagaan BPIP dalam bentuk Undang-Undang; 2. Belum adanya SOP dan Pedoman kriteria dalam melakukan analisis dan penyesuaian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada keseragaman dalam implementasi pada program dan kegiatan masing-masing bidang di direktorat. 3. Belum terstrukturanya penyelenggaraan Penyesuaian baik ditingkat pusat maupun di daerah	1. Perlu penguatan kelembagaan BPIP dengan mengupayakan agar RUU BPIP dibahas pada tahun 2024; 2. Perlu pembuatan SOP dan pedoman kriteria kinerja penyesuaian rancangan peraturan perundang-undangan. 3. Perlu adanya kesepakatan konseptual antar <i>Stakeholder</i> penyelenggara penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti	Belum terselesaikannya sinkronisasi muatan materi Rancangan Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi dengan peraturan perundang-undangan terkait	Pembahasan lanjutan penyusunan Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Bersama mitra kerja terkait
Persentase rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya pedoman baku terkait penanganan penyelesaian masalah dan kendala PIP mengakibatkan kurang maksimalnya Advokasi PIP khususnya dalam pola kelola, tahapan dan metode pelaksanaan; dan 2. Belum adanya kelembagaan BPIP di daerah mengakibatkan terhambatnya penanganan, penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala PIP yang membutuhkan pendampingan dan pendekatan secara intens, masif dan komprehensif.	1. Penyusunan Pedoman Baku terkait penanganan penyelesaian masalah dan kendala PIP; 2. Meningkatkan Kerja Sama BPIP dengan mitra Pembinaan Ideologi Pancasila baik di Pusat ataupun di Daerah.
Jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila provinsi/K/L tidak semata-mata ditindaklanjuti dikarenakan memerlukan mekanisme tersendiri dalam merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan 2. Tahapan penyusunan Laporan Rekomendasi belum menerapkan tahapan-tahapan	1. Perlu dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hasil kajian Regulasi dan Kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila 2. Kajian Regulasi dan Kebijakan selalu berpedoman pada Standar Operational Prosedur (SOP) yang berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.	Pancasila Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Belum sinerginya unit kerja Direktorat Analisis dan Penyelarasan dengan Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi dalam hal Hasil Kajian Peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam Rekomendasi Regulasi yang bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila.	Kajian Peraturan perundang-undangan dan Penyusunan rekomendasi hendaknya menjadi tugas dan fungsi unit Kerja Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas analisis dan penyelarasan di Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
- Mendorong disusunnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar atas Kerja Sama kajian advokasi pembinaan ideologi Pancasila dengan mitra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- Mendorong penyusunan pedoman pelaksanaan advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila berupa Peraturan Badan.

3. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 3. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	Kurangnya keterlibatan aktif unit kerja lainnya di BPIP dalam menyusun dokumen strategis BPIP	1. Peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi serta pelaporan secara berkala dalam forum-forum yang dihadiri oleh pimpinan
Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti	1. Terdapat perubahan dan penambahan nomenklatur beberapa kementerian/lembaga seiring dengan hadirnya pemerintahan baru pada Oktober 2024 sehingga dokumen rekomendasi peta jalan PIP memerlukan penyesuaian lebih lanjut; 2. Pelibatan pemangku kepentingan lintas K/L bahkan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kajian yang memerlukan jangka waktu koordinasi yang cukup panjang; 3. Adanya perubahan target <i>timeline</i> penyelesaian dokumen kebijakan yang mengikuti agenda dan kebijakan pimpinan; 4. Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah.	1. Penyesuaian rekomendasi Peta Jalan PIP pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan nomenklatur Kementerian/Lembaga pada pemerintahan yang baru; 2. Mengefektifkan pembahasan substansi dalam setiap pertemuan antar pemangku kepentingan 3. Mengintensifkan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengikuti timeline yang telah disepakati 4. Mengusulkan penambahan SDM yang memiliki keahlian dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah (keterampilan IT)
Persentase NSPK tentang standardisasi materi, bahan ajar dan metode PIP yang ditindaklanjuti	Lambatnya proses penyusunan draf perban yang berpengaruh terhadap capaian NSPK Direktorat.	Peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi antar unit kerja yang berkepentingan.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Silo-silo manajemen internal maupun eksternal dengan K/L lainnya 2. Keterbatasan anggaran 3. Perubahan Kebijakan sebagai dampak berubahnya kepemimpinan pada Kemendikbudristek dan terpecahnya Kemendikbudristek menjadi 3 Kementerian	1. Dibutuhkan paradigma <i>anabler</i> sehingga dapat berkolaborasi dengan <i>Stakeholder</i> pusat dan daerah. 2. Dibutuhkan perumusan <i>debottlenecking</i> menjadi jalan Tengah lintas Kedeputan dan Lintas <i>Stakeholder</i> baik K/L maupun Pemda 3. Melakukan kolaborasi kegiatan dengan Balai (Besar) Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi dan Balai Guru Penggerak 4. Dibutuhkan konsistensi, monitoring dan pengendalian kebijakan maupun rekomendasi kajian yang telah dilakukan 5. Akan dilakukan penyesuaian kembali atas kebijakan yang ada

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program yaitu:

- a) Menyusun prioritas kegiatan didasarkan pada ketersediaan anggaran agar unit kerja tetap dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal;
- b) Komitmen bersama antar unit kerja dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kegiatan.
- c) Perlu dilakukan Kajian strategi Implementasi BTU Pendidikan Pancasila pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama pada tahun 2025, pada lingkup ekosistem satuan Pendidikan yang dikelola oleh swasta pada seluruh Jenjang Pendidikan (Mi, MTs, MA/MAK).
- d) Perlu diambil Langkah Strategi dalam menyambut Tahun Ajaran Baru 2025/2026 yang jatuh pada Juli 2025, yakni Penerapan Buku Teks Utama (BTU) secara Nasional

- e) perlu sinergi dan kolaborasi Kemendikdasmen RI, Kemenag RI dan BPIP RI untuk memastikan Pendidikan Pancasila diterapkan sebagai muatan kurikulum dan mata Pelajaran wajib

4. Kendala dan rencana tindak lanjut terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 4. Kendala dan Tindak Lanjut terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase hasil perencanaan dan pengembangan Diklat PIP yang ditindaklanjuti	Gotong royong dalam pengembangan kebijakan/regulasi, pembangunan jejaring kerja, serta pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung penyelenggaraan Diklat PIP secara instansional yang terstandar belum optimal.	Melakukan komunikasi strategis secara internal dan eksternal untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan dalam penerapan strategi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja.
Persentase Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat PIP yang Bersertikat	Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.	Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dengan mengundang K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah
Persentase NSPK Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti	Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.	Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP dengan mengundang K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	Terbatasnya jumlah sumber daya manusia dalam melakukan penyusunan, pengembangan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kegiatan program dan indikator kinerja kegiatan.	Memaksimalkan jumlah SDM yang tersedia untuk mencapai indikator kinerja kegiatan sebanyak 7 NSPK dan menyampaikan kepada Biro Umum dan SDM untuk dilakukan penambahan SDM di Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum yang memiliki kualifikasi dan kompetensi khususnya dalam hal standardisasi dan kurikulum Pendidikan dan pelatihan.
Persentase Pendidikan dan Pelatihan PIP yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	Penyelenggaraan Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP belum secara optimal sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP No 34 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPIP No 35 Tahun 2021.	Melakukan koordinasi internal dan menyampaikan hasil evaluasi hasil Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP kepada Direktorat Penyelenggaraan Diklat
Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi.	Belum tersosialisasinya peraturan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	1. Melakukan komunikasi serta beKerja Sama Direktorat Perencanaan Diklat dalam rangka penyelesaian dokumen Cetak Biru Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Melakukan komunikasi strategis dengan kementerian dan lembaga dalam rangka penerapan kebijakan strategis dan program teknis terkait pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila secara nasional
Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat	Kendala teknis berupa tidak stabilnya jaringan internet pada lokasi pelaksanaan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP yang mengakibatkan peserta kehabisan waktu pengerjaan soal <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> yang diberikan	1. Melakukan survei serta pengecekan <i>bandwidth wifi</i> di lokasi pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Melakukan penambahan <i>bandwidth wifi</i> di lokasi pelaksanaan Diklat PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya Persentase Peserta Diklat PIP yang kompetensinya meningkat	Penyampaian laporan aktualisasi dari lulusan diklat terlambat disampaikan	1. Koordinasi intensif dengan para lulusan diklat melalui para penanggung jawab laporan 2. Usulan penambahan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Diklat PIP; 3. Kerja Sama penyelenggaraan diklat dengan Kementerian/Lembaga/Instansi, baik Pusat dan Daerah melalui mekanisme <i>resource sharing</i>
Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila	1. Belum begitu atensi terhadap tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, di tahun 2023 ada 4 provinsi. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Paskibraka bertugas melaksanakan penaikan dan penurunan bendera pada Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun berjalan dan melaksanakan penaikan dan penurunan bendera pada Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Setelah melakukan kedua tugas tersebut, Paskibraka baru bisa disebut sebagai Purnapaskibraka. Purnapaskibraka harus mendapatkan diklat pembinaan ideologi Pancasila dan lulus dalam diklat tersebut agar bisa diangkat menjadi PDP. 2. Purnapaskibraka sebelum Tahun 2022	1. BPIP melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan setiap perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kab/Kota dan Provinsi melakukan tugasnya dalam menyelenggarakan program Paskibraka pada Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus dan pada Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni. 2. BPIP melakukan diseminasi khususnya kepada Kab/Kota dan Provinsi yang masih belum melaksanakan tugas pada tanggal 1 Juni 3. BPIP beKerja Sama dengan Kesbangpol dalam menghimpun data Purnapaskibraka sebelum Tahun 2022 yang belum mendapatkan diklat Pembinaan Ideologi Pancasila 4. BPIP beKerja Sama dengan Kesbangpol dalam melakukan pemantauan terhadap Purnapaskibraka yang

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	masih banyak yang belum mengikuti Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila 3. Ada beberapa Kab/Kota yang tidak memiliki PDP disebabkan Purnapaskibraka yang mengikuti diklat Pembinaan Ideologi Pancasila tidak fokus sehingga tidak lulus menjadi PDP.	mengikuti diklat Pembinaan Ideologi Pancasila agar bisa mengikuti diklat dengan fokus dan serius.

Penyelenggaraan Diklat PIP pada Tahun 2024 menghadapi kendala-kendala dari aspek dukungan regulasi/kebijakan, keterbatasan sumber daya, sehingga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 dengan melakukan komunikasi strategis dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal BPIP dalam rangka kolaborasi/gotong royong dalam:

- Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan;
- Pengembangan dan penerapan kebijakan strategis dan program teknis untuk mewujudkan gotong royong kolaboratif, integratif, dan sinergis dalam pemanfaatan sumber daya (SDM, finansial, sarana prasarana, data informasi) antara BPIP dengan lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional bagi aparatur negara, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya;
- Pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Diklat PIP dan pelaksanaan PIP dalam Diklat calon Paskibraka;

- d) Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan
- e) Pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai standard dan kebutuhan
- f) Pengembangan sistem dan metode pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- g) Fasilitasi pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP serta sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP untuk mendorong penyelenggaraan Diklat PIP secara instansional di lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; dan
- h) Penyempurnaan Instrumen Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat PIP.

5. Kendala dan rencana tindak lanjut terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 5. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang ditindaklanjuti	1. Indikator Pencapaian Program PIP khususnya Peta Jalan PIP dalam hal Pengendalian masih belum terstandardisasi 2. Belum ada Dokumen Kebijakan dalam hal Pedoman Pengendalian PIP; 3. Fungsi Pengendalian belum dianggap hal yang sangat penting oleh penerima	1. Mendorong untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Indikator Pencapaian Program PIP yang terfokus pada Peta Jalan PIP 2. Mempercepat proses penyusunan Pedoman Pengendalian PIP; 3. Melaksanakan kegiatan yang

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	manfaat - Koordinasi yang sudah dibangun tidak berjalan secara kolaboratif - Adanya ketakutan penerima manfaat atas kehadiran Pengendalian dalam memberikan solusi/rekomendasi terhadap program kegiatan yang dilakukan	menunjukkan fungsi Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas PIP - Mendorong SDM yang dimiliki oleh direktorat Pengendalian untuk melakukan peningkatan kapasitas kemampuan dalam melakukan kegiatan pengendalian - Melakukan Pendekatan informal secara halus kepada unit kerja
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Belum terarahnya rekomendasi hasil pengendalian sesuai dengan tujuan atau sasaran BPIP	- Membuat rekomendasi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran - Menetapkan objek dan lokus pelaksanaan pengendalian melalui aturan BPIP - Meningkatkan koordinasi ke seluruh mitra/pelaksana kegiatan Pengendalian PIP (Internal/Eksternal) - Menegaskan kembali peran dan kewenangan Pelaksanaan Pengendalian PIP - Data Masalah dan Analisis hasil rekomendasi dijadikan acuan dalam penyusunan rekomendasi
Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang ditindaklanjuti	Belum dapat dilaksanakannya survei pada Program Pendidikan Pancasila dan Program Paskibraka karena tidak dapat dilakukannya	- Sedang disusun Pedoman Evaluasi PIP - Sedang disusunnya Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PIP - Akan dilakukan survei pada

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	kegiatan sesuai arahan pimpinan 2. Belum tersusunnya regulasi tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PIP 3. Masih perlunya pengembangan instrumen pengukuran Media 4. Belum tercapainya jumlah target responden dalam survei untuk kelompok sasaran Penyelenggara Negara dan ASN, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Organisasi/Ormas, dan Perusahaan Asing karena tertundanya kegiatan yang disebabkan oleh realokasi anggaran	Program Pendidikan Pancasila dan Program Paskibraka setelah mendapatkan arahan pimpinan 4. Analisis data survei untuk kelompok sasaran Penyelenggara Negara dan ASN, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Organisasi/Ormas, dan Perusahaan Asing sedang dalam proses. 5. Akan dilakukan finalisasi instrumen Media 6. Akan dilakukan uji instrumen Media untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliable.
Persentase Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Keterbatasan jumlah SDM pada Direktorat Pengukuran Pelembagaan	1. Permintaan penambahan SDM
Persentase rekomendasi pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	2. Belum ada pedoman pengukuran Pelembagaan dan pengukuran IAP	2. Melakukan koordinasi untuk melakukan penyusunan pedoman pengukuran pelembagaan dan pengukuran IAP

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan Sasaran Program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- a) Perlu penguatan produk hukum untuk optimalisasi pengendalian pembinaan ideologi Pancasila, evaluasi pembinaan ideologi Pancasila dan pengukuran kelembagaan Pancasila;
- b) Penyelesaian Pedoman Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila, Pedoman Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pengukuran Pelembagaan Pancasila;
- c) Perlu dilakukannya finalisasi pemutakhiran instrumen alat ukur Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Prioritas;
- d) Pengambilan sampel atau responden dalam survey dengan mempertimbangkan keterwakilan dari jumlah populasi yang ada;
- e) Peningkatan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan;
- f) Perlu penambahan SDM dengan keahlian bidang Statistisik.

6. Kendala dan rencana tindak lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Tabel 4. 6. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Keterlambatan penyampaian dokumen usulan revisi anggaran dari unit kerja sehingga menghambat penerbitan dokumen revisi anggaran.	Perlu diadakan rapat bersama unit kerja tata cara revisi anggaran
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu keuangan	laporan keuangan 2023 audited sedang dalam proses penyusunan, kemarin terhambat akibat maintenance aplikasi SAKTI	Melakukan komunikasi dengan pihak terkait, seperti Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Penyampaian Laporan dari unit kerja melebihi waktu yang telah ditetapkan sehingga memperhambat dalam penyusunan laporan kinerja	Mengadakan rapat kepada unit kerja untuk menentukan penanggung jawab dalam penyusunan laporan kinerja

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	Penyelesaian Prosun 2024 tidak sesuai dengan target	Akan mengundang JPT Madya/Pratama pemrakarsa untuk pembahasan kendala dalam penyusunan
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	1. Belum dilakukan evaluasi kelembagaan. 2. Melakukan pengkajian mengenai rencana pembentukan unit kerja untuk pendidikan dan pelatihan PIP. 3. Melakukan evaluasi SOP yang terintegrasi dengan proses bisnis. 4. Dalam menaikkan Indeks Nilai RB dalam melakukan koordinasi antar unit kerja terkendala karena tingginya pekerjaan pada unit kerja terkait.	1. Sudah dilakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB dan saat ini sedang menyusun indikator yang disesuaikan dengan Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi pemerintah. 2. Sudah dilakukan koordinasi dengan LAN dan Kedeputan bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. mengenai rencana pembentukan unit kerja untuk pendidikan dan pelatihan PIP. 3. Melakukan koordinasi antar unit kerja untuk melakukan evaluasi SOP dan proses bisnis. 4. Melakukan koordinasi yang intensif dengan menunjuk PIC untuk rencana aksi yang telah dibuat pada masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	1. Luas Area Gedung yang terbatas sehingga kurang mendukung untuk dilakukan penempatan sesuai dengan unit kerja; masing-masing; 2. Salah satu indikator dalam indeks pengelolaan aset adalah mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk penghapusan yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak. 3. Luas Area Gedung Kantor yang terbatas sehingga sedikit menghambat proses Pemeliharaan dan Revitalisasi Gedung Kantor Yang Digunakan BPIP dalam hal peletakan bahan-bahan bangunan 4. Proses perencanaan pengadaan masih bersifat mendadak sehingga menggunakan manual dan tidak melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat berdampak pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 5. Masih adanya beberapa kebijakan internal yang harus dipenuhi terkait dengan kebijakan reward and punishment bagi pegawai di lingkungan BPIP serta belum adanya system informasi yang menggambarkan pemetaan talenta di lingkungan BPIP dan perlu diperbaikinya indicator penilaian system merit internal BPIP 6. Masih adanya beberapa kebijakan internal yang harus dipenuhi terkait dengan kebijakan reward and punishment bagi pegawai di lingkungan BPIP serta belum adanya system informasi yang menggambarkan pemetaan talenta di lingkungan BPIP dan perlu diperbaikinya indikator penilaian system	1. Menggunakan ruang kerja dengan konsep co-working space memanfaatkan jadwal perjalanan dinas unit kerja; 2. Melakukan Penghapusan Barang Milik Negara yang telah dalam kondisi rusak berat untuk menunjang Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan Pendapatan dari Penjualan peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan tetap terlaksana namun tidak dapat dilakukan pada saat jam kerja dikarenakan terbatasnya lahan untuk meletakkan bahan-bahan; 4. Perlu komitmen Bersama antara Unit Kerja, PPK, PPBJ, dan Pokja Pemilihan; 5. Perlu adanya komitmen penerapan sistem merit di lingkungan BPIP dengan mulai melakukan pemetaan talenta pegawai yang didukung dengan sistem informasi yang mumpuni sehingga proses penerapan manajemen talenta bisa dilakukan; 6. Perlunya dukungan dan komitmen dari semua pihak terhadap proses penyelenggaraan manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	merit internal BPIP 7. Layanan yang diberikan kepada pegawai memiliki ketergantungan pada Instansi lain, sehingga masih belum optimal 8. Anggaran yang dikelola belum mampu mengakomodir kegiatan prioritas, misalnya: Seleksi terbuka 2 jabatan Deputy dan 4 JPT-Pratama yang bersamaan dengan pelaksanaan Penerimaan Calon PNS dan Calon PPPK 9. Salah satu indikator dalam indeks pengelolaan aset adalah mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk penghapusan yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak.	7. Dilakukan Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan layanan SDM kepada pegawai 8. Dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk pengalokasian tambahan anggaran 9. Melakukan Penghapusan Barang Milik Negara yang telah dalam kondisi rusak berat untuk menunjang Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan Pendapatan dari Penjualan peralatan dan mesin
Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Kompetensi SDM Biro masih rendah;	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi atau Bimbingan Teknis
Nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik BPIP	Kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang dimaksud	Mengajukan permintaan SDM
Nilai pengawasan kearsipan	Pengawasan Kearsipan Internal, masih banyak Unit Kerja yang belum melakukan pengelolaan arsip Aktif pada Unit Kerja dengan Baik, hal tersebut karena BPIP belum memiliki SDM Kearsipan yang fokus untuk melakukan Pengelolaan arsip, dan BPIP belum memiliki NSPK Kearsipan yang menjadi syarat pelaksanaan kearsipan Internal	Pengawasan Kearsipan telah dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal pada bulan April 2023, dan pelaksanaan Pengawasan Eksternal telah dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Pada tanggal 12 Juli 2023 akan dilakukan Verifikasi pengawasan Internal untuk memperoleh 40% Nilai Pengawasan Kearsipan yang akan dikeluarkan oleh Arsip Nasional pada bulan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		Agustus/September 2023.
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	1. Pengangka Masih adanya denda keterlambatan yang belum dibayarkan oleh Pihak Penyedia untuk temuan atas Pemeriksaan LK BPIP Tahun 2020; 2. Penyusunan HPS, Proses Pengadaan Langsung dan Pembayaran Biaya Konsumsi pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Sebesar Rp30.681.818 Tidak Sesuai Ketentuan; 3. Dan pengamanan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Optimal.	1. Merekomendasikan penerbitan Surat Penagihan kepada pihak penyedia 2. Telah merekomendasikan kepada Sekretaris Utama untuk memerintahkan PPK supaya membuat HPS berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Memorandum Kepala Nomor 1231/PW/08/2022/BPIP perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2022; 3. Telah terdapat dokumen listing Data BMN Intrakomptabel s.d. 31 Des 2022 yang nantinya di pemantauan BPK berikutnya diserahkan kembali.
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	1. Belum Masih adanya denda keterlambatan yang belum dibayarkan oleh Pihak Penyedia CV AP sebesar Rp103.765.136 untuk temuan atas Pemeriksaan LK BPIP Tahun 2020; 2. Masih ada kelebihan pembayaran biaya non personel atas biaya konsumsi yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp30.681.818 dan yang belum disetorkan ke	1. Penyedia telah melakukan pembayaran sebesar Rp 13.765.136 dan telah disetorkan ke Kas Negara sehingga yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 90.000.000. 2. Merekomendasikan penerbitan Surat

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	Kas Negara perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Biaya Konsumsi pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Sebesar Rp30.681.818 Tidak Sesuai Ketentuan. 3. Masih ada kelebihan pembayaran sebesar Rp63.233.504,- atas kekurangan volume pekerjaan dari empat penyedia jasa	Penagihan kepada pihak penyedia. 3. PPK telah melayangkan surat penagihan I, II dan III kepada penyedia 4. Mengingat kondisi pihak penyedia yang tidak memungkinkan lagi untuk membayar/menunda klanjuti rekomendasi BPK RI sehingga Sekretaris Utama bersurat ke Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI Nomor 1815/PW/08/2023/S U Tanggal 23 Agustus 2023 meminta penyelesaian status tindaklanjut. 5. Telah merekomendasikan kepada Sekretaris Utama untuk memerintahkan PPK agar membuat melakukan penagihan kepada pihak PT. HPS berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Memorandum Kepala Nomor 1231/PW/08/2022/B PIP perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2022, dan telah ada cicilan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		penyetoran atas hal di atas sebesar Rp.5 juta rupiah per tanggal 16 Mei 2023, kode billing 820230516516990, dan merekomen dasikan kepada Sekretaris Utama untuk memerintahkan kepada PPK Ybs agar membuat melakukan penagihan kembali atas sisa kelebihan bayar tersebut kepada pihak PT. HPS berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. 6. Telah melakukan penyetoran dari dua penyedia jasa sebesar Rp32.860.624,- sehingga kurang setor sebesar Rp30.372.880,- 7. Melakukan penagihan kepada dua penyedia jasa yang belum melakukan penyetoran
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	Perolehan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP BPIP Tahun 2023 yang belum mencapai maksimal yakni sebesar 2,901 masih terdapat permasalahan pada unsur Penetapan Tujuan sehingga berdampak ada kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis	Pelaksanaan reviu atas pengelolaan manajemen risiko di lingkungan BPIP dengan memperhatikan pada tahap penilaian risiko berupa penetapan tujuan yang secara garis besar mengacu pada Keputusan Kepala BPIP nomor 28/2023 tentang proses bisnis. BPIP perlu segera menetapkan penentuan selera risiko oleh pemilik risiko pada unit kerja serta unit organisasi.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	1. Keterbatasan SDM Teknis 2. Teknologi yang terus berkembang dengan cepat. 3. Terjadi serangan ransomware pada 20 Juni 2024 pada Pusat Data Nasional yang mengakibatkan aplikasi BPPIP tidak dapat diakses	1. Perlu penambahan SDM Teknis 2. Perlu melakukan pengembangan kompetensi SDM 3. Melakukan rapat koordinasi untuk pembahasan langkah dan tindakan kedepannya

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan Sasaran Program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- a) Perlu adanya penguatan area perbaikan melalui koordinasi antar unit kerja dan/atau unit organisasi di lingkungan BPPIP serta penguatan kompetensi APIP dalam rangka penilaian SPIP selaku tim penjamin kualitas;
- b) Pada tindak lanjut dari temuan BPK perlu adanya kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c) Perlu peningkatan koordinasi, komunikasi dan perhatian yang lebih dari para pengelola Keuangan (PPK) dalam penyediaan data Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa serta TP3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) sehingga data yang didapat menjadi representatif dalam menghasilkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh BPKP untuk pelaporannya kepada Presiden RI;
- d) Perlu adanya Pembuatan Timeline yang jelas mengenai pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas di BPPIP sehingga sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang ditentukan oleh BPKP serta Pelaksanaan monitoring dan pendampingan secara berkala oleh Biro Pengawasan Internal atas

- penyampaian data dukung SPIP Terintegrasi sehingga proses Penilaian Mandiri oleh Manajemen tidak mengalami kendala;
- e) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, perlunya untuk BPIP melakukan monitoring beserta evaluasi secara berkala terhadap perencanaan kinerja sampai ke realisasi sehingga dapat memastikan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program, Target Kinerja mendukung Sasaran Strategis, Hal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan dokumentasi secara lebih tertib terhadap pelaksanaan monitoring tersebut.
 - f) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam, perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala.
 - g) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam, perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala.
 - h) Pengelolaan arsip aktif pada beberapa Unit Kerja belum optimal, dan belum adanya NSPK Kearsipan sebagai syarat pelaksanaan kearsipan Internal. Oleh karena itu, tindak lanjut yang diusulkan mencakup identifikasi unit dengan performa kearsipan rendah, implementasi NSPK Kearsipan, serta evaluasi dampak pelatihan dan implementasi NSPK terhadap kinerja pengelolaan arsip aktif. Langkah-langkah tindak lanjut

diarahkan pada penetapan jadwal rutin untuk pengawasan internal dan eksternal, dukungan tim pengawasan dengan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan, serta analisis mendalam terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi melibatkan pembentukan tim internal untuk memastikan pengawasan berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem manajemen mutu.

- i) Unsur ketaatan pada peraturan yakni atas laporan BPK mengenai ketaatan terhadap peraturan antara kurun tahun 2018-2022 dengan rincian 5 temuan pada tahun 2019, 4 temuan pada tahun 2020, 9 temuan pada tahun 2021, 6 temuan pada tahun 2022, dengan penyelesaian berupa ruang lingkup temuan yang berulang.
- j) Salah satu unsur penilaian Manajemen Risiko Indeks yakni adalah penguatan kompetensi penjaminan mutu dan kualitas pelaksanaan MRI melalui pelaksanaan sertifikasi pengelola risiko lingkup BPIP dengan kompetensi pelatihan serta bimbingan teknis Manajemen Risiko sektor Publik baik melalui penyelenggaraan BPKP maupun internal BPIP.
- k) Keamanan Administrasi, berupa Aset BMN untuk diberikan nomor urut pendaftaran barang inventaris, serta kelengkapan dokumen Aset pinjam berupa Berita Acara Serah Terimanya
- l) Diperlukan Kerja Sama dan sinergi dari semua unit kerja dan pegawai untuk mendukung peningkatan indeks maturitas SPBE tahun 2025. Dukungan dari pemangku kebijakan juga diperlukan untuk penguatan dari sisi regulasi dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan data dan informasi di lingkungan BPIP

BAB V | PENUTUP

Kinerja BPIP harus lebih memberikan dampak dan manfaat dimasa-masa mendatang. Gerak langkah Aktualisasi Pancasila harus dapat sampai pada masyarakat, agar dapat memunculkan rasa percaya diri dan ketangguhan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Indikator kinerja BPIP harus dapat diukur agar Akuntabilitas Kinerja terjaga diiringi dengan pengelolaan anggaran yang makin bijaksana dan mengedepankan asas kepatutan.

SALAM PANCASILA!

Jakarta, 31 Januari 2025

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI



2024

www.bpip.go.id